

POLITICON

JURNAL ILMU POLITIK

ISSN : 2685-6670 (ONLINE) VOLUME 3, No.1 Maret 2021

Daftar Isi

- Political Marketing of Stream by Candidates through Facebook in the 2018 Regional Election of East Java
Arina Rohmatul Hidayah 1-33
- Faktor-Faktor Internal Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2019
Muhammad Nuh Ismanu, Chusnul Mar'iyah 34-59
- Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan
Diki Suherman, Yogi Suprayogi Sugandi, Mohammad Benny Alexandri 60-87
- Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas
Hasse Jubba, Muh Rafi, Zuly Qodir 88-100
- Russia-NATO Strategic Rivalry and Influence Struggle In Eastern Europe In Security and Economy
Syaiful Rohma, Marthen Napang, Siti Nurhasanah 111-132
- Law and Politics: Study of the Presidential Threshold in the 2019 General Election of Indonesia
JM Muslimin, Ahmad Fadoliy, Wildan Munawar 133-160

Indexed By :



PENERBIT :
PRODI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, Politicon: Jurnal Ilmu Politik bisa kembali terbit. Shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir.

Jurnal Politicon terbit atas kesadaran akademik akan pentingnya publikasi ilmiah bagi pengembangan ilmu politik dengan segala kemanfaatan-kemanfaatannya. Sejauh ini, ilmu politik berkembang secara pesat dan dinamis dalam konteks internasional, nasional dan lokal. Perkembangannya beriringan dengan sejumlah perubahan pada aspek teoritis, metodologis maupun teknologis.

Pada volume 3 nomor 1 ini ada enam artikel yang dipilih untuk dipublikasikan sesuai konteks dan aspek perkembangan di atas. Artikel-artikel tersebut menyajikan topik ilmu politik dengan beragam tema, fokus, kasus, pendekatan, dan perspektif. Artikel-artikel tersebut menarik untuk dicermati sebagai bahan kajian dalam setiap aktivitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian di bidang ilmu politik.

Dengan terbitnya volume ini, tim editorial mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap pihak yang telah memberikan dukungan selama proses publikasian. Terutama kepada pihak universitas, fakultas, program studi, dan mitra bestari serta para penulis yang terus berkomitmen, bekerja sama dan bekerja keras untuk meningkatkan kualitas artikel yang dipublis.

Tim editorial berharap publikasi ilmiah ini dapat bermanfaat bagi segala pihak, baik secara teoritis dalam memperkaya studi ilmu politik maupun secara praktis dalam menawarkan gagasan dan solusi bagi upaya mengantisipasi sekaligus mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan. *Wallau'alam bishawab.*

Bandung, 31 Maret 2021

Tim Editorial

EDITORIAL TEAM

Editor in-chief

1. Asep A.Sahid Gatara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Managing Editor

1. Fisher Zulkarnaen, (Scopus Author ID : 57214794506) UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, Indonesia

Editorial Board

1. Heldi Heldi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
2. Marc Hufty, (Scopus Author ID : 15048060800) Institut de hautes études internationales et du développement, Geneva, Switzerland
3. Muhammad Andi Septiadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
4. Md. Mamun -ur- Rashid, (Scopus Author ID : 57101171000) Patuakhali Science and Technology University, Patuakhali, Bangladesh
5. Hasse Jubba, (Scopus Author ID : 57213198136) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
6. Ratnia Solihah, (Scopus Author ID : 57194869297) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia
7. Yanwar Pribadi, (Scopus Author ID: 56241252500) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
8. Muslim Mufti, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Reviewers

1. Ahmad Ali Nurdin, (Scopus Author ID : 57205295222) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
2. Asep Muhammad Iqbal, (Scopus Author ID : 57205295160) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
3. Sahya Anggara, (Scopus Author ID: 57191839916) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
4. Jajang A. Rohmana, (Scopus Author ID : 56925317200) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
5. Adon Nasurullah Jamaludin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
6. Dian Sa'adillah Maylawati, (Scopus Author ID : 57200569961) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
7. Alejandro Osorio Rauld, (Scopus Author ID : 57214761765) Universidad Complutense de Madrid, Spain
8. Abdul Rashid Moten, (Scopus Author ID : 13204644600) International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
9. Mohd Solahuddin Bin Shahrudin, (Scopus Author ID : 56655092400) Universitas Teknologi Mara, Selangor, Malaysia
10. Ratna Riyanti, (Scopus Author ID : 57215581539) Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia
11. Cahyo Seftyono, (Scopus Author ID : 5720335280) Universitas Negeri Semarang, Indonesia

12. Cecep Darmawan, (Scopus Author ID : 56976350500)
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
13. Wawan Sobari, (Scopus Author ID : 57105777400)
Universitas Brawijaya Malang, Indonesia
14. Herdi Sahrasad, (Scopus Author ID : 57215770332)
Universitas Paramadina, Indonesia
15. Muradi ., Universitas Padjajaran Bandung, Indonesia
16. Maswadi Rauf, Universitas Indonesia, Indonesia

DAFTAR ISI

Political Marketing of Stream by Candidates through Facebook in the 2018 Regional Election of East Java 1-33

Arina Rohmatul Hidayah

Faktor-Faktor Internal Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2019 34-59

Muhammad Nuh Ismanu, Chusnul Mar'iyah

Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan..... 60-87

Diki Suherman, Yogi Suprayogi Sugandi, Mohammad BennyAlexandri

Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas88 -110

Hasse Jubba, Muh Rafi, Zuly Qodir

Russia-NATO Strategic Rivalry and Influence Struggle In Eastern Europe In Security and Economy 111-132

Syaiful Rohma, Marthen Napang, Siti Nurhasanah

Law and Politics: Study of the Presidential Threshold in the 2019 General Election of Indonesia 133-160

JM Muslimin, Ahmad Fadoliy, Wildan Munawar

Marketing Politik Aliran oleh Kandidat melalui Facebook dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur Tahun 2018

Political Marketing of Stream by Candidates through Facebook in the 2018 Regional Election of East Java

Arina Rohmatul Hidayah

Institut Agama Islam Tribakti (Institusi/Universitas/dsb)
Jl. KH Wachid Hasyim No. 62, Bandar Lor, Mojoroto, Kediri City, East Java, 64114

*corresponding author E-mail: arinrohmatulh@gmail.com

Diterima: 9 September 2020; Direvisi: 7 Oktober 2020; Disetujui: 9 Oktober 2020

ABSTRAK

Berangkat dari riset-riset sebelumnya tentang marketing politik terdapat beberapa kekosongan baik dari segi konten maupun esensinya sebagai proses pertukaran dan interaksi politik. Berangkat dari permasalahan ini, maka peneliti bermaksud untuk mengaktualisasikan esensi dari teori atau konsep dasar marketing politik ke dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur tahun 2018 melalui pemanfaatan media sosial sebagai media interaktif. Di sisi lain, berkenaan dengan konten yang diangkat, peneliti memilih politik aliran sebagai sistem budaya masyarakat, karena aspek ini menjadi salah satu faktor penentu preferensi pemilih, khususnya di Jawa Timur. Dalam mengeksplor hal itu, peneliti menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan teori marketing politik beserta orientasinya, konsep politik aliran dari Clifford Geertz maupun peran FB dan fitur-fitur di dalamnya. Temuan yang didapat menunjukkan bahwa politik aliran juga bergulir di kalangan elit politik. Masing-masing kandidat berusaha menampilkan beberapa karakteristik aliran yang dianggap familiar oleh publik untuk meningkatkan *redundancy* atau kepastian pesan. Dalam hal ini, Gus Ipul-Puti dinilai lebih kuat dan variatif dibandingkan Khofifah-Emil. Namun melalui reaksi publik, politik aliran yang disampaikan tidak semuanya dapat ditangkap secara jelas oleh pengguna karena ada kecenderungan perbedaan budaya antara pengirim dan penerima pesan. Meski begitu, implikasi dari penelitian ini bisa sebagai tolok ukur bagaimana memanfaatkan politik aliran secara efektif agar mendapat respon positif dari khalayak serta menjadi media literasi dalam mengenali simbol-simbol budaya yang diangkat dalam kontestasi politik di Indonesia.

Kata Kunci: Facebook, marketing politik, politik aliran, reaksi elektorat

ABSTRACT

Previous researches on political marketing found several gaps in terms of content and essence as a process of political exchange and interaction. Based on this, the researcher aims to actualize the essence of the basic theory or concept of political marketing into the 2018 regional election of East Java through the use of social media as an interactive media. For the content aspect, researcher selected political stream as a society cultural system. It considered as one of the determining aspects for voter preferences, especially in East Java. Qualitative approach with the content analysis method conducted for this research by applying political marketing theories and the political stream concepts from Clifford Geertz. The result of this research revealed that political stream also revolves around the political elite. Each candidate tries to display some stream characteristics that are considered familiar by the public to increase redundancy or message certainty. In this case, Gus Ipul-Puti is considered to be stronger and more varied than Khofifah-Emil. However, from public reaction, not all of the political streams conveyed can be clearly captured by the users. This occurred because there are some cultural differences between the message sender and its receiver. Nevertheless, the implications of this research can be used as a benchmark of how to utilize political stream effectively in order to get a positive response from the public. Then, it also can be literacy medium to recognize the cultural symbols raised in political contestation in Indonesia.

Keywords: Facebook, political marketing, political stream, electoral reaction

INTRODUCTION

Regional elections or simultaneous regional elections will be held on June 27, 2018. In a democratic party, it has become the right of every candidate to campaign or known as political marketing. According to Ormrod, et al (2013), political marketing has a narrow and broad meaning. Its narrow meaning is how commercial marketing tools are used to achieve the strategic and tactical objectives of political actors. Whereas broadly, political marketing is defined as the role of marketing or marketing in political organizations that focuses on facilitating value exchange and building relationships with various stakeholders such as voters, opposing parties or candidates, and the media. Furthermore, Ormrod, et al (2013) emphasized value exchange as a fundamental concept in political marketing studies. According to Brennan and Henneber (2008), this exchange is understood as a sister interaction between

two actors who have agency or voters and candidates who enter the exchange freely (in Ormrod, et al, 2013). Meanwhile, Henneber and Ormrod (2013) argue that political exchange requires three interactions and not only dyadic interactions (buyer / seller). The three interactions in question are political actors and voters, parliamentary interaction, interaction among political actors who have a mandate in parliament and governmental interactions between the government and citizens (in Ormrod, et al, 2013). When talking about the exchange and interaction processes referred to in the definition of political marketing above, there are several components that need to be considered, namely the communicator in this case is the political actor itself, the message, the media and the communicant or the voter. In today's digital era, demands in the marketing process are not limited to door-to-door or through traditional media such as television, radio, pamphlets, billboards and others. But it is more about the use of digital media, one of which is social media as interactive media. The increase in social media users is a very important entry point for political actors to reach out to their voters. So, there are many researchers in Indonesia who study about it like Pranawa and Humsona (2017) that applied case study methods and content analysis to political marketing from Teman Ahok organization which utilized several social media such as Twitter, blogs, Youtube, websites, Instagram and WhatsApp on the 2017 DKI Jakarta Pilkada. The results showed that political marketing strategies through social media were conducted by Teman Ahok which included the determination of the electoral segment, organizing strategies, setting the position of candidates, monitoring and evaluation.

Apart from Indonesia, in a global context, much of the research points to how Barack Obama revolutionized political marketing using social media. The presidential campaigns of the United States in 2008 and 2012 have become a fundamental reference for researchers to further explore the media side. As for the research in question, one of them is Karlsen & Enjolras (2016) which examines the campaign style through social media and the influence of

the hybrid political communication system in Norway. By using survey methods and Twitter data, this study resulted in findings that social media is used to increase activities such as showing the personal side of each candidate. But on the other hand, to increase the influence of each candidate, they need to carry out a hybrid campaign that is combined with traditional media such as television. In other words, in this case the role of social media is limited to increasing awareness of the profile of each candidate, but not the main determinant of increasing voter preferences.

In addition, there is also research from Vladimir (2018) with the literature review method which draws conclusions about the role of social media as a political marketing tool, namely that there are positive and negative impacts. Among the positive impacts that can be seen are bringing candidates and voters closer together, facilitating the exchange of ideas among the community, inviting the younger generation to vote and not being apathetic, providing opportunities for the emergence of new candidates who are less well-known and the breakdown of big party bias. Meanwhile, the negative impact is enabling campaigns with unethical or illegal profiles, uncensored messages, the spread of fake news and hate speech.

Apart from the demands of the use of media by political actors, the message which is the main object of political marketing must also be considered. Especially in Indonesia with its cultural diversity, local wisdom is one of the products that candidates can communicate to voters. Of the several products that are important to consider, political stream is one of them. Because in terms of history and reality in the field, the religion or belief held by a society can have an impact on their political behavior. Panggabean (2017) explained, in Indonesia, religion in politics has a long history of influence. Previous studies have found that religion has played an important role in politics since 1955 (Liddle and Mujani, 2007). Geertz shows that political orientation in Indonesia is influenced by religious schools, which also represent classes (Liddle and Mujani, 2007). It must be admitted that the

political stream did experience dynamics in Indonesia. At the beginning of its emergence, political stream played a strong role in the political system in Indonesia. But over time in the new order era until the 2004 elections, for example, the political stream tended to not get a place. Until in 2014 and the DKI Jakarta elections in 2017, many issues of stream returned to strength. Therefore, this is where the urgency of a theme about political stream is to be lifted. While research on the political stream in general elections, especially elections, was reviewed by Panggabean (2017). He discussed the factors influencing voting behavior and how the public made decisions in the DKI Jakarta Election 2017. Through the survey method of 228 respondents in Jakarta, the results found were priming with religious cues substantially provoking emotions, in line with previous research. Evidence shows that religiously motivated voting behavior stands out and is stronger than economic status anxiety. Provoking people with religious cues effectively stimulates emotions that lead to bias in groups. Findings in various religious groups report that Muslim respondents are more likely to support a leader with the same religion and tend to disagree with non-Muslim leaders. It should be noted that the term priming means using certain signals (images, texts, smells) to influence the human brain (long-term retention), which affects future behavior (Cassino and Erisen, 2008 in Panggabean, 2017).

When in terms of candidates and their use of media and marketing content that have been mentioned, the next component that also needs to be considered in the process of exchanging and interacting with political marketing is the communicant or the voter. Political marketing is not merely about how candidates market their vision and mission, policies and other political products, but also must see how the public reacts. Especially by using social media as interactive media. There are many features and features that allow candidates to control the public's reaction to the content submitted. For example, there is research from Lappas, *et al* (2014) said that social networking sites like Facebook are used by politicians to

increase *awareness* and support of voters. By giving *likes*, *shares* and *comments* it can be said to represent how the public responds to the content of political stream, whether characteristics that tries to raise related to it can be interpreted equally by candidates or not and what kind of political stream gets a positive response. So that the scope of this research is not only in the realm of communicators and communication messages, but also the implications of using FB as a marketing tool for political stream for the communicant itself.

From some of the studies previously mentioned, there is a visible gap. First, for research on political marketing through social media in Indonesia, the weakness that is possessed is that candidates do not use Facebook. Even though according to Facebook Indonesia Country Director, Sri Widowati, in March 2016, there were 82 million *users* per month in Indonesia. Whereas in 2017 there were 115 million *users*, so the growth was almost 40 percent in one year (Wardani, 2017). In addition, the discussion raised is still limited to the marketing strategy and has not described the content in detail. Especially those relating to political stream. In his findings, the researchers said that content that was highlighted was more directed at forming candidate figures or images such as nationalistic, honest and hard-working. The impact of Ahok's identity as a non-Muslim on content marketing delivered and *feedback* from the public was not conveyed in this study. Not only is the use of social media less optimal and content that has not been varied, political marketing research has also not explored deeper into the public response. Research from Pranawa and Humsona is still limited to the realm of communicators.

As for research in the global realm, the advantage is that they can focus on discussing in terms of the effectiveness of using social media, so that the findings appear that social media has less significant impact when it is not maximized through traditional media. But on the other hand, just like the research from Pranawa and Humsona above, the weaknesses of political

marketing research have not been comprehensive, not only from the point of view of the communicator but also the communicant or the public response. Considering the important point in the concept of political marketing is the process of exchange and interaction. There is a two-way communication here that should be examined from two aspects at once.

While the next research is about the political stream in general elections, Panggabean has explained the impact of religious identity in the elections. But unfortunately, it does not list the media used. Even if it refers to the concept of priming itself, the cues put forward in the form of text, memes and all kinds of things, require communication media. Moreover, according to Scheufele & Tewksbury (2007), priming is an extension of the agenda setting (in Panggabean, 2017). Based on the agenda setting concept, what is considered important by the media will also be considered important by the public. So that when the two concepts are interrelated, they should also involve and emphasize the role of the media in shaping cues or influencing users.

And lastly is the weakness of the research on the public reaction conducted by Lappas, et al (2014). In this study, they tried to show the effectiveness of using Facebook in political marketing. They even stated that the number of likes and comments received by candidates had an impact on the choice results. Giving likes and comments on social media reflects the real-world support you get during the election. Although we have discussed in depth about the public's reaction, the problem is that there is no marketing content discussed. There has been no discussion about giving the highest likes and comments for what kind of content.

So that from some of the studies above, the weaknesses that are owned become a reference for the author to discuss them comprehensively or in other words emphasize the concept of political marketing as a process of exchange and interaction which has only been studied from one side. The efforts made by the author are to see how candidates are marketing stream politics (content

marketing that is not widely discussed by researchers) through social media Facebook as the media with the most number of users in Indonesia, as well as the public's response to the content. For the selection of regions to be studied, East Java Pilkada is the right region. Because in this region, the political stream was first discovered by Geertz, precisely in Modjokuto, another name from Pare District. In addition, according to the Indonesian Political Indicator researcher, Burhanudin Muhtadi, the heat of the contestation in the 2018 East Java Pilgub because the East Java region has been used as a barometer of the presidential election since 2014 . He added, whoever is a political party that will win the East Java regional election, nationally will generally win the 2019 presidential election (Saka, 2017). On the other hand, because the political stream departs from the cultural system of society, then in East Java there are several local political cultures which according to Ayu Sutarto include Javanese Mataraman culture , Jawa Panaragan, Arek, Samin (Sedulur Sikep), Tengger, Osing (Using), Pandalungan (often also called Mendalungan), Madura Pulau, Madura Bawean, and Madura Kangean (Leni, 2012).

RESEARCH METHOD

The researcher here applies a qualitative approach through qualitative content analysis methods. Qualitative content analysis is a method that uses an inductive approach. In Elo & Kyngas (2007) explained that according to Chinn & Kramer (1999), an approach based on inductive data moves from specific to general, so certain examples are observed and then combined into a whole or general statement. The inductive approach was chosen based on several considerations that this study does not intend to test the concept or theory of political stream (such as a deductive approach), but rather to see, identify and describe how the theory was applied as an object of political marketing through FB.

With several stages from Elo & Kyngas (2007), namely selecting or selecting unit analysis, understanding the overall data, open coding, coding sheets, grouping, categorizing, and finally making abstractions, researchers

will analyze each candidate's official account, @sedulurgusipul and @KhofifahdanEmil during the campaign period 15 February - 23 June 2018.

RESULT AND DISCUSSION

During the 2018 Regional Election of West Java used political marketing stream by candidates to get the support from the voters. The political stream are directed at the abangan community and the santri community as well as a combination of the two. The characteristics used are text, photos and videos. This can be seen in table 1 below.

Table 1. Similarities and Differences Symbolizing the Political Marketing Stream of Gus Ipul-Puti and Khofifah-Emil through FB

No	Political Stream	Characteristics Used						Abstraction
		Gus Ipul-Puti			Khofifah-Emil			
		Text	Photo	Video	Text	Photo	Video	
1	Abangan	<ol style="list-style-type: none"> Eemphasis on the figure of Sukarno as a nationalist figure Demonstrate the doctrine of the marhaen group by upholding the spirit of nationalism and caring for the fate of the poor Explain the approach to nationalist organizations and the presentation of the Pancasila ideology 	<ol style="list-style-type: none"> The use of attributes associated with nationalist groups, the most prominent aspect is the selection of red-white and red-black colors and hooded style that does not cover the entire head Shows an approach to the organization and related figures. 	<ol style="list-style-type: none"> Highlights the figure of Bung Karno Demonstrate an approach to small people The use of attributes that characterize these things such as choosing colors and style of dress 	<ol style="list-style-type: none"> Demonstrate the doctrine of marriages through the spirit of nationalism and the use of diction which shows partiality to the poor. 	<ol style="list-style-type: none"> Use of attributes that lead to nationalist groups 	<ol style="list-style-type: none"> Discussion that leads to the spirit of nationalism Use of dominant nationalist attributes 	<p>Difference: Gus Ipul-Puti has a variety of content in marketing nationalist identity. The variation lies in the description of the figure of Bung Karno, the approach to related organizations and other nationalist figures and the emphasis on red attributes. These components were not found in the Khofifah-Emil campaign. This pair is only limited to showing the spirit of nationalism, the approach to small groups and the attributes that are imposed also do not accentuate red as a nationalist symbol. Aside from color, if Gus Ipul-Puti emphasized the nationalist identity they were carrying out, they also went through a style of dress like Gus Ipul who wore a hat like Sukarno even though there was a load of santri in it and Puti who wore a headscarf without covering his head, Khofifah-Emil, through Emil's figure more often using shirts and jeans without caps.</p>

2	Santri	<p>1.Establishing good relations or mutual relations with the kiai, ibu nyai, lora, santri and alumni of the santri, always upholds the advice of the kiai</p> <p>2.Describe consolidation activities or embrace nahdliyin organizations</p> <p>3.Explain some activities that are leaning on the santri class</p>	<p>1.Use of dominant santri attributes such as dress style and color selection</p> <p>2.Showing central figures in the group of santri namely kiai, ibu nyai, lora (kiai children), santri and santri alumni</p> <p>3.Present in the activities carried out by the santri group</p> <p>4.Showing the approach to the nahdliyin organization</p>	<p>1.Uphold the figure of the kiai</p> <p>2.Contains declarations and support from lora and neng in Madura and santri alumni</p> <p>3.Following the activities carried out by the santri group</p>	<p>1.A description of the support of the clerics as well</p> <p>2.Support from one of the nahdliyin organizations namely Muslimat NU</p>	<p>3. Visualize the style of dressing</p> <p>4. Displays kiai and ibu nyai figures</p> <p>5. Showing the approach to the nahdliyin organization</p>	<p>Equation: Both carry out the doctrine of marhaenism which includes the spirit of nationalism and the approach to small groups</p>	<p>Difference:</p> <p>◆ In terms of content, just like the previous abangan stream, the pair Gus Ipul-Puti was more powerful in marketing the identity of the santri than Khoffah-Emil. Gus Ipul-Puti, both in terms of text, photos and videos, is able to present a variety of variations including following the activities of the santri and how their efforts uphold the kiai's figure and all his advice. Whereas Khoffah-Emil is not so. They only contain support from the kiai without showing the obedience and obedience of a santri and are limited to explaining the approach to the relevant organization. Activities such as istighatsah, prayer and tadarus together, etc. tend to be less explored. In addition, other santri elements such as alumni, lora, gus and neng were less involved. Khoffah-Emil only focuses on kiai figures and ibu nyai</p> <p>◆ In terms of the format of the post, it can be seen that in exploring this santri school, Khoffah-Emil tends to be</p>
---	--------	--	---	--	--	---	---	---

							less strong. This is because in the video post there is no santri identity that is highlighted. In contrast to Gus Ipul-Puti who posted the contents of santri in each format.	
							Equation: Both establish good relations with the kiai and ibu nyai, the nahdliyin organization and wear attributes that characterize this group	
3	Combination	<ol style="list-style-type: none"> Said the importance of the combination of Santri-Abangan Pairing figures from the two streams 	<ol style="list-style-type: none"> Using attributes that become the identities of the two groups Displays characters representing both groups. 	<ol style="list-style-type: none"> Linking the importance of education institution of santri group by planting the Pancasila ideology which had been emphasized by the nationalists Link characters from two streams Use of attributes that reflect the union of two identities Combining the dominant context in a particular identity with the use of attributes that lead to other identities 	-	<ol style="list-style-type: none"> Use of attributes that reflect two streams 	<ol style="list-style-type: none"> In one video frame there is a nationalist identity that is highlighted, but on the other hand there are the contents of the santri who are also trying to be shown 	Difference: In terms of content, Gus Ipul-Puti was able to affirm the alliance of Santri-Abangan they built through text, photos and videos. Starting from the explanation of the second figure of the stream, the mention of the word Santri-Abangan straightforwardly, to the insertion of nationalist content in the context of the identity of the santri and vice versa. On the other hand, Khofifah-Emil is still limited to the use of attributes and integrating nationalist and santri identities in one frame at a time. Two characteristics that can be observed from the Khofifah-Emil pair have also been carried out by Gus Ipul-Puti. So that it can be said, the pair is less varied in marketing the combination of stream As for the post format, Khofifah-Emil is also considered lacking in marketing this combination of streams. In fact, in text posts they tend to focus on each stream without trying to associate them. This is different from Gus Ipul-Puti who is consistently always maximal

in the political
marketing
stream.

Equation:
It has been
mentioned above
that Khoffah-
Emil and Gus
Ipul-Puti have the
same political
marketing
content in the
combination of
two streams,
which are both
using attributes
that characterize
it and displaying
or loading two
identities in one
post frame

Source: Processed by Researchers (2020)

Electoral Reaction to the Political Marketing of Each Candidate through FB

There are several points which can be concluded from the user's reaction to the political marketing stream through FB. First, the acquisition of the highest number of likes of each candidate is a combination of santri-abangan. But the difference between the two is the surrounding context. Gus Ipul-Puti is in a context that refers to the santri group, while Khoffah-Emil is in the nationalist realm. While the lowest acquisition of each candidate is dominated by a nationalist context. Second, the posts with the highest comments are both leading to the load of santri. And in the lowest position, FB posts emphasize on the nationalist context, the identity of the santri is only inserted through the use of attributes. Third, the acquisition of the largest number of shares of each candidate is occupied by the santri school while in the lowest position is also dominated by the nationalist context. The identity of the santri is only seen in the use of attributes.

Fourth, from a number of user comments indicating that political stream posts tend to have an impact on public views or perceptions. One comment was written by Lala Chyg, a member of PDI-P. He stated, Do not forget to choose Gus Ipul-Mbak Puti number 2 for the good ... *kabeh sedulur kabeh makmur* (Posted in 2018). The comment was replied by Dadali Arjuna who said, Yes boss but I got the cassette from gus ipul ... *seduluran prosperous* (Posted in 2018). On the other hand, Moh Syaffak revealed that he preferred

Gus Ipul personally and not PDI. So he decided to give support to Khofifah-Emil. I am happy with GUS IPUL. But I don't want PDI. Want to choose another ... (Posted in 2018).

The comment above shows that there is an important point, from Moh Syaffak's comments on Lala Chyg's statement indicating that political stream has an impact on voter preferences both at the party and candidate levels. That was proven when Moh Syaffak liked the figure of Gus Ipul from the nahdliyin circle. He boldly changed his choice because behind Gus Ipul there was a PDI-P as a secular nationalist party. Although in terms of candidates having the same stream as him, when the party carrying the abangan ideology, he changed to choosing Khofifah who was also a santri. Although behind Khofifah there were several nationalist parties, but not as strong as the identity pinned to PDI-P. For nationalist posts the impact can be seen during a visit to Sidoarjo. The content that was published was nationalist in nuance and the responses that appeared outline were also the same. Like Mila Savia who is domiciled in Malang, the East Java flagship product is ready to dominate the national market and even globally (Posted in 2018)

Before discussing the discussion between data findings and theory, it is necessary to first know some related concepts such as the conceptualization of political marketing, political marketing in terms of communication theory (because there are points of similarity between the two, namely both emphasize the process of exchanging messages and the existence of interaction.), political stream as content marketing and finally the electorate's reaction through interactive features like share, commen and like.

Conceptualization of Political Marketing

The use of the term marketing in the political field is inseparable from the interest to obtain or maintain power. Politicians who are involved in it will definitely try to 'sell' something both the product in the form of vision and mission, figures, achievements that have been achieved and all kinds of things in order to get the maximum support and participation. This process is not far from the marketing strategy. Therefore, Giasson, *et al* (2011) calls political

marketing an application of the concept of business marketing into the practice and study of politics and government. As the marketing concept of the business itself, there are also sellers and buyers in politics. Sellers here are politicians who have interests while buyers or in other words are the target market targeting the people. Giasson, *et al* (2011) emphasizes that tangible marketing such as policy platforms, parties and leader image, and organizational mindset are an integral part of overall management involving all party members in the process of getting product offerings to the election market .

From the brief explanation, it appears that some experts associate the concept of political marketing with interaction and political exchange (*political exchange and interaction*). Political marketing uses the conceptual foundation of marketing theory (Henneberg, 2013) which is fundamentally an 'exchange' theory derived from social exchange theory (Blau, 1964; Homans, 1961, in Henneberg 2013). According to Ormrod (2012), exchange of values is understood in the same way as in the commercial marketing literature, namely as an academic interaction between two actors who both have agency and enter into exchange freely. The exchanges and interactions that are key in the political marketing concept are actualized by Lees-Marshment (2005) into three orientations consisting of *product-oriented party* (POP), *sales-oriented party* (SOP), and *market-oriented party* (MOP). POP leads to a strategy in which *voters* will recognize normative values from party ideas and thus choose them (in Giasson, *et al* , 2011). It can be said , this strategy does not require too much communication with the market in offering its products. It is different from the SOP which is actually very active in developing communication strategies to promote the products they have. The parties incorporated here will communicate to see market conditions and then determine what strategies are suitable so they want to 'buy' their products. While MOP, a strategy that is actively involved in efforts to identify voters' priorities and concerns and combine them into the design of their product offerings

(Giasson, *et al*, 2011).

In addition to this categorization, Lees-Marshment, *et al* (2014) also formulated 4 areas of political marketing activity which as a whole led to the process of knowing market desires and then channeling those desires into a political product. The activities include *researching*, *strategizing*, *organizing* and *communicating*. *Researching* is the stage of market research and analysis, followed by *organizing* or internal party *organizing* processes. *Strategizing* the determination of marketing strategies whether *market-orientation* or *sales orientation* and finally, all stages will be realized in a process of communication, the use of conventional mass media and *e-marketing*, direct communication and others.

On the other hand, political marketing strategies are also formulated by Newman (1994). If Lees-Marshment sees the process from the side of a political party, then Newman studies it from the realm of candidates. The process of political marketing according to Lees-Marshment immediately entered the stage of measuring market needs, while Newman started by determining candidate figures first. Is the candidate carried only based on party leader policy (*party concept*), agreement of all members (*product concept*) or trying to meet market needs (*marketing concept*). When the candidate has been decided, just enter the marketing stage. Starting from market segmentation, assessing market needs, voter profiles to identify voter segments. Continues to the *candidate positioning*, a stage where candidates position themselves based on market conditions that have been analyzed first. After all the processes have been passed, the last step is to determine the communication strategy that includes the campaign platform, the media used, direct communication with the public or developing supporting organizations.

From the two models mentioned above, Ahmad & Popa (2014) tried to combine the two in the 2012 Jakarta Governor Election contestation. They made a separate model called *The Integrated Participatory Political Marketing* (IPPM). This model as a whole refers to the marketing strategy from

Newman starting from the market segmentation stage to the *candidate positioning*. It's just for the strategy formulation and implementation, if Newman calls 4P consisting of *products (campaign platform)*, *push marketing*, *pull marketing* and *polling*, then Ahmad & Popa only integrate *push marketing* and *pull marketing* to form a campaign platform. They do not involve polling in them. The IPPM model also sees that there are parallelism and complementary functions between the marketing of party politics and candidates, which generally occur during national and local elections (Ahmad & Popa, 2014). According to them, this parallelism is caused by a lack of voter partiality towards the party so that the political marketing of the candidates seems to be dominant over party political marketing (Ahmad & Popa, 2014). Due to the complementary function and parallelism between the two concepts of party-based Lees-Marshment and the Newman model that leads to candidates, Ahmad & Popa (2014) also assume that the candidate's position is a political actor on par with the party.

Based on the above concepts, the points that need to be underlined refer to the conceptual foundation of political marketing as a process of political exchange and interaction. In addition to the actors, the electoral position or what Ahmad (2017) calls one of the arenas of political markets becomes important here. Ahmad (2017) interpreted the electorate as the arena of choice where voters, as actors in this arena, were handled by parties and party leaders, activists and politicians during and between elections. It can also be articulated that when the context adopted is the presidential election, the so-called electorates are all Indonesians who have the right to vote. Likewise with the East Java regional election, the electoral arena in question includes all citizens who are domiciled in this province and are eligible to vote.

The process of political exchange has a component of sellers and buyers. In offering their products, sellers or candidates can determine their position whether holding *product-oriented*, *sales-oriented* or *market-*

oriented. On the other hand, the characteristics of the buyer or the arena of the targeted electorate cannot be ignored (Ahmad, 2017). Based on Ahmad's previous statement that the electorate is the arena of elections, then in the context of East Java Pilkada, social, economic aspects and no exception to local cultural issues must also be considered. One form of culture that has historically had a significant impact on election contestation is the political stream. This is where the research position will be explored more.

In the previous section, some political marketing research in Indonesia and globally focused more on political exchanges and interactions on the part of candidates, especially self-image that did not prioritize political stream. Personalization of politics where political figures or candidates become more important than political parties. Ideology and *cleavages* are no longer sufficient to explain voting behavior (Utomo, 2013). Meanwhile, in the global realm, the majority of research raised is about the effectiveness of the use of social media in the political marketing process. Some of the research that has been previously mentioned does not explore deeper the essence of political marketing exchanges and interactions in terms of audience response. So according to Ahmad (2012), political marketing as a new field of science, still tends to not get a strong place in the social group. Political marketing still tends to be seen in the practical dimension, namely the use of marketing methods and techniques in the political arena. Departing from these weaknesses, it can be said that this study seeks to provide novelty in terms of content and exposure holistically about the essence of exchange and interaction in a political marketing process.

Political Stream

In the process of exchanging and interacting, the content being exchanged can be in the form of political stream, a cultural aspect that can have an impact on voter preferences in Indonesia. It should be noted that political stream was first introduced by Clifford Geertz through trichotomy of *abangan*, *santri* and *priyayi*. He put forward the concept after conducting research

starting in May 1953 - September 1954 in Modjokuto, another name from Pare District, Kediri Regency. As an anthropologist, Geertz views religion as closely related to culture. The definition of religion according to Geertz was explained by Fitria (2012) that religion as a cultural system originated from a single sentence that defines religion as: 1) a system of symbols that aims; 2) building a strong mood and motivation, easily spread and not easily lost in a person by means of; 3) formulate a general conception of life; 4) attach the conception to factual emanations; 5) which in the end the conception will be seen as a unique reality.

What needs to be emphasized in this connection is that explicitly religion is a symbol system that can be the basis for one's actions in all aspects of life. This is relevant to the concept of the cultural system itself presented by Parsons that a cultural system is objective, a collection of symbols, signs, signals, words, and events that shape attitudes and guide actions (Fitria, 2012). Thus, *abangan*, *santri* and *priyayi* trichotomy proposed by Geertz are indeed rooted in the cultural system of society and are used in formulating the order of conception of life, including political issues. According to Nurjaman (2013), Geertz gave an explicit understanding of the political stream patterns as a form of translating *socio*- religious flaws namely: *santri-abangan-priyayi* into the form of political institutions in the form of Islamic and Nationalist political parties. The purpose of this statement can be seen from several existing political parties such as PPP and PKB (Islamic party), PDIP, Gerindra, Democrats, and others (nationalist parties).

Nurjaman (2013) also added that if a political party wants itself to be socially relevant, and thus can build its social base, the party must associate itself with existing cleavages. In general, cleavages can be sourced from religion, ethnicity, language, culture or geography. In Indonesia, unlike in the West, where class-based cleavage is not very influential, it is precisely the religious cleavage (stream) that is the most dominant compared to other cleavages. This is the reason why Geertz made the Javanese trichotomy based

on how each group applied the teachings they believed in. The following is a complete explanation regarding the three groups:

Abangan

Geertz (1960) mentions that the abangan group is indifferent to doctrine, but is interested in the details of ritual. Whereas in relation to the political aspect as the focus of this study, Geertz (1960) explained that in abangan groups a religious-political sect emerged in which "authentic" Javanese religious beliefs merged with nationalistic Marxism which enabled followers to support Communist political policies in Indonesia and to purifying abangan rituals even the remnants of Islam are still contained in it.

One organization or social group that can be a representation of the abangan group is Permai. This game can be more accurately referred to as a political party that represents three things, namely a strong purification cult, a set of esoteric beliefs (teachings that can only be understood by certain groups) and highly anti-Islamic social organizations which consist mainly of city workers, workers or unemployment, rural radicals who miskind plantation workers.

In the Permai organization, there are books that appear to consist of a mix of modern nationalist ideologies, especially those contained in Pancasila, "Five Points" (President's Monotheism, Nationalism, Humanism, Social Justice and Democracy), which is the official philosophical basis to bind the new Republic of Indonesia, traditional Javanese religious patterns such as calendar forecasts, food symbolism, and methods of spiritual discipline, plus new records of explicit moralism designed for Muslim moralism on the one hand and to link traditional farmer values such as rukun ("cooperation "In the construction of houses, irrigation, etc.) with Marxist ethics on the other side (Geertz, 1960)

Santri

According to Geertz (1960), despite their extraordinary interest in doctrine, Modjokuto Muslims have never seen their religion as a mere set of beliefs, as a kind of abstract philosophy, or even as a general system of

values. Instead, they always consider it institutionalized in several social groups: groups of santri in their environment, Indonesian Muslim groups or in other words they form "the Islamic world". When they talk about Islam, it is almost always in their minds, a social organization in which Islamic beliefs are the decisive element. For example charity organizations, women's clubs, village mosque committees, religious schools, local offices of religious bureaucracies, or political parties at local, regional or national levels. The gathering of santri in social groups or organizations or political parties with the same belief is described by Nurjaman (2013) that to santri in the 1950s, being obedient to religion meant striving for Islam to become the foundation or principle for political groupings, such as political parties and countries. Therefore, they established an Islamic political party, and in the 1950s they also tried to make Indonesia based on Islam.

Priyayi

Geertz (1960) acknowledges that both abangan and priyayi groups have similarities in their religious beliefs and practices. The practice of religion in question is realized through mystical practices which are interpreted as an intensive arrangement of life of thoughts and feelings, regulating the individual's spiritual resources for attacks on the highest enlightenment. The difference between the two is ethics and social class. Because priyayi groups come from bureaucrats, the ethics that are applied are more alus than the abangan groups who work as farmers or from the middle to lower classes.

Abangan trichotomy, santri and priyayi, invited some criticism from experts, one of them is Burhani (2017). He questioned the boundaries made so clearly between abangan, santri and priyayi. The Geertz concept seems to show no flexibility in the conditions of different societies. For example, an abangan seems anti-Islamic and does not practice religious law at all. In addition, a santri was assessed as those who only worked in Islamic boarding schools and came from traders, but did not consider that in other areas a santri might also be a priyayi. On the other hand, there are also criticisms that discuss the position between each group. Abangan and santri are viewed in terms of

religion, but for the priyayi group it is more discussed in terms of their profession. So in this context, each candidate can be said to be a priyaji. Each of them has a certain position or position in the government seat. And once again, this also confirms that not only the priyaji group is always identical to abangan. In fact, some of the candidates like Gus Ipul and Khofifah came from santri-based nahdliyin.

Political Marketing in Terms of Communication Theory

Political exchange and interaction as the essence of political marketing theory can be seen from the point of view of communication theory that has been developed by several experts, one of which is John Fiske (2012). This reflection is considered important to see the extent of the relevance of the use of political marketing theory in communication studies. The two concepts can be said to intersect with each other which together emphasizes the process of exchanging messages. Moreover, John Fiske tried to see on both sides, not only the communicator but also the communicant. This function is to see the extent to which political marketing efforts undertaken by each candidate are reviewed from the theory of communication and also how communication theory sees the reactions given by users to the message.

John Fiske (2012) formulates that basically the communication process as a process of exchanging messages between communicators and communicants can be reduced to two main schools. First, groups that see communication as a message transmission. This group focuses on how the sender and recipient, send and receive (message). This group is also very concerned with things like efficiency and accuracy. This view sees communication as a process by which a person influences the behavior or way of thinking of others. If the effects appear different or less than desired, these schools tend to talk with terms about communication failure, and see the various stages in the communication process to find out where the failure occurred.

The second school saw communication as a production and exchange of meanings. This group focuses on how messages, or texts, interact with

humans in order to produce meaning; that is, this view is very concerned about the role of the text in our culture. This group uses terms such as significance (meaning), and does not consider misunderstandings as important evidence of the failure of communication-misunderstandings may be the result of cultural differences between the sender and the recipient. The theory can be interpreted that the first school is more looking at the efforts of the sender or communicator in creating a message so that it can influence or affect a person's behavior or way of thinking.

Even Fiske (2012) emphasizes how these two schools interpret a message. The first school believes that intentionality is an important factor in determining something that is a message or not. He gave an example, pulling the earlobe would not be a message unless I deliberately did it as a signal that had been agreed with an auction participant. The intention of the sender can be stated clearly or not, consciously or unconsciously, but must be visible through analysis. Message is what was sent intentionally by the sender through any tool.

These two schools are considered important to be associated with the findings of research data. At the same time answering the relevance between political exchange and interaction in political marketing theory and communication theory is that political exchanges and interactions have not considered several aspects that can influence the process, how communicators convey their messages and how communicants capture or respond to those messages. The disturbances referred to by Fiske (2012) as cultural factors that can influence one's thinking about a message have not been explored in political marketing theory. Therefore, the researcher intends to make the process of exchange and political interaction referred to in political marketing theory as a preliminary perspective and communication theory from John Fiske (2012) as material to examine more deeply the findings of the data obtained.

Electoral Reaction through Facebook

Several concepts related to this research have been mentioned. Apart

from raising the political stream as the core of the problem, what makes it interesting here is to bring the context to social media, especially Facebook. One of the media with the highest number of users in Indonesia has a strong role in triggering public reactions during the general election. The reaction was explained by Bene (2016) through the process of interaction that occurred on Facebook. Facebook allows each individual to create a network with closest friends, who then can reach other friends, and so on. In this ongoing communication process, it is open widely to anyone in it, whether close friends or not, giving a reaction to each post. The reaction in question can be realized through 3 features, namely like, share and comment. By relying on these 3 features, other users (not individuals who upload posts) can spread to their friends via their own Facebook account.

It can be said that the main function of the user's reaction is to find out what kind of posts are attracting their attention to finally lead to motivation to spread that information to other users. Therefore, if in the level of content analysis of the contents of each candidate's post, researching the user's reaction becomes something important. Because at least through this reaction, it can be seen that the contents of the post that are considered important and when the post is shared massively is likely to affect user preferences.

The concept of each feature, namely likes is the simplest form of reaction on Facebook, because it only requires one click. It is not known what "like" exactly means, but it may not be far from the truth if people understand it as a type of agreement with the contents of posts (Bene, 2016). He also revealed that basically this is a one-off interaction mode and does not open up new channels of interaction but broadens existing ones by expanding visibility and reactability to non-followers (Bene, 2016).

As for the comment feature, according to Bene (2016), below posts, users can express their opinions about content or author posts and interact with other users. These comments can be seen by network members who comment on their News Feed or Ticker, which makes the original posts visible

and 'reactive' for non-followers. Comments do not open new interaction channels outside the original post, but do so in the post: comments below the post can be commented on and 'liked' by the user they have reached, including the user's own friends. From the aspect of information dissemination, the main function of the comment function is that it can happen repeatedly. Every single comment increases visibility, so intense debate between users under posts can be useful in terms of information dissemination.

Finally, for the share feature, Bene (2016) states that content sharing opens a new channel of interaction for posts on the user's own network. The content shared can be liked, commented on and shared by new viewers in 'new space'. In addition, by separating posts from their original context, which cannot be seen by a wide and unknown audience, network members can express their opinions in a more familiar context when interacting with shared posts, because this is only seen by themselves and their network. Sharing is an important tool for virality. By opening up new channels of interaction, messages can reach not only the private networks of users who directly react to posts, but may also have the potential to gain a much wider scope through chain sharing. The concept of user reactions through 3 features in Facebook will be used by researchers in assessing a post. When for example the post has a lot of likes compared to comments and shares, what does it mean. And so on.

Relationship between Concepts and Data Findings

The Exchange Process and Political Marketing Interaction of Stream in terms of Candidates

Political Marketing Orientation

Based on the conceptualization of political marketing which is based on the exchange and interaction process, it can be seen first from the point of view of the candidate's efforts, especially regarding political marketing orientation. Political marketing orientation here is a form of placing the marketing position of the communicator, whether based on product-oriented (maintaining all components that exist in the candidate himself), sales-oriented (candidate figures and political policies are not influenced by the market, only how to sell

them or market it using market research) or market-oriented (the image of the candidate and the marketing process carried out all refers to the market). The results obtained are overall each candidate has similarities, namely both implementing product-oriented, sales-oriented and market-oriented. First, market-oriented can be seen through the alliances built by them namely santri-nationalis. It could be that they choose a partner who has a family or has the same identity. But because of considering the typology of the East Java community which consists of these two variants, it indirectly requires them to choose a different stream in order to embrace all of them.

When taken to a smaller scope based on the categorization of local political culture, there are several trends that show that each candidate applies product-oriented. This is clearly seen when visiting the local culture which is dominant in certain schools. Mataraman and Madura for example. In both arenas, both Gus Ipul-Puti and Khofifah-Emil were considered to maintain the alliance they built. Not when they are in the dominant abangan area, they do not approach the santri group. Vice versa.

On the other hand, the Khofifah-Emil pair also showed the same results. During the campaign in several Mataraman areas, Emil focused on the Magetan area while Khofifah visited Nganjuk and Blitar. When there was a discussion in Magetan that was raised more towards nationalists, but there were inserts on the contents of the students through the use of peci and prayer activities in congregation with the local residents. The contents of the santri were emphasized again by Khofifah who established a relationship with several kiai there. And finally, when in Blitar, Khofifah raised the issue of nationalism by embracing small communities. He will improve infrastructure in traditional markets to improve their standard of living. In his visit, Khofifah maintained her santri identity through the use of a more closed veil.

Although product-oriented seems to stand out, if it is taken to a smaller scope, especially from the personal candidates themselves, there is a sales-oriented impression that is also actualized here. Puti as a nationalist does not

only approach the same group. He also actively visited Islamic boarding schools and participated in activities carried out by the majority of santri such as the pilgrimage of the grave, tadarus, prayer together and all kinds. But in most of these activities, he did not leave his identity while wearing a red veil and did not cover his entire head. There is also the use of diction which states the importance of national values and the ideology of the Pancasila when he visits Islamic boarding schools. Likewise with Gus Ipul. As a santri, he also visited the GMNI organization. There he looked like Soekarno, but with his cap and koko shirt he still emphasized his identity. Switch to the Khofifah-Emil pair. Khofifah with his santri identity did not always approach the clerics. He also actively discussed general issues that showed the spirit of nationalism in them. Emil too. Departing from a nationalist, in several posts he also tried to approach the santri group by performing congregational prayers and wearing caps. But he did not replace the damage with a sarong.

From these examples, it indicates that the approach to groups that have different s is one form of marketing to introduce candidate identities. Not changing the identity based on the wishes of this group. Stromback, et al (2012) states that when political parties implement sales-oriented, they believe in their ideas and policies, but they are aware that the product must be sold to the public; without having to change behavior or policies to adjust to the wishes of the community, but try to make them want or get to know the party's offer itself.

Actualization of the Political Concept of Stream Applied by the Candidates

For abangan stream, the majority findings indicate that the politics of abangan stream are not necessarily straightforwardly mentioned by the term. But it is disguised through the use of the nationalist word. This refers to the statement of Geertz (1983), different from the general tendency of the santri, abangan and priyayi to be the main supporters of nationalist, secular and communist parties (in Mulkhan & Singh, 2011). The tendency of the abangan

group's attitude closer to the nationalist group resulted in this group often using the attributes or characteristics that lead to it. This was done by the couple Gus Ipul-Puti through strengthening the figure of Soekarno as Chairman of the PNI (Indonesian Nationalist Party) and several other nationalist figures such as Megawati (the son of Soekarno), using red nuanced attributes as the dominant color and approach to related organizations. Not only the attributes and approaches taken, nationalist definitions or concepts themselves are also interpreted by Anderdson (1983) that nationalism serves to connect citizens with broad national stories and birth myths. In the case of Indonesia, the birth myth focuses on the struggle against Dutch colonialism. Therefore, contemporary nationalism, at the beginning of its period, focused on the terminology and symbols of anti-colonial struggle (Aspinall, 2015). Therefore, in a text statement, Gus Ipul-Puti also included or showed their nationalist attitude several times in the form of strengthening local products or favoring the fate of the poor.

On the other hand, in contrast to Gus Ipul-Puti whose symbolization of the stream is more varied, Khofifah-Emil actually shows the majority of this attitude through text statements. Many of them focus on strengthening local products and taking part in the fate of the poor. For attributes and approaches to related parties, this pair does not reveal the dominant colors in the abangan sect or cooperates with nationalist figures. In addition to the abangan sect, Gus Ipul-Puti and Khofifah-Emil also actualize the political concept of the santri school. Conceptually, Geertz (1960) did provide reinforcement to the group of santri as a more religious group. Uphold the religious doctrine and not be indifferent like the abangan group. Therefore, Geertz (1960) said that among the several groups included in the santri group, Nahdlatul Ulama was one of them, which in the East Java Pilkada contestation became a strong base for voting polarization. Nahdlatul Ulama (NU) is synonymous with important figures such as kiai and ibu nyai, educational institutions in the form of Islamic boarding schools, madrasa education to the use of green as the main color. In

its actualization, the two candidates used almost the same methods, together approaching the kiai and other santri elements and wearing typical clothing of this group. But for the activities and use of colors, Gus Ipul-Puti is considered more prominent than Khofifah-Emil. They straightforwardly showed a combination of green and white while Khofifah-Emil was only white. Not only that, the activities of the santri group carried out by Gus Ipul-Puti were also often explored unlike Khofifah-Emil who showed less similar activities.

Data Findings Viewed from Their Relation to Communication Theory

Based on the findings of political marketing data about political stream carried out by the candidates, how they communicate the symbols of abangan, santri and priyayi through social media can be viewed from John Fiske's (2012) communication theory, especially the first point of view. According to this point of view, Gus Ipul-Puti and Khofifah-Emil made a political message intentionally with a number of symbols that enabled the public to know about it. For the contents of the santri for example. The characteristics that were raised were quite identical to the santri santri group, for example, the use of attributes such as sarongs, koko and peci clothes, skirts, more closed veils, related activities, approaches to to the kiai and other santri elements. As for nationalist content, the characteristics raised can also be captured by the public, such as including the PDI-P party symbols as a secular nationalist party and showing an attitude of nationalism by recognizing the superiority of local products. Even so, using the term Fiske (2012), Gus Ipul-Puti provides a stronger message redundancy. The use of symbols or artifacts either leads to a more varied and straightforward making this couple more able to be caught in the stream message in the political marketing process.

The Exchange Process and Political Marketing Interaction of Political Stream in Terms of Audience Response

On the other hand, for the audience response, the relevant theory in seeing the data findings is the second school of Fiske (2012), where there are those who can capture the political content of the stream and some who do

not. With them being able to capture the content, indirectly political stream can have an impact on public perceptions or views and even preferences in choosing. The difference in catching the characteristics of the political stream according to the second school of thought from Fiske (2012) could be due to cultural factors which include a lack of experience or individual references to it.

Suggestions for Future Research

This research is still limited to seeing public reactions through interactive features on FB. And not yet optimally conducted interviews directly related to the relationship between the reactions given and real support through voting. Is it when one user supports a particular partner by giving likes, positive comments or even sharing a post to another user implicating the voting of the couple.

In addition, more in-depth studies are needed to find out the reasons for the candidates and their success teams about using political patterns of stream and placement. This research still sees political marketing based on political stream on its surface only or which appears in their posts. From these shortcomings, further research is needed on this matter as an effort to find out the dynamics and the extent of the political stream movements among actors and electorates. Because it must be acknowledged that the issue is one of the crucial aspects in general election contestation that can have a significant impact on voter preferences.

CONCLUSION

The process of exchange and interaction that occurs in political marketing gives an interesting picture of several things, first, positioning made by each candidate is more dominant in product-oriented. Although there are efforts to adjust to market needs in forming political alliances and implementing sales-oriented, data findings indicate that each figure retains its identity. Secondly, it relates to the political stream which is only examined at the ideological level and issues that arise in the supporting mass base without

knowing how to represent all three when taken in the context of elections, the results of the study show that Gus Ipul-Puti was more dominant in terms of variations in the pattern and format of uploaded posts. Each candidate also tries to provide characteristics of stream that are known to the public so that they can increase certainty (redundancy) in the process of sending messages. With some of these characteristics, the stream of charges conveyed through FB tends to be captured by the public, some who do not. The public who can catch it will give relevant comments and vice versa. The reasons behind this difference can be based on cultural factors which include, among other things, a lack of reference or user experience regarding the characteristics of political stream.

BIBLIOGRAPHY

- Ahmad, N. (2012). *Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik: Sejarah, Perspektif dan Perkembangan Riset*. Yogyakarta: Pustaka Zaman
- Ahmad, N. (2017). *Marketisation and Professionalisation of Campaigning of Political Parties in the New Democracy: An Investigation of the Structural Conditions and Factors That Determined the Development of Marketization and Professionalization of Campaigning of the Indonesian Political Parties in the Post-Soeharto New Order*. Inggris: Bournemouth University
- Ahmad, N. & Popa, I. L. (2014). The Social Media Usage and the Transformation of Political Marketing and Campaigning of the Emerging Democracy in Indonesia (Case Study of the 2012 Gubernatorial Election of the Special Region of the Capital City Jakarta). Dalam Patrut & Patrut (Eds.). *Social Media in Politics (Case Studies on the Political Power of Social Media)*. (pp. 97-125). Switzerland: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-04666-2
- Bene, M. (2016). Go Viral on the Facebook! Interactions Between Candidates and Followers on Facebook during the Hungarian General Election Campaign of 2014. *Journal Information, Communication & Society*. DOI:

10.1080/1369118X.2016.1198411

Burhani, A. N. (2017). Geertz's Trichotomy of Abangan, Santri, and Priyayi Controversy and Continuity. *Journal of Indonesian Islam*. 11(2). 329-350. DOI: 10.15642/JIIS.2017.11.2.329-350

Elo, S. & Kyngas, H. (2007). The Qualitative Content Analysis Process. *Journal of Advanced Nursing*. 62 (1). 107-115. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Fiske, J. (2012). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Fitria, V. (2012). Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Budaya. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. 7 (1). 57-64. Retrieved from <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=113338&val=518>

Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. USA: The University of Chicago Press

Giasson, T., et al. (2011). Introducing Political Marketing. In Marland, Alex, et al (Eds.). *Political Marketing in Canada*. (pp. 3-21). Toronto: UBC Press

Henneberg, S. C. & Ormrod, R.P. (2013). The Triadic Interaction Model of Political Marketing Exchange. *Marketing Theory*. 13 (1). 87-103. DOI: 10.1177/1470593112467269

Lappas, G., et al. (2014). *Online Political Marketing: The Use of Facebook in the 2010 Greek Municipal Elections*. DOI: 10.4018/978-1-4666-6062-5.ch006. Dalam Solo, A. M. G. *Political Campaigning in the Information Age*. 110-127. USA: IGI Global

Lees-Marshment, J., et al. (2014). Marketing US Politics. Dalam Lees-Marshment, J., Conley, B. M., & Cosgrove, K. (Eds.). *Political Marketing in the United States*. 1-26. New York: Routledge.

Leni, N. (2012). Demokrasi dan Budaya Politik Lokal di Jawa Timur Menurut R. Zuhro, dkk. *Jurnal TAPIS*. 8 (1). 20-39. Retrieved from

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/1542/1282>

Liddle, R. W. & Mujani, S. (2007). Leadership, Party and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*. 40 (7). 832-857. DOI: 10.1177/0010414006292113.

Newman, B. I. (1994). *The Marketing of The President: Political Marketing as Campaign Strategy*. Los Angeles: SAGE Publications Ltd

Nurjaman, A. (2013). *Ketidakstabilan Electoral dan Kehancuran Politik Aliran*. Malang: UMM Press

Ormrod, R. P. (2012). Defining Political Marketing. *Management Working Papers, No. 2012-02*. Aarhus: Institut for Okonomi, Aarhus Universitet.

Ormrod, R. P., et al. (2013). *Political Marketing Theory and Concepts*. Los Angeles: SAGE

Panggabean, E. S. (2017). *Religion, Socio-Economic Status and Voter Behavior: Evidence from a Survey Experiment in Jakarta*. Belanda: Institute of Social Studies

Pranawa, S. & Humsona, R. (2017). Social Media in Political Marketing: A Study of Teman Ahok. *The International Conference on Design and Technology, KnE Social Sciences*. 236-243. DOI: 10.18502/kss.v2i4.892

Saka, R. (2017, 29 November). *Pilkada Jatim Jadi Indikator Pemilu dan Pilpres 2019*. Retrieved from <https://kumparan.com/@kumparannews/pilkada-jatim-jadi-indikator-pemilu-dan-pilpres-2019>

Stromback, J., et al. (2012). Political Party Market Orientation in a Global Perspective. Dalam Lees-Marshment, J. (Ed.). *Routledge Handbook of Political Marketing*. 79-92. Oxon: Routledge

Utomo, W. P. (2013). Menimbang Media Sosial dalam AMrketing Politik di

Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 17 (1). 67-84

Wardani, A. S. (2017, 14 Agustus). *Facebook Kini Punya 115 Juta Pengguna Aktif di Indonesia*. Retrieved from <https://m.liputan6.com/amp/3057940/facebook-kini-punya-115-juta-pengguna-aktif-di-indonesia>

Faktor-Faktor Internal Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2019

Internal Factors of the Winning of the Partai Keadilan Sejahtera in the Election of Depok City Parliament Members in 2019

Muhammad Nuh Ismanu^{1*}, Chusnul Mar'iyah²

¹Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Gedung A Kampus UI Kota Depok, 16424, Indonesia

²Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Gedung A Kampus UI Kota Depok, 16424, Indonesia

*corresponding author E-mail : ismanu_nunu@yahoo.com

Diterima: 9 September 2020; Direvisi: tgl 21 Oktober 2020; Disetujui: tgl 19 November 2020

ABSTRAK

Sebagai suatu sistem politik di alam demokrasi keberadaan partai politik merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik mampu mengantarkan warga negara untuk duduk di kursi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Dengan menggunakan teori strategi politik serta metode penelitian kualitatif, penelitian ini ingin melihat bagaimana faktor internal berpengaruh terhadap kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pemilihan DPRD Kota Depok. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan PKS dalam Pemilu 2019, khususnya pada pemilihan DPRD Kota Depok tidak lepas dari adanya pengaruh internal partai, yaitu ideologi Islam konservatif serta peran kader dan pengurus PKS Kota Depok. Ideologi Islam konservatif yang kurang diminati di Indonesia pasca reformasi kini mulai diminati seiring dengan menguatnya isu agama jelang pemilu serentak tahun 2019. Selain itu, faktor kader serta pengurus PKS Kota Depok juga menjadi salah satu kunci kemenangan PKS dalam pemilihan DPRD Kota Depok tahun 2019. Hal ini terlihat dari persiapan yang matang jelang pemilu.

Kata Kunci: Ideologi Islam konservatif, partai Islam, partai keadilan sejahtera, pemilihan DPRD kota Depok, strategi partai politik

ABSTRACT

As a political system in a democracy, the existence of political parties is a necessity in modern democratic political life. Political parties are able to lead citizens to sit in government, both legislative and executive. By using political strategy theory and qualitative research methods, this study wants to see how internal factors influence the victory of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in the election of the Depok City Parliament. The results of this study indicate that

the success of PKS in the 2019 election, especially in the Depok City parliament election, cannot be separated from the internal influence of the party, namely conservative Islamic ideology and the role of PKS cadres and administrators in Depok City. The conservative Islamic ideology that is less desirable in post-reform Indonesia is now starting to be in demand along with the strengthening of religious issues ahead of the 2019 simultaneous elections. In addition, the factor of cadres and PKS officials in Depok City is also one of the keys to PKS 'victory in the Depok City parliament election in 2019. This can be seen from the careful preparation ahead of the election.

Keywords: *Conservative Islamic ideology, Islamic party, partai keadilan sejahtera, Depok city parliament election, political party strategy*

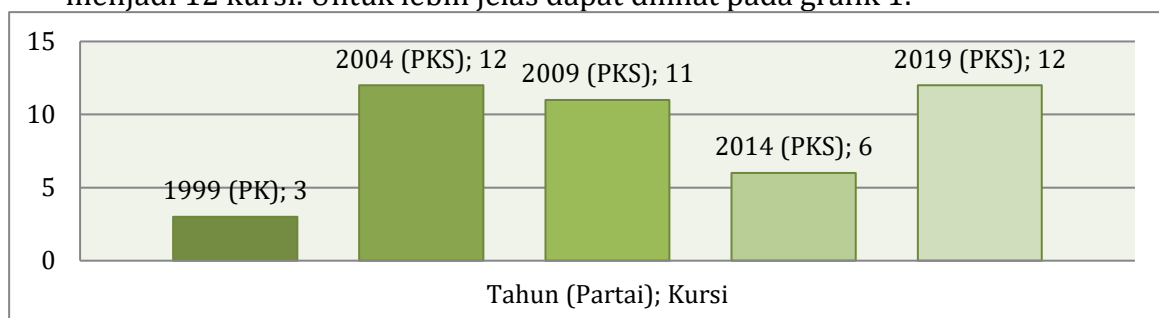
PENDAHULUAN

Sebagai suatu sistem politik di alam demokrasi keberadaan partai politik merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik di dalam negara demokrasi merupakan sebuah sarana bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Salah satu fungsi penting dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik (Budiardjo, 2009, hal. 409). Rekrutmen partai politik menjadi fungsi utama partai dalam rangka menjalankan perannya sebagai penghubung antara warga negara dengan negara dalam bingkai representasi politik. Melalui rekrutmen politik, partai politik mampu mengantarkan warga negara untuk duduk di kursi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif (Siavelis & Morgenstern, 2008, hal. 5-6). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebuah partai politik dapat memenangkan pemilu dan mengantarkan kadernya untuk meraih kekuasaan.

Telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang melihat bagaimana partai politik dalam meraih kekuasaan atau memenangkan pemilu, khususnya di Indonesia. Seperti penelitian dari Debora Sanur Lindawati yang berjudul Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014. Dalam penelitiannya Ia mengatakan bahwa dalam strategi pemenangan pemilu, partai politik perlu mengorganisir kegiatan kampanye secara kolektif. Secara internal, partai juga harus mengontrol belanja kampanye yang dikeluarkan

caleg maupun partai. Selain itu, partai juga harus menyusun pedoman etika berikut penegakannya berupa sanksi, jika kompetisi internal para caleg tidak sehat dan merusak (Lindawati, 2013, hal. 308-309).

Mengenai faktor kemenangan partai politik di tingkat lokal, terdapat penelitian dari Jonas Ricardo F. Sobalely yang berjudul *Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok*. Dalam riset ini dijelaskan bahwa faktor-faktor penyebab kemenangan PDI-P pada Pemilu 2014 adalah ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi: mobilitas partai dengan isu populisme, identifikasi partai, dan sentimen politik. Faktor eksternal meliputi: peran pengurus kader PDI-P Kota Depok, strategi PDI-P Kota Depok, dan Tim Sukses PDI-P Kota Depok (Sobalely, 2015, hal. 112-119). Berdasarkan penelitian ini, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut dengan menggunakan wilayah penelitian yang sama yaitu Depok, namun objek penelitian yang berbeda yaitu PKS. Landasan utama mengapa penulis mengambil objek penelitian PKS karena pada pemilihan DPRD Kota Depok tahun 2019 tidak lagi dimenangkan oleh PDI-P dan telah berganti menjadi PKS. Berdasarkan data hasil pemilu (KPU Kota Depok, 2019), perolehan suara PKS dalam pemilu legislatif Kota Depok meningkat secara signifikan menjadi 211.949 suara (20,81%) sehingga jumlah kursi PKS meningkat dua kali lipat menjadi 12 kursi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik 1.



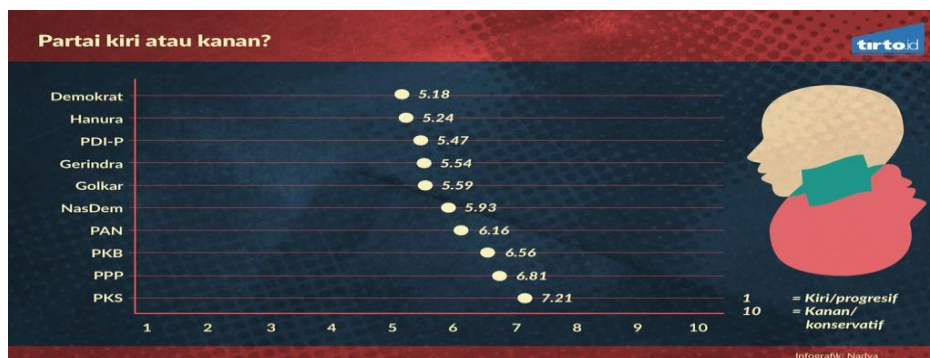
Grafik 1. Perolehan Kursi Partai Keadilan (PK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Sumber: Telah diolah kembali dari data KPU Kota Depok, Hasil Pileg Kota Depok Tahun 1999-2019.

Selain objek penelitian, penelitian ini juga memiliki perbedaan, yaitu lebih terfokus kepada faktor internal PKS. Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat dua variabel utama dalam membahas faktor internal PKS jika dikaitkan dengan kemenangan pada pemilihan DPRD Kota Depok, yaitu faktor ideologi dan program partai serta peran kader dan pengurus PKS Kota Depok.

Berdasarkan data di atas, perolehan suara PKS di kota Depok mengalami fluktuasi. Pada saat masih menjadi Partai Keadilan (PK) di awal masa reformasi, PKS hanya meraih 3 kursi di DPRD Kota Depok. Pada tahun 2004, naik menjadi 12 kursi setelah berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada tahun 2009 hingga tahun 2014, PKS mengalami kemerosotan suara menjadi 11 kursi dan 6 kursi. Barulah di Pemilu 2019, PKS mengalami kenaikan jumlah kursi yang signifikan menjadi 12 kursi.

Berbeda dengan penelitian dari Sobalely (2015) yang melihat kemenangan PDI-P secara lebih luas, penelitian ini hanya melihat faktor internal PKS. Menurut pendapat penulis, faktor internal PKS merupakan bagian terpenting dalam kemenangan PKS, yaitu pengaruh ideologi Islam konservatif dan peran dari kader dan pengurus PKS. Melansir dari hasil riset Lembaga Survei Indonesia bekerja sama dengan Australian National University (ANU) pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018, dijelaskan bahwa dalam PKS masuk dalam spektrum partai konservatif. Selain itu, PKS juga juga dinilai sebagai partai kedua yang paling memberikan dukungan terhadap peran Islam di dalam politik (Aspinall, Muhtadi, Fossati, & Warburton, 2018). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Spektrum Partai Politik di Indonesia.

Sumber: Aspinall dkk, 2018 dalam Tirto.id.



Gambar 2. Pandangan Partai Politik dalam Memberikan Dukungan Terhadap Peran Islam dalam Politik.

Sumber: Aspinall dkk, 2018 dalam Tirto.id.

Pembahasan mengenai Partai Islam juga dirasa menjadi perdebatan menarik dalam politik Indonesia. Sebagai salah satu elemen penting dalam pembelahan sosial, agama dipercaya bisa mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih partai politik. Lipset dan Rokkan (1967) dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat korelasi signifikan antara afiliasi keagamaan dengan dukungan partai-partai konvensional di Eropa. Selain itu, ada penelitian dari Samuel Barnes (1974) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan agama dengan perilaku pemilih di Italia (Muhtadi, 2012, hal. 199). Bagaimana pengaruh agama bagi perilaku pemilih di Indonesia? Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka variabel agama yang diulas dalam tulisan ini adalah pengaruh ideologi Islam.

Untuk membahas hal tersebut, maka penting untuk melihat mengenai politik aliran di Indonesia. Clifford Geertz dalam karyanya yang berjudul *The Religion of Java* memperkenalkan politik aliran di Indonesia. Menurut Geertz, kelompok abangan yang ia identifikasikan sebagai Muslim yang kurang taat cenderung memilih partai nasionalis atau sekuler atau komunis. Sedangkan kelompok santri dipercaya akan memilih Partai Islam (Geertz, 1976, hal. 370-373). Walaupun banyak penelitian yang mengkritik politik aliran Geertz, namun teori politik aliran ini dapat menjelaskan secara kompleks perilaku pemilih islam di era 1950an.

Lalu bagaimana perilaku pemilih atau politik aliran pasca Reformasi? Secara faktual perolehan suara Partai Islam pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pemilu 1955. Hal ini disebabkan karena kurang relevannya penjelasan mengenai politik aliran di Indonesia. Padahal, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (2003), Mershon Ohio State University dan UI (1999) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (2001 dan 2002) secara sosiologis telah terjadi peningkatan religiusitas di masyarakat namun tidak berdampak terhadap peningkatan suara Partai Islam (Muhtadi, 2012, hal. 201-202). Hal ini membuktikan adanya pergeseran pilihan dari pemilih Muslim di Indonesia, dari memilih Partai Islam menjadi memilih partai nasionalis. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Sunny Tanuwidjaja yang mengatakan bahwa pemilih Muslim pasca Reformasi cenderung memilih partai nasionalis karena partai nasionalis juga mengakomodir nilai-nilai religiusitas (Tanuwidjaja, 2010, hal. 29-44).

Pada Pemilu 2019, suara Partai Islam cenderung mengalami kenaikan. Jika kita mengelompokkan PAN, PKB, PKS dan PPP, hanya PAN yang mengalami penurunan jumlah kursi yaitu turun 5 kursi, sedangkan PKS naik 10 kursi dan PKB naik 11 kursi, lalu PPP yang tetap dengan 19 kursi. Kenaikan PKB diasumsikan karena keterpilihan KH. Ma'ruf Amin yang terpilih sebagai wakil presiden sehingga berdampak positif secara elektoral bagi partai pengusung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan PKS sebagai objek penelitian. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI tahun 2014 dan 2019.

Partai Politik	Jumlah Kursi	
	2014	2019
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109	128
Partai Golongan Karya	91	85
Partai Gerakan Indonesia Raya	73	78
Partai Demokrat	61	54
Partai Kebangkitan Bangsa	47	58
Partai Amanat Nasional	49	44
Partai Keadilan Sejahtera	40	50
Partai NasDem	35	59
Partai Persatuan Pembangunan	19	19
Partai Hati Nurani Rakyat	16	0

Sumber: Telah diolah kembali dari data KPU Kota Depok.

Penulis tertarik untuk menjadikan PKS sebagai objek penelitian. Sebab, seiring turunnya tren negatif Partai Islam pasca Reformasi, PKS justru berhasil meningkatkan perolehan jumlah kursi. Bahkan, di Kota Depok kenaikan tersebut mencapai 2 kali lipat. Dalam membahas Partai Islam maka ideologi menjadi faktor terpenting untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis memilih untuk melihat faktor ideologi dan peran kader serta pengurus yang termasuk dalam faktor internal kemenangan PKS dalam pemilihan anggota DPRD Kota Depok tahun 2019. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan: Bagaimana faktor internal dapat mempengaruhi kemenangan PKS dalam pemilihan DPRD Kota Depok?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang menginterpretasikan data-data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh (Creswell, 2016, hal. iii & 19). Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh data untuk memperdalam wawasan mengenai faktor internal kemenangan PKS dalam pemilihan DPRD Kota Depok tahun 2019.

Menurut W. Lawrence Neuman dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan teori dan data. Data dan teori merupakan sebuah kesatuan dimana data yang diperoleh diliteraturkan, diinventarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu berupa literatur-literatur terkait penelitian. Literatur bisa didapat dari media cetak, media online, jurnal, penelitian-penelitian lainnya, website resmi partai politik ataupun website organisasi-organisasi nasional.

Setelah data tersebut didapat, lalu data tersebut diolah dan dianalisis (Neuman, 2014, hal. 20-22).

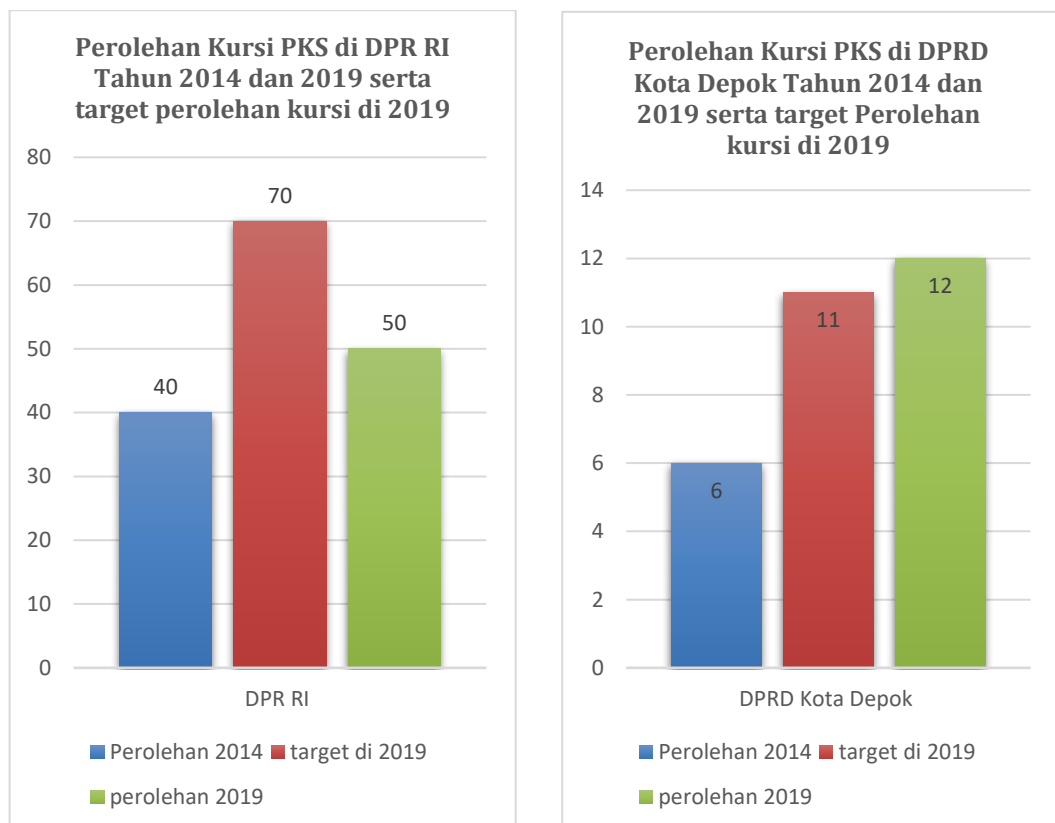
Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri atas empat tahap. *Pertama*, data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung dipersiapkan dan disusun secara lengkap dalam satu berkas. *Kedua*, data yang telah disusun dalam satu berkas tersebut selanjutnya dianalisa dan dilakukan pencermatan sehingga dapat diketahui poin-poin utamanya. *Ketiga*, poin-poin utama yang telah didapatkan tersebut dikelompokkan sesuai dengan topik-topik pembahasan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan di dalamnya namun pengelompokkan tersebut tidak membatasi relasi antara satu topik dengan topik lainnya. *Keempat*, data-data yang telah dikelompokkan disusun, dianalisis dan diinterpretasi sehingga dapat menjadi informasi yang memadai untuk memberikan kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang ada pada setiap topik pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi politik adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang dipahaminya mampu untuk memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama (Sobalely, 2015, hal. 20). Menurut Peter Schroder dalam merumuskan perencanaan strategi politik terdapat beberapa tahapan perencanaan yang harus dilalui, di antaranya merumuskan tugas, yaitu tujuan yang hendak dicapai, lalu menganalisa situasi, dan memetakan target konstituen. Setelah tahapan ini selesai, maka partai politik dapat membuat pesan yang hendak disampaikan (Schroder, 2010, hal. 107-118).

Berdasarkan teori ini, penulis mencoba untuk melihat tahapan strategi politik PKS di Pemilu 2019. Tahapan pertama adalah merumuskan tugas, yaitu tujuan yang hendak dicapai. Dalam skala nasional, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Mustafa Kamal mengatakan bahwa saat ini PKS dianggap sebagai partai papan tengah. Oleh karena itu, pada Pemilu tahun 2019 ia berharap PKS naik

tingkat menjadi partai papan atas. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa secara angka PKS menargetkan untung mendapatkan 12% suara nasional atau sebesar 70 hingga 80 kursi di DPR RI (Ramadhan, 2017). Kemudian untuk di DPRD Kota Depok, Ketua DPD PKS Kota Depok Hafidz Nasir mengungkapkan target PKS adalah meraih minimal 11 kursi DPRD Kota Depok (Harian Sederhana, 2018).



Grafik 2. Perolehan Kursi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun 2014 dan 2019 serta target kursi di pemilu 2019 .
Sumber: Telah diolah kembali dari data KPU Kota Depok.

Tahapan kedua dalam teori strategi politik adalah menganalisa situasi. Pemilu 2019 adalah pemilu pertama kali dalam sejarah Indonesia yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan presiden dan legislatif. Untuk itu, penentuan kebijakan partai mendukung presiden menjadi faktor penting. Sebab pemilih akan memilih partai yang mendukung calon presiden yang mereka pilih. Hal ini seperti teori ekor jas atau teori *coattail effect*, yaitu

terdapat hubungan antara popularitas calon presiden dengan partai pengusungnya. Artinya, seorang calon presiden atau presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon (Hanan, 2018).

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera yang menyebutkan bahwa kenaikan perolehan suara PKS tidak terlepas dari konsistensi partai mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Alhasil, pihaknya mendapat berkah elektoral. Lebih lanjut pengamat Politik dari Universitas Islam Nasional (UIN) Jakarta Adi Prayitno mengatakan pemilih Islam di kubu Prabowo-Sandi cenderung memilih PKS ketimbang partai Koalisi Indonesia Adil Makmur (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) lainnya. Sebab, PKS dinilai lebih tegas berposisi ketimbang PAN dan Partai Demokrat (CNN Indonesia, 2019).

PKS juga diuntungkan dengan isu agama yang menguat pasca Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan adanya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Khairul Fahmi, melihat isu agama masih menjadi faktor andalan yang berpotensi memicu konflik di Pemilu 2019 (Rahma, 2019). Bahkan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyerang dengan melontarkan sejumlah isu yang kerap berseberangan dengan PKS di era kampanye Pemilu 2019, seperti pelarangan poligami dan anti-Perda Syariah justru menjadi keuntungan sendiri bagi PKS. Keingintahuan masyarakat menjadi tumbuh terkait polemik antara kedua partai tersebut. Hal itu membuat masyarakat pada akhirnya membaca program-program yang ditawarkan PKS (CNN Indonesia, 2019).

Strategi ketiga adalah memetakan konstituen atau calon pemilih yang akan disasar. PKS adalah sebuah partai yang berideologikan Islam, oleh karena itu tentu saja sasaran dari PKS adalah pemilih Muslim. Dilansir dari tirto.id,

menurut Muttaqin Kepala Pemenangan Pemilu DPD PKS Kota Depok bahwa PKS mengamankan suara selama ini dengan memanfaatkan militansi dari para kader. Mesin partai bekerja dengan mendoktrin bahwa kampanye dalam pemilihan daerah dan nasional, baik kepala daerah maupun legislatif merupakan bagian dari ibadah (Putri, 2018).

Setelah mengetahui tujuan, menganalisa situasi, dan memetakan konstituen atau calon pemilih, PKS dapat dengan cermat memberikan pesan yang disampaikan kepada pemilihnya. Setidaknya ada 4 janji utama PKS di Pemilu 2019, di antaranya adalah membebaskan pajak motor ber-cc kecil, memberlakukan SIM seumur hidup, membebaskan pajak penghasilan di bawah Rp. 8 juta dan untuk konstituen muslim PKS berjanji akan memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama (Fathurohman, 2019).

Faktor Internal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sobalely (2015), ia menemukan bahwa terdapat 2 hal yang dapat dilihat dalam menganalisa kemenangan partai politik dalam pemilu, yaitu internal dan eksternal. Namun penelitian ini menfokuskan kepada faktor internal PKS. Terdapat beberapa alasan mengapa penulis memilih faktor internal, di antaranya adalah bahwa PKS adalah partai yang berideologikan Islam konservatif. Selain itu, PKS lahir dari sebuah gerakan sosial bernama tarbiyah yang kemudian bermutasi menjadi partai politik. PKS tampil sebagai “partai kader” yang menerapkan standar ketat pada proses rekrutmen sehingga militansi para kader sudah tidak diragukan lagi (Muhtadi, 2012, hal. 31-54).

Pengaruh Ideologi Islam Konservatif

Faktor internal pertama yang akan dibahas adalah pengaruh ideologi dan program PKS terhadap kemenangan PKS di pemilihan DPRD Kota Depok. PKS merupakan salah satu partai politik yang berideologikan Islam. Hal ini terlihat di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BAB 1 Pasal 2 yang mengatakan bahwa PKS adalah partai yang berasaskan Islam.

Bahkan, di dalam misi partai disebutkan bahwa PKS menjadi sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat, yang diridhai oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam tahap strategi politik, partai politik harus dapat membaca situasi dengan baik. Jika menarik mundur kebelakang, isu agama menjadi perhatian serius. Hal ini dimulai dengan adanya demonstrasi 2 Desember tahun 2016 atau yang kita kenal dengan istilah 212 atau aksi bela Islam. Aksi tersebut menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Isu agama terus meningkat hingga satu tahun setelahnya, tepatnya pada momen Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Pilkada DKI Jakarta, PKS mendukung pasangan Anies Baswedan - Sandiaga S. Uno. Pasangan ini dinilai memiliki kedekatan dengan sejumlah ormas Islam, khususnya Front Pembela Islam (FPI). Hal ini terlihat dari kunjungan Anies Baswedan ke markas Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta Pusat, di hari pertama tahun 2017. Padahal, pada pemilihan presiden tahun 2014 lalu, Anies mengkritik kedekatan Prabowo dengan FPI yang disebutnya sebagai ekstremis. Namun bagi Halili Hasan, dosen sekaligus pengamat politik dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Setara Institute, manuver Anies adalah hal yang wajar. Ini semua menurutnya adalah bagian dari gerakan politik identitas berbasis agama untuk meraih suara elektoral. Ia pun menambahkan pendulum penggunaan sentimen agama di ruang publik ada di kubu Islam konservatif (Hasan, 2017). Sejak saat itu, kubu Islam konservatif memainkan peranan penting, termasuk PKS.

Dalam buku *Dilema PKS* yang ditulis oleh Burhanuddin Muhtadi (2012), jika dibandingkan partai Islam lain seperti PKB dan PAN, ceruk pemilih Muslim bagi PKS tergolong sedikit. PKB dan PAN didukung oleh dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Namun sejak Pilkada DKI Jakarta, PKS menjalin hubungan yang harmonis dengan FPI. Hal ini terlihat dari kunjungan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie didampingi Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan sejumlah Elite PKS lainnya yang melakukan kunjungan silaturahmi ke Imam Besar FPI Rizieq Syihab di Makkah, Arab Saudi. Rizieq pun menyambut hangat kunjungan Elit PKS. Dalam kesempatan itu, Rizieq memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada PKS dan kader-kadernya yang telah bekerja keras dalam membela agama, bangsa, dan negara, serta mengawal amanah Ijtima' Ulama. Rizieq berharap agar PKS dapat memenangkan Pemilu 2019 (Nugroho, 2019). Kedekatan antara PKS dengan FPI menjadi salah satu alasan mengapa perolehan suara PKS meningkat di Pemilu 2019.

Di Kota Depok, isu agama juga menjadi perhatian serius masyarakat sejak era kepemimpinan Mohammad Idris. Mohammad Idris adalah walikota yang pada Pilkada 2015 didukung oleh PKS. Terdapat beberapa kebijakan kontroversial yang dikeluarkan Mohammad Idris yang berkaitan dengan hukum Islam, di antaranya adalah Perda tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Sebagai turunan dari Perda Ketahanan Keluarga itu, Idris kemudian menerbitkan Instruksi Wali Kota Nomor 2/2018 tentang Penguatan Ketahanan Keluarga terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual yang menyoar pada perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) (Putri, 2019).

Selain itu, di awal tahun 2019 pemerintah Kota Depok mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Syariah atau yang disebut dengan Raperda Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) yang kemudian ditolak oleh DPRD Kota Depok. Raperda tersebut terdiri dari 20 pasal. Beberapa di antaranya mengatur cara beribadah, bersikap hingga berpakaian warga. Misalnya, Pasal 5 Ayat 4 dan 5 yang melarang perbuatan tercela seperti tindak pidana korupsi, perzinahan, pelacuran, mengonsumsi dan mengedarkan minuman beralkohol, aborsi, pornografi, riba, perbuatan syirik, eksploitasi anak dan perempuan, hingga penyebaran aliran sesat. Ada pula pasal yang mengatur etika berpakaian (Pasal 14 Ayat 1): Setiap orang wajib berpakaian

sopan sesuai ajaran agamanya masing-masing dan norma kesopanan masyarakat Kota Depok (Putri, 2019).

Walaupun ditolak oleh DPRD Kota Depok, namun isu – isu ini menjadi cerminan pemikiran warga Kota Depok. Sebagian orang berpikiran bahwa Kota Depok sudah terlampaui jauh dari moralitas, sehingga Perda Syariah menjadi sebuah solusi. Namun, ada pula sebagian masyarakat yang berpikir bahwa Perda Syariah mencederai hak kebebasan masyarakat Kota Depok. Dengan mencuatnya isu agama tersebut, maka PKS berusaha mengambil ceruk pemilih dari orang-orang yang berpikir bahwa Perda Syariah adalah solusi dan ingin menjadikan Kota Depok sebagai kota yang religius. Menurut Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute bahwa akhirnya Perda syariah hanya digunakan sebagai instrumen politis untuk mengerek suara dan untuk memelihara dukungan kelompok tertentu (Putri, 2019).

Dari penjelasan di atas, Isu agama di DKI Jakarta yang menguat ternyata juga dirasakan di Kota Depok yang tidak jauh dari ibu kota. Hal inilah yang membuat partai-partai Islam, khususnya partai Islam konservatif seperti PKS berusaha mengambil ceruk pemilih yang berpikiran bahwa hukum syariah merupakan sebuah solusi. Selain itu, dengan adanya pemilu serentak tahun 2019, sehingga kenaikan suara nasional PKS dan isu-isu nasional yang digaungkan PKS berdampak positif bagi perolehan suara PKS di Kota Depok.

Peran Strategi Kader dan Pengurus PKS

Faktor internal kedua yang dibahas adalah peran kader dan pengurus PKS Kota Depok. Sebelum tahun 2019, PKS telah mulai menghidupkan dan memanaskan mesin politiknya. Dalam rangka persiapan menghadapi pemilu serentak tahun 2019, PKS menyelenggarakan forum-forum diskusi atau yang dikenal dengan istilah Forum Group Discussion (FGD). Seperti yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2017 di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Komplek Senayan. Pada FGD tersebut dibuka oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Barat VII, Mardani Ali Sera mengungkapkan kegiatan tersebut dalam rangka persiapan pemilu serentak 2019, Mardani juga mengungkapkan

bahwa diperlukan cara yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pemetaan Daerah Pemilihan (Dapil) oleh seluruh struktur dan calon anggota legislatif dari PKS sebagai bagian dari strategi pemilu (Wiangga, 2017).

Setelah melaksanakan FGD, PKS membentuk Tim Pemenangan Pemilu (TPP) di seluruh wilayah Indonesia. TPP tersebut bersama dengan Manager Dapil dilantik pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 di Kantor DPP PKS. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Presiden PKS, Muhammad Sohiful Iman. Selain melantik TPP dan Manager Dapil, Presiden PKS juga menyampaikan pembekalan sebagai masukan dalam persiapan pemilu serentak 2019 kepada calon anggota DPR-RI dari PKS. Dalam materi pembekalan tersebut, diantaranya Presiden PKS mengingatkan keikhlasan niat kepada Tuhan, keteguhan sikap pada nilai-nilai partai sebagai pembeda antara PKS dengan partai lainnya, yaitu:

“Kita harus senantiasa memperbaiki niat, karena dengan lurus nya niat maka pertolongan Allah akan hadir kepada kita. Kita memiliki nilai-nilai, dan kita harus teguh pada nilai-nilai tersebut. Kita harus menang dengan penuh keberkahan, itu adalah prinsip kita. Kita tidak boleh menang dengan cara-cara yang tidak halal, itu adalah prinsip kita. Kita memiliki cara yang berbeda dengan orang lain dalam berpolitik. Bagi kita, berpolitik tidak hanya semata merebut kekuasaan, namun untuk merealisasikan cita-cita bersama untuk Indonesia” (Humas DPP PKS, 2017).

Setelah pembentukan TPP, selanjutnya PKS menyelenggarakan konsolidasi akbar nasional di Hotel Bumi Wiyata yang berada di Jalan Raya Margonda Depok Jawa Barat PKS pada tanggal 14 Oktober 2018. Dalam acara tersebut juga hadir Ketua Majelis Syuro PKS (Salim Segaf Aljufri), Presiden PKS (Muhammad Sohiful Iman), Caleg DPR-RI PKS dan para Kepala Daerah dari PKS. Pada acara tersebut Direktur Pencapresan PKS (Suhud Alynudin) menyatakan bahwa di antara agenda yang dibahas adalah mengenai konsolidasi struktur dan calon anggota legislatif DPR RI, pemenangan pilpres dan fokus pembahasan pada pemenangan PKS pada pemilu legislatif (Riana, 2018).

Acara konsolidasi nasional tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTW), tim pemenangan dan para calon anggota legislatif. Tujuan dari kegiatan tersebut juga sebagai bagian strategi PKS dalam mencapai targetnya menjadi partai papan atas dalam Pemilu 2019. Dalam konsolidasi nasional ini, keinginan PKS untuk menjaga integritas pemilu diwujudkan dengan memberikan pembekalan kepada para calegnya agar tidak melakukan kecurangan pemilu (Mansur, 2018).

Dalam menguatkan kader dan para caleg demi memenangkan Pemilu 2019, PKS melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik dalam internal PKS disebut dengan *halaqah (mentoring)*. Pendidikan politik juga merupakan bagian dari langkah-langkah dalam penguatan partai politik. Pendidikan politik diharapkan dapat membentuk kepribadian politik, kesadaran politik dan kemampuan anggota untuk berpartisipasi aktif dalam politik (Labolo & Ilham, 2015, hal. 227-239).

Penguatan partai politik dalam pendidikan politik dapat dilakukan dalam tiga langkah. Pertama adalah penguatan ideologi. Pendidikan politik diharapkan dapat memberikan kemampuan kadernya untuk mengimplementasikan ideologi tersebut sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat dan pada akhirnya ideologi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Tahapan kedua adalah penguatan kaderisasi partai. PKS merupakan partai kader, yang artinya bergantung pada militansi kadernya. Oleh karena itu, penguatan kaderisasi partai merupakan suatu langkah penting guna memenangkan pemilu. Selain itu, dengan pendidikan politik diharapkan dapat memberikan kemampuan kadernya untuk dapat bersaing dengan kader dari partai lainnya. Tahapan ketiga adalah pendanaan partai. Pendidikan politik diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi anggota untuk dapat menyalurkan iuran anggota secara sukarela karena kedekatan emosionalnya untuk kesuksesan partai sehingga pengelolaan partai dalam hal pendanaan menjadi lebih baik dan mandiri tidak

hanya mengandalkan bantuan negara.

Setelah pembekalan kader dan caleg dirasa telah cukup, maka penting untuk melihat bagaimana mesin politik PKS bekerja. Salah satu strategi kampanye PKS adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh PKS diterapkan pada seluruh tingkatan partai baik di tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat), DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPC (Dewan Pimpinan Cabang) tingkat Kecamatan dan DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) tingkat Ranting atau Kelurahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS (Drs. H. Suharna Surapranata, M.T, 2008), bahwa:

“Dalam bingkai pemilu, maka para juru kampanye sebuah partai wajib menguasai betul pesan utama platform yang ingin diperjuangkannya, kemudian mengkomunikasikan semua pesan itu kepada masyarakat konstituen secara baik. Pilihan kata yang tepat, metoda penyampaian yang menarik, dan pemaparan bukti-bukti yang meyakinkan akan mengarahkan pilihan suara konstituen. Itulah cara rasional dan elegan dalam menjangkau suara, bukan dengan sogokan politik uang atau intimidasi kekerasan fisik dan psikologis. Selain itu untuk meyakinkan publik perlu dimunculkan tokoh sebagai ikon dari masing-masing bidang platform ini. Inilah kewajiban calon anggota legislatif dan juru kampanye PK Sejahtera di pusat maupun daerah, menyebarkan platform kebijakan pembangunan PK Sejahtera ke segenap pelosok Tanah Air hingga ke mancanegara. Sekali lagi, harapan kami gunakan “bahasa kaum”, bahasa yang mudah dan akrab di telinga masyarakat, namun tetap cerdas dan visioner. Jangan sampai ada lapisan masyarakat yang tidak mengenal atau memahami apa sesungguhnya yang diperjuangkan PK Sejahtera. Forum dialog warga, debat publik, atau wawancara di media massa dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran ide platform ini.” (Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2008, hal. xiv-xv).

Pendidikan politik menjadi bagian dalam program kerja bidang kaderisasi, keummatan dan kebijakan publik. Dalam bidang kaderisasi pendidikan politik dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan seperti *taklim* (pengajaran tentang keagamaan Islam dan pengajian) secara rutin kepada anggota pemula, anggota muda dan calon anggota serta

masyarakat umum, kegiatan seminar dan kegiatan kajian serta kegiatan sosial.

Dalam bidang keummatan pendidikan politik dilakukan melalui kerjasama dan silaturahmi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam tiga pendekatan, yaitu: dakwah (dalam pengajian atau Taklim secara rutin maupun dalam ceramah-ceramah shalat berjamaah ditempat ibadah umum seperti Masjid dan Musholla); pendidikan seperti pendampingan lembaga pendidikan maupun lembaga pendidikan baru; dan kerjasama dengan lembaga maupun organisasi masyarakat (ormas) seperti silaturahmi antar lembaga dakwah atau dengan merekrut tokoh dan mendukung kadernya masuk dalam lembaga dan organisasi masyarakat tertentu. Dalam bidang kebijakan publik pendidikan politik dilakukan melalui penjelasan dalam reklame seperti spanduk dan penerbitan publikasi cetak secara rutin seperti bulletin, kemudian melalui internet yaitu website resmi dan media sosial (Ashar, 2011, hal. 75-80).

Pendidikan politik melalui dakwah politik (*siyasa*) dapat diartikan sebagai kegiatan pengajaran keagamaan Islam yang menjadikan kekuasaan, birokrasi dan kekuatan politik untuk kepentingan misi Islam. Dakwah politik yang diprogramkan PKS adalah melalui pola struktural yaitu dengan mendorong terciptanya regulasi maupun kebijakan yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga melalui pola kultural yaitu dengan pemberdayaan umat dalam kelompok tarbiyah (pembinaan dan bimbingan) secara rutin dan persuasif seperti dalam lingkungan keluarga, kelompok studi terbatas atau pertemuan mingguan kemudian rekreasi, pelatihan dan seminar. Pembinaan dalam pola kultural dengan memanfaatkan kegiatan adat, tradisi daerah masing-masing sesuai kegiatan dilaksanakan (Supriatna, Amin, & Jasad, 2016, hal. 18-19 & 32).

Pendidikan politik yang diselenggarakan PKS dikenal juga dengan konsep *Manhaj Tarbiyah*, yaitu membentuk kepribadian Islami kader berdasarkan parameter yang dikenal dengan *muwashofat tarbiyah* yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penilaian terhadap

penempatan jenjang dan amanah dalam partai yang akan diberikan kepada kader. Aspek-aspek *muwashofat tarbawiyah* terdiri dari 10 aspek, yaitu beraqidah lurus, beribadah dengan benar, berakhlak kokoh, mampu berprestasi, memiliki pikiran yang berwawasan, bertubuh sehat dan kuat, memiliki jiwa yang bersungguh-sungguh, mampu mengatur rapih segala urusan, mampu mengatur waktu, dan bermanfaat untuk orang lain (Sholeh, 2015, hal. 56 & 65).

Strategi lainnya dari penyelenggaraan pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS terhadap internal dan eksternalnya adalah dengan mendorong dilibatkannya kalangan perempuan. Sebagaimana diungkapkan Presiden PKS, Muhammad Sohbul Iman bahwa masyarakat dipandang perlu untuk diberikan pendidikan politik dan sentuhan perempuan memiliki peran penting karena dapat membuat masyarakat lebih teredukasi (NAS, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pendidikan politik yang diselenggarakan oleh PKS meningkatkan kemampuan dan keahlian para kader dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari organisasi partai sekaligus membentuk kepribadian Islami yang kemudian meningkatkan kesetiaan para kader terhadap PKS yang juga berasaskan Islam. Pendidikan dalam hubungannya dengan kontestasi pemilu diarahkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS sebagai bagian dalam pemantapan pemahaman para kader dan pengurus terhadap platform dan program yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga para kader maupun pengurus tersebut kemudian mampu mentransfer pemahaman tersebut dan meyakinkan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada para pemilih dan pendukungnya untuk memberikan suaranya kepada PKS pada saat pemilu. Simpati pemilih dan kemenangan diperoleh melalui cara yang dianggap terhormat dan tidak melanggar kejahatan pemilu seperti politik uang dan intimidasi lawan politik. Berikutnya pemberdayaan perempuan dalam pendidikan politik mematahkan kesan atau isu tentang kekhawatiran dominasi laki-laki dalam partai yang berasaskan Islam sehingga membuka kesan terbuka terhadap partisipasi

pemilih dari kaum perempuan.

Di samping menjalankan pendidikan politik, PKS juga melakukan sosialisasi politik dalam bentuk indoktrinasi politik, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada, Muttaqin Syafi'i:

“Pamungkas PKS mengamankan suara selama ini dengan memanfaatkan militansi dari para kader. Mesin partai itu bekerja dengan mendoktrin bahwa kampanye dalam pemilihan daerah dan nasional baik kepala daerah maupun legislatif merupakan bagian dari ibadah. Sehingga kader PKS bukan hanya berkorban waktu, tenaga, dan pikiran, tapi juga finansial. Selain itu, pendekatan PKS melalui ideologis. Mereka mendekati konstituen lewat penyadaran dan pemahaman, bukan pertama-tama lewat politik uang. Sebab, jika bermodal politik uang, PKS akan kalah total karena modal yang minim. Pengaruh PKS di Depok menyentuh ke diskusi-diskusi informal di kampus dan kelompok Tarbiyah. Kaderisasi sudah dilakukan sejak dini. Demografi masyarakat Depok adalah kelas menengah berpendidikan tinggi.” (Putri, 2018).

Suksesnya strategi kampanye PKS tentunya tidak hanya didukung oleh pilihan bentuk sosialisasi politik dan metode kampanye yang diterapkan, tetapi juga kemampuan PKS dalam menyediakan anggaran (pendanaan kampanye). Kemampuan pendanaan kampanye adalah sebagai bagian penting dalam menunjang kesuksesan strategi kampanye, yaitu sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya yang diperlukan partai untuk melaksanakan strategi kampanye yang telah direncanakan sehingga pelaksanaan kampanye sesuai tujuan atau target yang diharapkan dan pada tujuan akhirnya dapat menarik simpati pemilih.

Pendanaan kampanye dapat berupa uang maupun barang modal yang berasal dari internal partai maupun sumbangan pihak luar seperti simpatisan atau pendukung sesuai ketentuan pemilu yang berlaku. Maka dalam hal pendanaan kampanye tidak hanya sebatas penyediaan kedua modal materi tersebut namun juga diperlukan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatannya agar tidak hanya menyukseskan program kampanye tetapi juga sesuai aturan main pemilu.

Tabel 2. Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

No.	Partai Politik	K u r s i	Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
			Jumlah Calon Anggota DPRD Yang Menyerahkan	Jumlah Calon Anggota DPRD Yang Tidak Menyerahkan	Total Penerimaan	Total Pengeluaran
			1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12	50 Calon
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	10	50 Calon	0 Calon	5.113.707.080	5.113.707.080
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	10	50 Calon	0 Calon	1.318.615.000	1.318.615.000
4	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	5	48 Calon	0 Calon	1.895.449.140	1.052.949.140
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	50 Calon	0 Calon	1.474.489.067	1.473.587.013
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	14 Calon	33 Calon	1.793.795.471	1.187.206.460
7	Partai Demokrat	3	50 Calon	0 Calon	557.120.000	557.120.000
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	45 Calon	0 Calon	1.928.975.000	1.927.975.000
9	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	49 Calon	0 Calon	334.187.645	334.187.645
10	Partai NasDem	0	49 Calon	1 Calon	21.000.000	20.000.000
11	Partai Berkarya	0	50 Calon	0 Calon	522.892.675	522.892.675
12	Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)	0	17 Calon	11 Calon	351.757.400	184.865.400
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)	0	-	-	-	-
14	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	23 Calon	0 Calon	5.230.056	5.230.056
15	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	0	-	-	-	-
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	3 Calon	0 Calon	16.295.000	16.295.000
Total		50	548 Calon	45 Calon	18.522.796.934	16.886.678.869

Sumber: Telah diolah kembali dari data KPU Kota Depok.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 16 partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Depok, PKS termasuk dari beberapa partai yang seluruh calegnya menyerahkan laporan dana kampanye kepada partainya. Kemudian untuk transaksi penerimaan dana kampanye yang mencapai nilai 1 miliar rupiah ke atas, PKS berada pada urutan kedua dengan nilai lebih dari 3 miliar rupiah setelah Partai Gerindra dengan nilai lebih dari 5 miliar rupiah. Dalam hal transaksi pengeluaran dana kampanye yang mencapai nilai 1 miliar rupiah ke atas, PKS juga berada pada urutan kedua dengan nilai lebih dari 3 miliar rupiah setelah Partai Gerindra dengan nilai lebih dari 5 miliar rupiah yang kemudian disusul dengan urutan selanjutnya dengan nilai di bawah 2 miliar rupiah adalah PPP, PAN, PDI-P, PKB dan Partai Golkar. Besarnya nilai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye PKS yang berada pada peringkat dua tersebut menunjukkan bahwa PKS memiliki kemampuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan kampanye yang cukup signifikan nilainya dalam jajaran partai-partai yang

bertarung dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Depok.

Dari penjelasan ini penulis melihat peran kader, pengurus, serta caleg cukup baik sehingga berhasil meningkatkan performa partai di pemilihan DPRD Kota Depok tahun 2019. Berikut dipaparkan daftar caleg terpilih PKS Kota Depok:

Tabel 3. Hasil Daftar Calon Anggota Legislatif (Caleg) Terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun 2019.

No.	Caleg Terpilih	Daerah Pemilihan
1	H. Moh. Hafid Nasir	Dapil 1 (Kecamatan Pancoran Mas)
2	H. Imam Musanto	
3	H. T.M. Yusufsyah Putra	Dapil 2 (Kecamatan Beji, Cinere dan Limo)
4	T. Farida Rachmayanti	
5	Ade Supriyatna, S.T	Dapil 3 (Kecamatan Cimanggis)
6	Dra. Sri Utami, M.M	
7	H. M. Supariyono	Dapil 4 (Kecamatan Sukmajaya)
8	Hengky, S.T	
9	Qurtifa Wijaya, S.Ag	Dapil 5 (Kecamatan Tapos dan Cilodong)
10	Ade Firmansyah, S.H	
11	Habib Syarif Gasim H.	Dapil 6 (Kecamatan Sawangan, Bojongsari dan Cipayung)
12	H. Khairulloh	

Sumber: Telah diolah kembali dari data KPU Kota Depok.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari seluruh Dapil (6 Dapil) di Kota Depok sebaran perolehan kursi PKS dapat dikatakan merata yaitu masing-masing di setiap Dapilnya berhasil memperoleh 2 kursi sehingga total menjadi 12 kursi. Terbukti bahwa 5 Caleg Petahana yang maju kembali pada pemilu DPRD Kota Depok pada pemilu serentak 2019 telah berhasil terpilih kembali yaitu: Dra. Sri Utami, M.M dari Dapil 3 (Kecamatan Cimanggis), Qurtifa Wijaya, S. Ag dari Dapil 5 (Kecamatan: Cilodong dan Tapos), T. Farida Rachmayanti dari Dapil 2 (Kecamatan: Beji, Cinere dan Limo), H. M. Supariyono dari Dapil 4 (Kecamatan Sukmajaya), dan H. Moh. Hafid Nasir dari Dapil 1 (Kecamatan Pancoran Mas).

SIMPULAN

Keberhasilan PKS dalam Pemilu 2019, khususnya pada pemilihan DPRD Kota Depok, tidak lepas dari adanya pengaruh internal partai, yaitu ideologi Islam konservatif serta peran kader dan pengurus PKS Kota Depok. Ideologi Islam konservatif yang kurang diminati di Indonesia pasca Reformasi kini mulai diminati seiring dengan menguatnya isu agama jelang pemilu serentak tahun 2019. Selain itu, hubungan PKS dengan FPI yang memiliki

corak yang sama juga memberi dampak positif bagi performa PKS pada Pemilu 2019 jika dilihat dari perolehan jumlah kursi.

PKS yang lahir dari sebuah gerakan sosial dan juga termasuk ke dalam partai kader tentu memiliki kader-kader yang militan. Oleh karena itu, faktor kader serta pengurus PKS Kota Depok juga menjadi salah satu kunci kemenangan PKS dalam pemilihan DPRD Kota Depok tahun 2019. Hal ini terlihat dari persiapan yang matang jelang pemilu, mulai dari adanya Forum Group Discussion (FGD), konsolidasi nasional, serta pendidikan politik baik untuk kader, pengurus, caleg, maupun masyarakat secara umum. Selain itu, PKS Kota Depok juga memiliki kekuatan finansial yang memadai guna memenangkan pemilu yang terlihat dari transaksi penerimaan dan pengeluaran partai untuk pemilihan DPRD Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, A. S. (2011). *Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang. Skripsi*. Semarang: Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Aspinall, E., Muhtadi, B., Fossati, D., & Warburton, E. (2018, Mei 3). *Corak Ideologi Partai-Partai di Indonesia*. Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/corak-ideologi-partai-partai-di-indonesia-cJKc>
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- CNN Indonesia. (2019, Mei 24). *Buah Manis Ketegasan PKS Jadi Oposisi*. From Cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190520180040-32-396591/buah-manis-ketegasan-pks-jadi-oposisi>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathurohman, I. (2019, November 19). *Mengingat Empat Janji PKS di Pemilu 2019*. From IDN Times: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/mengingat-empat-janji-pks-di-pemilu>
- Geertz, C. (1976). *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago.

- Hanan, D. (2018, Februari 19). *Efek Ekor Jas*. From Saifulmujani.com: <https://saifulmujani.com/efek-ekor-jas/>
- Harian Sederhana. (2018, Oktober 1). *Dapil Cisari, PKS Depok Targetkan 2 Kursi*. From Hariansederhana.com: <https://www.hariansederhana.com/dapil-cisari-pks-depok-targetkan-2-kursi/>
- Hasan, A. M. (2017, Februari 14). *Kuatnya Sentimen Agama di Pilgub Jakarta*. From Tirto.id: <https://tirto.id/kuatnya-sentimen-agama-di-pilgub-jakarta-ciZn>
- Humas DPP PKS. (2017, November 26). *Presiden PKS Lantik Tim Pemenangan Pemilu 2019*. Diambil kembali dari PKS.id: <https://pks.id/content/presiden-pks-lantik-tim-pemenangan-pemilu-2019>
- KPU Kota Depok. (2019). *Rumah Pintar Pemilu, Info Pemilu, JDIH dan PPID KPU Kota Depok, Pengumuman Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019*. From Informasi dan Dokumentasi pada layanan kantor dan laman resmi KPU Kota Depok (<https://kota-depok.kpu.go.id/>)
- Labolo, D. M., & Ilham, T. S. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lindawati, D. S. (2013). *Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014*. *Jurnal Politicia, Vol. 4 No. 2*.
- Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. (2008). *Memperjuangkan Masyarakat Madani*. Jakarta: DPP PKS.
- Mansur, A. (2018, Oktober 14). *PKS Targetkan Tembus Papan Atas di Pemilu 2019*. Diambil kembali dari Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/pgl1cu430/pks-targetkan-tembus-papan-atas-di-pemilu-2019>
- Muhtadi, B. (2012). *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: KPG.
- NAS. (2018, April 8). *Presiden PKS: Masyarakat Perlu Pendidikan Politik*. From Indopos.co.id: <https://indopos.co.id/read/2018/04/08/134078/presiden-pks-masyarakat-perlu-pendidikan-politik/>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Edinburgh: Pearson Education Limited.

- Nugroho, K. W. (2019, April 8). *Rizieq: Saya Instruksikan FPI Kerja Sama dengan PKS Menangi Pemilu*. From Kumparan NEWS: <https://kumparan.com/kumparannews/rizieq-saya-instruksikan-fpi-kerja-sama-dengan-pks-menangi-pemilu-1qqhqG3IEpG/full>
- Putri, R. D. (2018, September 7). *Takhta PKS yang Langgeng di Depok*. Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/takhta-pks-yang-langgeng-di-depok-cXvS>
- Putri, R. D. (2019, Juni 13). *Macet, Semrawut, Korupsi. Solusi Pemkot Depok: Jadi Kota Religius*. Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/macet-semrawut-korupsi-solusi-pemkot-depok-jadi-kota-religius-ecj4>
- Rahma, A. (2019, Maret 10). *Isu Agama Dinilai Masih Jadi Andalan di Pemilu 2019*. From Tempo.co: <https://pemilu.tempo.co/read/1183731/isu-agama-dinilai-masih-jadi-andalan-di-pemilu-2019>
- Ramadhan, B. (2017, Oktober 14). *Ini Target-Target PKS di Pemilu 2019*. From Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/14/oxt0et330-ini-targettarget-pks-di-pemilu-2019>
- Riana, F. (2018, Oktober 14). *Gelar Konsolidasi Nasional, PKS Ingin Jadi Partai Papan Atas*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://pemilu.tempo.co/read/1136106/gelar-konsolidasi-nasional-pks-ingin-jadi-partai-papan-atas/full&view=ok>
- Schroder, P. (2010). *Strategi Politik*. Jakarta: Freidrich Nauman Stiftung.
- Sholeh, F. T. (2015). Manhaj Tarbiyah dalam Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Jurnal Salam, Vol. 18 No. 1*.
- Siavelis, P. M., & Morgenstern, S. (2008). *Pathway to Power: Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America*. Pennsylvania: Pennsylvania University Press.
- Sobalely, J. R. (2015). Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok. *Tesis*. Depok: Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Supriatna, I., Amin, M., & Jasad, U. (2016). Dakwah Siyasa: Strategi Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam perjuangan Aspirasi Umat Islam. *Jurnal Diskursus Islam, Vol. 4 No. 1*.

Tanuwidjaja, S. (2010). Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assessing the Evidence of Islam's Political Decline. *Jurnal Contemporary Southeast Asia, ISEAS-Yusof Ishak Institute*.

Wiangga, L. S. (2017, Juli 27). *PKS Siapkan Strategi Pemenangan Pemilu 2019*. Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://kabar24.bisnis.com/read/20170727/15/675527/pks-siapkan-strategi-pemenangan-pemilu-2019>

Aktor Politik dan Kolaborasi *Quadruple Helix* dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan

Political Actor and Collaboration Quadruple Helix in the Formation of the New Autonomous Region of South Garut Regency

**Diki Suherman^{1*}, Yogi Suprayogi Sugandi², Mohammad Benny
Alexandri³**

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat 45363

*corresponding author E-mail: dikisuherman44@gmail.com

Diterima: 29 Januari 2021; Direvisi: 2 Maret 2021; Disetujui: 4 Maret 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi *Quadruple Helix* dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan, mengingat pembentukan kabupaten tersebut sudah sangat lama berusaha dibentuk namun kenyataannya hingga kini belum disahkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan model *interactive* yang terdiri dari reduksi data, display data dan pemaparan hasil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat aktor-aktor yang berkolaborasi secara *Quadruple Helix* untuk mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan, yang memiliki peran yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama untuk membantu mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Penelitian kolaborasi *Quadruple Helix* ini dilihat dari 4 aktor politik yang memiliki kekuasaan dan pengaruh paling signifikan terhadap proses pembentukan kabupaten ini. Aktor yang dimaksud yaitu dari kalangan akademisi Garut Selatan (*academian*), Pelaku Usaha di Garut Selatan (*businessmen*), Tokoh masyarakat/Presidium masyarakat Garut Selatan (*civil society*) dan Pemerintah Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat (*government*). Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Pusat sebagai pemangku kebijakan tertinggi memasukkan pembahasan pembentukan Daerah Otonomi Baru sebagai agenda kebijakan yang diprioritaskan untuk membantu menjalankan kewenangan pusat dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: *Quadruple helix*, aktor politik, daerah otonomi baru

ABSTRACT

This study aims to determine the collaboration of the Quadruple Helix in the formation of the New Autonomous Region of South Garut Regency, considering that the formation of South Garut Regency has been trying to form for a long time but in reality it has not been legalized until now. This research method uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews and documentation. With the data analysis technique used an interactive model which consists of data reduction, data display, and presentation of the conclusions. The results of this study are that there are actors who collaborate in Quadruple Helix to support the formation of the New South Garut Autonomous Region, which have different roles in achieving the same goal of assisting in supporting the formation of South Garut Regency. In this collaborative research, it Quadruple Helix is seen from 4 political actors who have the most significant power and influence on the formation process of Garut Regency, the actors in question are from the South Garut academics (academician), business actors in South Garut (businessmen), community leaders/Presidium the people of South Garut (civil society) and the Government of Garut Regency and West Java Province (government). The recommendation in this study is that the Central Government as the highest policy maker needs to include the discussion of the formation of the New Autonomous Region as a prioritized policy agenda to help exercise central authority in carrying out regional development and implementing regional governance.

Keywords: *Quadruple helix, political actor, new autonomous region*

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Otonomi Daerah tercantum dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Gandara, 2020). Adanya Otonomi Daerah memberi kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya sendiri untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi dan politik (Rachaju, 2019).

Adanya kewenangan dalam mengurus daerah, membuat daerah-daerah berusaha untuk melakukan pembentukan baik Kabupaten/Kota maupun pembentukan Provinsi. Banyaknya jumlah daerah yang dibentuk selain memberikan manfaat positif juga terdapat sisi negatif yang menimbulkan masalah (Nurfurqon, 2020). Walau pada dasarnya pembentukan daerah otonom memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat,

namun praktek di lapangan justru banyak menimbulkan masalah baru antar daerah dan masyarakat. Termasuk tidak berhasilnya daerah bahkan semakin tertinggal setelah dimekarkan (Hakim, 2017). Lebih lanjut tidak sedikit masalah yang muncul dari pembentukan daerah otonomi baru ini, seperti kualitas pelayanan yang semakin buruk bahkan sampai terjadi konflik kekerasan pada daerah yang dimekarkan (Maman et al., 2016).

Inilah yang menjadi kekhawatiran pemerintah pusat dalam menyetujui pembentukan daerah. Akan tetapi meskipun demikian, banyak juga sisi positif yang ditimbulkan seperti membantu mendorong tumbuhnya iklim kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Asmaria et al., 2020; Santika et al., 2018). Pembentukan daerah dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan dan disparitas/ketimpangan pembangunan yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan utama banyaknya daerah-daerah yang menginginkan pembentukan daerah otonomi baru untuk memperjuangkan haknya memperoleh pelayanan dari pemerintah dengan maksimal dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik yakni mendapatkan kesejahteraan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang menginginkan pembentukan daerah otonomi baru adalah Provinsi Jawa Barat yang ingin memekarkan tiga daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Sukabumi Utara. Hal tersebut dilakukan karena terjadinya ketimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, seperti halnya pelayanan publik yang belum menyeluruh karena tidak seimbang antara jumlah penduduk yang harus dilayani dengan jumlah instansi pemerintah yang tersedia sehingga masyarakat yang berada di daerah terpelosok tidak tersentuh oleh pelayanan pemerintah (Suherman, 2020).

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang padat dan lebih banyak dibanding penduduk di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk 48 juta jiwa dengan 27 kabupaten/kota tetapi

mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat lebih kecil dibanding Jawa Tengah yang penduduknya berjumlah 38 juta jiwa dengan 38 kabupaten/kota serta Jawa Timur berjumlah 39 juta penduduk dengan 38 kabupaten/kota (BPS, 2018). Hal tersebut tentunya harus dipertimbangkan sebagai upaya untuk membuat keseimbangan (stabilitas) antara kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk melayani masyarakat di daerah kabupaten/kota.

Lokus pembentukan daerah otonomi daerah baru dalam penelitian ini adalah Kabupaten Garut yang ingin membentuk Kabupaten Garut Selatan. Dari data BPS Kabupaten Garut tahun 2019, Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 306.519 Km² dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa yang tersebar di 42 Kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa. Dengan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang banyak tersebut tidak seimbang dengan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Garut bagian Selatan. Selain dari itu rentang kendali yang luas dan akses yang jauh ke pusat kota menjadi masalah yang dihadapi masyarakat Garut Selatan. Luas wilayah mempengaruhi jarak tempuh yang jauh ke pusat kota dengan keterbatasan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat (Athahirah & Lambelanova, 2019).

Berangkat dari masalah tersebut maka pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut serta Tokoh Masyarakat untuk mendukung pembentukan daerah Kabupaten Garut Selatan. Pada akhir tahun 2013 rencananya akan dilakukan pembentukan Kabupaten Garut Selatan namun sampai saat ini masih belum dimekarkan akibat adanya kebijakan moratorium oleh pemerintah pusat. Padahal begitu besarnya antusias masyarakat Garut Selatan ingin memisahkan diri dari Kabupaten Garut (Karangtri, 2019). Hal ini disebabkan Garut Selatan memiliki potensi sumberdaya alam beragam yang belum tertata dan terkelola dengan baik yang diharapkan menjadi aset dalam pendapatan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun sumber daya alam yang dimiliki

Garut Selatan diantaranya: (i) sektor pertanian, (ii) perikanan, (iii) perkebunan, (iv) peternakan, (v) pertambangan (vi) energi serta (vii) pariwisata yang bisa menjadi peluang besar dalam pembangunan di wilayah Garut Selatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Djuwendah et al., 2013).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembentukan Garut Selatan yaitu penelitian (Syarifudin & Herlina, 2011) tentang analisis kemandirian kinerja kewilayahan Garut Selatan menjadi daerah otonomi baru. Dan penelitian (Suminar et al., 2007) tentang Studi Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Garut Bagian Selatan serta penelitian (Widaningsih, 2017) tentang Roadmap Pengembangan Penanaman Modal Wilayah Garut Selatan Kabupaten Garut. Adapun kebaruan dari penelitian ini yakni terletak pada penggunaan konsep teori aktor *Quadruple Helix*, yang belum banyak mengkaji pembentukan Garut Selatan dengan melihat aktor-aktor politik yang berjejaring untuk mempengaruhi kebijakan pembentukan Garut Selatan.

Dengan demikian untuk mewujudkan pembentukan Garut Selatan perlu dilakukan suatu kolaborasi aktor-aktor pemegang kekuasaan kebijakan sebagai upaya dalam mendukung pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan. Seperti yang disampaikan oleh (Ranga & Etzkowitz, 2013) bahwa pentingnya hubungan antar aktor dalam sistem *helix*, kini telah menumbuhkan era inovasi dimana keterkaitan antar aktor yaitu Akademisi (*academician*), Pemerintah (*government*), Dunia Usaha (*businessmen*) dan masyarakat sipil (*civil society*) sangat berperan melahirkan kebijakan. Konsep *Quadruple Helix* adalah pengembangan dari konsep triple helix yang akan melahirkan kreativitas, ide, keterampilan dan pengetahuan baru. Selain itu seperti yang disampaikan oleh (Mulyana & Sutapa, 2014) bahwa konsep *Quadruple Helix* terkait dengan kolaborasi antara Intelektual (perguruan tinggi)/*intellectuals* (*university*), Dunia Usaha/*businessmen*, Pemerintah/*Government*, dan Masyarakat Sipil/*civil society* yang mendukung tumbuhnya kreativitas dan

gagasan baru. Lebih lanjut (Wahyu & Hana, 2017) menyatakan bahwa dukungan, kerjasama dan interaksi antara Intelektual (perguruan tinggi)/*intellectuals (university)*, Dunia Usaha/*businessmen*, Pemerintah/*Government* dan Masyarakat Sipil/*civil society* merupakan motor penggerak yang melahirkan kreativitas, gagasan dan pengetahuan. Maka dari itu kolaborasi *Quadruple Helix* dalam mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan memiliki peranan amat penting sebagai aktor penggerak yang dapat mempengaruhi regulasi kebijakan sampai pada pengambilan keputusan. Berdasarkan fenomena tersebut dapat disusun secara spesifik kedalam pertanyaan penelitian (*Research Questions*) sebagai berikut: “Bagaimana Aktor Politik dan Kolaborasi *Quadruple Helix* Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan?”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kolaborasi *Quadruple Helix* Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam pembentukan Garut Selatan sebagai sumber data primer. Dan data dokumentasi yang diperoleh adalah dari peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah, arsip pemerintah daerah, dokumen resmi lembaga lain yang berkaitan dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Desentralisasi. Adapun naskah akademik pembentukan daerah, hasil penelitian lembaga lain serta dokumen lainnya merupakan sumber data sekunder. Untuk penentuan informan yaitu berdasarkan purposive sampling dan snowball. Informan yang dipilih untuk diwawancarai yang berkaitan dengan pembentukan Garut Selatan diantaranya Presidium Masyarakat Garut Selatan, Komisi I DPRD Kabupaten Garut, Bidang Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut dan Akademisi Garut Selatan. Waktu yang diperlukan dalam pengambilan data yakni selama enam bulan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis

interaktif (Interactive Model Analisis) yang terdiri dari tiga hal pokok diantaranya reduksi data, sajian data (display) dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Quadruple Helix

Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan tidak akan terlepas dari peran aktor-aktor yang berkolaborasi untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang satu sama lain saling mempengaruhi. Kolaborasi aktor yang dimaksud diantaranya Akademisi (*academician*), Pemerintah (*government*), Dunia Usaha (*businessmen*) dan masyarakat sipil (*civil society*) dikenal dengan *Quadruple Helix* yang merupakan konsep pengembangan dari *Triple Helix* (Ranga & Etzkowitz, 2013).

Kolaborasi merupakan salah satu strategi yang melibatkan peran berbagai stakeholders atau aktor-aktor berkepentingan yang memiliki kepentingan yang sama untuk memperjuangkan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dilakukan sendiri atau satu kelompok, melainkan perlu dilakukan bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang diharapkan (Tilano & Suwitri, 2019).

Dengan demikian keempat aktor dalam *Quadruple Helix* tersebut dapat bekerja sama secara berintegrasi sehingga setiap aktor dapat memerankan fungsinya dengan optimal dan kolaborasi yang dilakukan masing-masing diharapkan dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama, karena sinergitas melalui kolaborasi dari keempat aktor *Quadruple Helix* baik *intellectual, government, businessmen, dan civil society* sangat diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya tujuan yang diharapkan (Sulaksono, 2018).

Kolaborasi *Quadruple Helix* yang dilakukan Akademisi (*academician*), Pemerintah (*government*), Dunia Usaha (*businessmen*) dan masyarakat sipil (*civil society*) dalam mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan memiliki peran dan pengaruh besar untuk mendorong kebijakan pembentukan Garut Selatan. Maka disinilah perlunya melakukan kolaborasi antar aktor yang satu sama lain saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang

diharapkan untuk dapat merealisasikan harapan memisahkan diri menjadi kabupaten baru yang dinantikan sejak lama oleh masyarakat Garut selatan.

Aktor kolaborasi *Quadruple Helix* yang berperan dalam kebijakan pembentukan daerah otonomi baru di Garut Selatan terdiri dari Akademisi Garut Selatan, para Pengusaha baik sektor perkebunan, perikanan dan kelautan serta hasil bumi lainnya, Presidium Masyarakat Garut Selatan sebagai representasi dari tokoh masyarakat Garut Selatan dan terakhir adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Garut. Aktor-aktor tersebut memiliki keterlibatan secara langsung dalam proses pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan, yang tentunya memiliki peran dan ikut andil untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang memungkinkan untuk dicapai yakni disahkannya pembentukan Kabupaten Garut Selatan.

Akademisi (*academian*)

Peran Akademisi amatlah penting sebagai salah satu aktor yang mempengaruhi kebijakan dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Para akademisi yang terlibat memiliki peran dalam melakukan analisis ilmiah untuk memahami kondisi daerah dan dampak yang akan dihasilkan ketika sebelum dan sesudah terjadinya pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah karena didukung dengan kajian ilmiah sebagai referensi kebijakan.

Seperti hasil wawancara dengan Nanat Fatah Natsir yang merupakan akademisi Garut Selatan yang konsisten mengamati perkembangan pembentukan Kabupaten Garut Selatan dan juga mantan rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengatakan bahwa akademisi memiliki peran penting dalam pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan, salah satunya adalah membantu dalam membuat naskah akademik sebagai *draft* awal rancangan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan menjadi suatu kebijakan yang mengesahkan pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian

hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ataupun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang memiliki fungsi bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Preside serta bahan dasar bagi penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan (Basyir, 2014).

Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan, tentunya banyak tahapan yang perlu dikaji secara ilmiah, yang memerlukan bantuan dari para akademisi (Universitas) dalam melakukan kajian kapasitas daerah yang akan dibentuk menjadi kabupaten baru. Kajian kapasitas daerah dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan dilakukan oleh Universitas Padjadjaran yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk mengetahui sejauh mana kapasitas Garut Selatan layak untuk dimekarkan. Inilah peran akademisi yang sangat diperlukan untuk melakukan kajian ilmiah yang sangat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis ilmiah ini maka akan diperoleh atau menghasilkan dokumen/data sebagai referensi untuk menindaklanjuti pembentukan Garut Selatan.

Selain daripada itu, pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan tentunya perlu didukung oleh sumber daya yang ada, artinya perlu meningkatkan kualitas masyarakat setempat melalui peningkatan pendidikan agar siap mengelola dan mengembangkan daerah yang nanti sudah disahkan menjadi kabupaten baru. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Asep Dadang yang merupakan Wakil Ketua 1 STISIP SAINS (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Samudera Indonesia Selatan) yang mengatakan bahwa upaya yang dilakukan sebagai akademisi dalam pembentukan daerah

Kabupaten Garut Selatan salah satunya adalah dengan dibangunnya Perguruan Tinggi di Garut Selatan, karena dari sisi pendidikan masyarakat Garut Selatan kebanyakan putus sekolah, sehingga perguruan tinggi yang dibangun yakni STISIP SAINS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Tabel.1 Angka Partisipasi pendidikan Garut Selatan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan tahun 2019

NO	Kecamatan	JUMLAH SISWA	JML PENDUDUK USIA 7-18 Th.	ANGKA PARTISIPASI
1	Banjarwangi	327	2.702	12,10
2	Bungbulang	1.155	358	322,27
3	Caringin	6	258	2,33
4	Cibalong	186	2.050	9,07
5	Cihurip	156	937	16,66
6	Cikajang	327	1.345	24,30
7	Cikelet	227	913	24,85
8	Cisewu	235	568	41,39
9	Cisompet	0	2.663	0,00
10	Mekarmukti	670	572	117,20
11	Pakenjeng	1.211	754	160,68
12	Pameungpeuk	86	972	8,85
13	Pamulihan	88	1.637	5,38
14	Peundeuy	236	1.169	20,19
15	Singajaya	127	445	28,57
16	Talegong	0	559	0,00
TOTAL		5.037	2.613	192,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Garut 2020

Dari tabel 1 angka partisipasi pendidikan Garut Selatan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan tahun 2019 dapat dilihat bahwa partisipasi pendidikan masyarakat Garut Selatan masih sangat rendah, maka dalam hal ini para akademisi mengambil bagian meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Garut Selatan melalui pendidikan, yang nantinya akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data yang ada IPM Garut Selatan masih rendah.

Dari sini kita bisa melihat begitu besar pengaruh dan peran Akademisi untuk membantu dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan, yang secara

teknis berkecimpung langsung dan berkolaborasi dengan aktor-aktor lainnya yang saling berkaitan satu sama lain, dan akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan menghasilkan kebijakan terkait pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Kebijakan inilah yang nantinya sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat. Maka dari itu suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil dan mencapai kinerja yang baik ketika berdampak pada berhasilnya mengatasi masalah-masalah yang ada dengan kebijakan yang dibuat (Suherman, 2020).

Dunia Usaha (Businessmen)

Aktor Dunia Usaha memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Garut Selatan, karena dalam kegiatannya sangat dipengaruhi oleh pusat pertumbuhan/*Growth Pole*, yang dilihat dari sisi geografis pusat pertumbuhan menjadikan suatu lokasi yang didukung dengan fasilitas sehingga memberikan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik/*pole of attraction*, yang memberikan dampak pada berbagai jenis usaha untuk berdiam di lokasi tersebut dan masyarakatpun tertarik untuk datang serta memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi tersebut (Suherman, 2017).

Berhasil atau tidaknya pembangunan otonomi daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus melibatkan pihak lain seperti halnya para pengusaha, karena kalau hanya mengandalkan pemerintah saja amat terbatas baik dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial (Widaningsih, 2017). Untuk itu juga diperlukan aktor lainnya yang lebih luas selain dari peran pemerintah lokal maupun nasional baik di sektor private maupun kemasyarakatan/*Civil Society Organization* (Harsasto, 2012).

Melihat hal tersebut, untuk mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan agar berhasil menjadi Daerah Otonomi Baru tentunya perlu mengakomodir para pelaku usaha di Garut Selatan. Hal ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi lokal yang

terpusat dan tertata yang terfokus pada wilayah Garut Selatan, karena hal tersebut dirasakan saat kondisi seperti sekarang, tidak maksimalnya sektor usaha terutama dalam mendistribusikan hasil bumi karena Kabupaten Garut memiliki wilayah yang luas serta jarak ke pusat kota yang begitu jauh.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Gunawan Undang sebagai Ketua Presidium Masyarakat Garut Selatan yang mengatakan bahwa, Garut Selatan memiliki potensi ekonomi yang tinggi hal ini bisa dilihat dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Tetapi karena belum tertata dan terkelola dengan baik, sumber daya alam ini hanya bisa dimanfaatkan sebagian kecil saja, padahal banyak yang bisa dimanfaatkan baik dari hasil perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan dan yang lainnya. Namun hal ini juga perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah terutama mendukung penyediaan infrastruktur maupun non infrastruktur. Misalnya saja dari empat triliun lebih APBD Kabupaten Garut sekitar 80% lebih habis untuk belanja pegawai, sedangkan infrastuktur sekitar 15% dibagi 42 kecamatan di garut, 15 kecamatan ada di wilayah Garut Selatan, hal tersebut tentunya tidak akan cukup apalagi untuk Garut Selatan yang memang perlu diperhatikan dalam pengadaan infrastuktur yang mendukung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Maka dari hal tersebut akan berbeda ketika sudah dibentuk menjadi Kabupaten garut Selatan, pengelolaan anggaran dan distribusi anggaran akan terfokus dan terakomodir di setiap wilayah di Garut Selatan yang tidak hanya memprioritaskan wilayah kota saja tetapi sampai ke wilayah pedesaan dan pelosok, sehingga aktivitas usaha bisa berkembang pesat dengan akses infrastuktur yang memadai dan akses lokasi atau perjalanan yang tidak terlalu jauh. Maka kedepan, dengan adanya pembentukan kabupaten baru ini akan memberikan hasil yang diharapkan khususnya untuk masyarakat di Garut Selatan yang salah satunya melalui pengembangan potensi alam yang dimiliki untuk dikelola dengan baik yang akan bernilai ekonomis dalam meningkatkan perekonomian di Garut Selatan (Suminar et al., 2007).

Tabel 2. Potensi Komoditas Unggulan dan Prospektif di Garut Selatan

N o	Sub- Sektor	Kelompok	Komoditas	Lokasi
1	Pertanian	Pangan	Padi	Bungbulang, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Talegong, Pakenjeng, Cisewu.
			Jagung	Peundeuy, Cikajang, Cihurip, Pamulihan, Pakenjeng.
			Kedelai	Csompét, Peundeuy, Cibalong, Cisewu.
		Hortikultura	Cabe	Talegong, Bungbulang, Cihurip, Banjarwangi, Cisewu, Cikajang.
			Kentang	Pamulihan, Cikajang.
			Pisang	Pameungpeuk, Cibalong, Cisompét, Cihurip, Cisewu, Bungbulang, Mekarmukti, Cikelet, Pamulihan.
Jeruk	Pakenjeng, Cibalong, pameungpeuk, Cikajang, Cisompét, Cikelet.			
2	Perkebunan		Aren	Bungbulang, Pakenjeng, Cisompét, Cikajang, Cisewu, Caringin, Talegong, Cihurip, Banjarwangi.
			Teh	Cikajang, Cilawu, Pakenjeng, Pamulihan, Singajaya, Banjarwangi, Pakenjeng.
			Kelapa	Cibalong, Cikelet, Bungbulang, Pamengpeuk, Caringin.
			Nilam	Talegong.
			Tembakau	Pekenjeng, Peundeuy, Singajaya, Pamulihan, Cikajang, Banjarwanagi.
			Karet	Pameungpeuk, Cisompét, Caringin, Cibalong, Mekarmukti, Bungbulang, Pakenjeng.
Kopi	Pamulihan, Cikajang, Pakenjeng, Bungbulang, Cihurip, Talegong.			
3	Perikanan	Laut	Udang, kerapu, lobster	Pameungpeuk, Cibalong.
			Rumput Laut	Pameungpeuk, Cibalong.
			Ikan hias	Cikelet.
4	Peternakan	Ruminansia besar	Sapi perah	Cisurupan Cikajang Cilawu, Banjarwangi.
			Sapi potong	Cikelet, Cibalong, Cisompét, Pameungpeuk, Bungbulang.
			Domba	Cilawu, Bungbulang, Cibalong, Cikajang, Singajaya, Cisewu.
			Kambing	Pameungpeuk, Cikelet, Cibalong, Bungbulang, Singajaya.

Sumber : Jenny, (2007) dan Ade Bastiawan (2012) diolah tahun 2020

Dari tabel 2 potensi komoditas unggulan dan prospektif di Garut Selatan, dapat dilihat bahwa Garut Selatan memiliki potensi komoditas unggulan baik dari pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang sangat beragam dan sangat potensial untuk dikembangkan, yang tersebar di kecamatan-kecamatan di wilayah Garut Selatan.

Selain dari itu pada sektor usaha di Garut Selatan juga memiliki potensi wisata pantai yang bisa menghasilkan beragam jenis usaha sesuai dengan kondisi pesisir wilayah pantai seperti: Santolo, Karangparanje, Sayangheulang, Pantai Cibalong, Gunung Geder, Cijeruk Indah, Manalusu, Cicalobak, Puncak Guha dan Rancabuaya (Djuwendah et al., 2013). Potensi

sumberdaya alam yang dimiliki oleh Garut Selatan bisa menjadi penopang dalam perekonomian dan pembangunan di Garut Selatan. Namun pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki tidak terorganisir oleh pemerintah daerah membuat kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar tidak berkembang pesat, apalagi sumberdaya alam yang bisa membuka daya tarik yang menjanjikan dalam pariwisata sehingga membantu meningkatkan pemasukan daerah (Okparizan et al., 2019).

Oleh karena itu sangat perlu mengorganisir kembali sumber daya alam Garut Selatan baik sektor pertanian, peternakan perkebunan, pariwisata, gunung, rimba, laut, sungai dan lainnya, khususnya bidang usaha unggulan yang dimiliki Garut Selatan dengan potensi dan peluang investasi yang besar untuk mengembangkan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut Selatan (Widaningsih, 2017).

Masyarakat Civil (*civil society*)

Berkaitan dengan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan, aktor masyarakat sangat berpengaruh dalam mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan, karena kebijakan yang diambil harus berdasarkan pada partisipasi masyarakat yang berangkat dari masalah yang berkembang, untuk dicarikan solusi dengan adanya kebijakan yang dibuat (Sadhana, 2011).

Hasil wawancara dengan Nanat Fatah Natsir salah satu akademisi dan juga sebagai tokoh masyarakat Garut Selatan yang mengatakan bahwa Pembentukan Garut Selatan sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat, dimana sejak awal tahun 2004 mulai ada temuan-temuan yang didapat berkaitan dengan rencana pembentukan Kabupaten Garut Selatan, yang merupakan upaya yang bermula dari masyarakat sendiri, karena merasakan keresahan dalam aspek pelayanan yang tidak maksimal di wilayah Garut Selatan, mengingat akses dari pusat yang jauh serta rentang kendali yang luas, karena Garut Selatan memiliki wilayah yang luasnya setengah dari Kabupaten Garut.

Maka hal tersebut menjadi salah satu alasan Kabupaten Garut Selatan

perlu dibentuk agar memudahkan pemerintah dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya di Garut Selatan, selain itu memudahkan akses ke pusat kota yang tidak terlalu jauh. Hal tersebut mendapat respon dari para tokoh masyarakat sehingga berperan langsung dalam menghimpun dan menggerakkan masyarakat untuk membuat kesepakatan bersama yakni berupaya sekuat tenaga melakukan pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan. Tokoh masyarakat yang berperan dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan diwadahi dalam satu forum Presidium Masyarakat Garut Selatan yang fokus mengkaji pembentukan Garut Selatan, sebagai representasi dari masyarakat Garut Selatan secara umum. Presidium masyarakat Garut Selatan memiliki tanggungjawab yang besar untuk memegang amanat masyarakat Garut Selatan untuk mengupayakan terlaksananya pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan sebagai jembatan penghubung dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah secara *Bottom-up*, selain itu juga melakukan lobi-lobi baik ke pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi bahkan pusat, untuk menjalin sinergitas berkaitan dengan aspirasi dan harapan yang diinginkan masyarakat Garut Selatan dalam mewujudkan pembentukan Kabupaten Garut Selatan (Ramdhani, 2020).

Selain itu hasil wawancara dengan Gunawan Undang selaku Ketua Presidium Masyarakat Garut Selatan, mengatakan bahwa perjuangan dalam mengupayakan pembentukan Daerah otonomi Baru Garut Selatan sudah berjalan sekitar 16 tahun, yakni pada tahun 2004-2020, dengan dilakukannya persiapan satu tahun, yang kemudian pada tahun 2005 diadakan rebug masyarakat Garut Selatan yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Garut, maka terbentuklah organisasi inisiator pendirian Kabupaten Garut Selatan yakni Presidium Masyarakat Garut Selatan atas prakarsa Forum Mahasiswa Garut Selatan (FORMAGAS) dan Forum Pengkajian dan Pengembangan Garut Selatan (FPPGS), dengan jumlah presidium terdiri dari 5 orang, yaitu satu ketua dan empat anggota, yang dibantu sekretariat sekjen

dan bendahara umum. Selain itu ada juga organ taktisnya yakni KP2KGS (Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan). Presidium juga dibantu oleh koordinator wilayah (korwil) yang membawahi kordinator desa (kordes) yang memiliki tugas membantu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan presidium diantaranya ketika menyelesaikan revisi/perbaikan data, mengumpulkan data-data yang diperlukan dan laporan.

Dari hasil wawancara dengan Dedi Kurniawan selaku anggota Presidium Masyarakat Garut Selatan, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk pembentukan Garut Selatan sudah dilakukan cukup lama sejak tahun 2004, yang diawali pada tahapan persetujuan bersama dari pihak desa Garut Selatan, kemudian pihak Bupati Kabupaten Garut, kemudian pihak DPRD Kabupaten Garut dan terakhir sudah masuk daftar calon daerah yang akan dimekarkan pada kajian DPR RI serta menunggu pengesahan dari Presiden.

Namun terjadinya pemberlakuan kebijakan moratorium yang menghambat Kabupaten Garut Selatan menjadi daerah otonomi baru. Hingga saat ini, pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan mengalami hambatan dengan terjadinya beberapa kali perubahan kebijakan/regulasi, yakni perubahan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang diganti oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diganti lagi oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan perubahan data yang harus disiapkan dan perubahan kriteria dari peraturan yang mengalami perubahan, selain itu juga diakibatkan oleh dinamika politik di Kabupaten Garut yakni pergantian beberapa kali Bupati, serta ditambah dengan kebijakan moratorium Pemerintah Pusat yang semakin mempersulit daerah-daerah untuk melakukan pemekaran (Tryatmoko, 2016).

Pada tahun 2011 berkenaan dengan usulan pembentukan Kabupaten Garut Selatan sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Garut, Bupati Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kemudian

ditindaklanjuti melalui surat dari Gubernur Jawa Barat kepada Presiden RI Nomor: 135/1125-Otdaksm/2011, perihal usulan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan pada tanggal 09 Maret 2011 yang diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Mendagri (Menteri Dalam Negeri) RI. Dari usulan tersebut maka Presiden RI menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) Nomor: R-66/Pres/12/2013 perihal 65 Calon Daerah Otonomi Baru termasuk di dalamnya Kabupaten Garut Selatan. Atas dasar surat amanat presiden tersebut, maka DPR RI menerbitkan keputusan Nomor: LG/11230/DPR RI/X/2013 tentang penetapan RUU (Rancangan Undang-Undang) 65 Calon Daerah Otonomi Baru termasuk didalamnya Kabupaten Garut Selatan. Selain itu juga disetujui oleh DPD RI terhadap usulan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan yang termaktub dalam pandangan DPD RI terhadap RUU pembentukan DOB Garut Selatan dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Komite I Masa Sidang IV tahun sidang 2013-2014 pada sidang paripurna ke-12 DPD RI tanggal 14 Mei 2014. Namun dalam Sidang Paripurna Pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru pada tanggal 29 September 2014 DPR RI membatalkan 21 DOB yang sebelumnya sudah disetujui pemerintah tanpa alasan yang jelas, karena keputusan tersebut tidak mengacu pada landasan hukum UU No. 23 tahun 2004, PP 78 2007 dan Ampres No: R-66/Pres/12/2013.

Hingga akhirnya RUU DOB tersebut gagal disahkan oleh DPR RI Periode 2009-2014 dan menyerahkan pembahasan RUU tersebut untuk ditindaklanjuti oleh anggota DPR RI Periode 2014-2019, sementara pada periode tersebut kembali mengalami perubahan dasar hukum dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014 pengganti UU No. 32 Tahun 2004, dan hasilnya pembentukan DOB Garut Selatan gagal dibentuk dan harus menyesuaikan kembali dengan aturan yang baru. Tidak sampai disitu, hambatan dalam pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 adalah belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan/petunjuk teknis pembentukan calon DOB hingga sekarang (sudah 6 tahun sejak

diberlakukannya UU tersebut). Padahal sejak tahun 2017 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah sudah selesai dibuat Kemendagri, selain itu juga hambatan lainnya selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi tetap melaksanakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru.

Namun demikian, hal tersebut tidak mengurungkan niat dan cita-cita besar masyarakat Garut Selatan, yang tetap berupaya mengupayakan pembentukan kabupaten Garut Selatan dengan menempuh kembali pembaharuan data yang mendukung sebagai syarat untuk dilakukannya pembentukan Garut Selatan yang terdiri dari 15 kecamatan yakni: Singajaya, Mekarmukti, Cihurip, Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Caringin, Cisewu, Bungbulang, Pendeuy, Pamulihan, Talegong, Banjarwangi, Pakenjeng dan Cisompet. Kedepan harapan dari pembentukan Garut Selatan ini dapat memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat yang lebih baik dan pelayanan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di wilayah Garut Selatan.

Pada perkembangan terakhir ditahun 2019-2020 sambil menunggu pencabutan kebijakan moratorium dan penetapan kedua RPP tersebut, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Sekda Jawa Barat No: 100/2810/Pemksm tentang Fasilitas Penataan Daerah, pengusulan DOB harus melengkapi Persyaratan Dasar Kewilayahan, Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah dan Persyaratan Administrasi (dilengkapi dengan melampirkan hasil kajian terbaru minimal 5 tahun terakhir), yang intinya usulan pembentukan DOB Garut Selatan harus mengalami revisi lagi untuk kedua kalinya.

Setelah melakukan revisi dengan persetujuan Kepala Desa dan BPD se-Garut Selatan yang terdiri dari 15 Kecamatan pada bulan Oktober-November 2019 berkaitan dengan memenuhi syarat administrasi dan kewilayahan lainnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, maka pada tanggal 31 Desember 2019 dalam sidang Paripurna DPRD kabupaten Garut menyetujui Pembentukan Kabupaten Garut Selatan, dan kemudian DPRD Kabupaten Garut

dan Bupati Kabupaten Garut menyetujui revisi usulan tersebut sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut, No: 188.34/1113-PB-DPRD/2019 dan No: 188.34/3758/Pb-Tapem/2019 tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Garut Selatan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014. Kemudian dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat menyetujui pembentukan Kabupaten Garut Selatan, dan pada tanggal 4 Desember 2020 dilakukan persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan dibahas dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.

Gunawan Undang Selaku Ketua Presidium juga menegaskan bahwa dilihat dari analisis kebijakan publik, maka sebaiknya perubahan-perubahan regulasi pembentukan DOB dari UU No. 22/1999 ke UU No. 32/2004 lalu ke UU No. 23/2014 harusnya memperhatikan asas keadilan bagi daerah-daerah yang sudah memenuhi persyaratan untuk pembentukan berdasarkan UU yang lama. Namun sayangnya daerah yang sudah memenuhi persyaratan pembentukan pada UU sebelumnya tidak diatur kembali pada UU berikutnya, akhirnya daerah-daerah yang sudah layak terus menerus melakukan perubahan data yang tidak ada ujungnya, hal ini mempersulit daerah untuk dimekarkan.

Maka dari itu Presidium masyarakat Garut Selatan, berusaha untuk memperjuangkan pencabutan moratorium pembentukan calon daerah otonomi baru dan memperjuangkan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah sebagai turunan dari UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta membangun kerjasama dengan legislatif, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar segera terbentuknya Kabupaten garut Selatan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Garut Selatan dengan semua tokoh-tokoh yang tergabung untuk mencapai tujuan yang diharapkan, karena pembentukan Kabupaten Garut Selatan sudah lama yakni 16 tahun, bukan waktu yang sebentar dan juga sudah amat dinantikan masyarakat di Garut Selatan untuk memperoleh haknya

mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Pemerintah (*government*)

Peran Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam pembentukan Kabupaten Garut Selatan, memiliki peranan penting dalam mengakomodir aspirasi masyarakat di wilayah Garut Selatan. Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk menciptakan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah yang harus dirasakan langsung oleh masyarakatnya, terlebih lagi bagi masyarakat di Garut Selatan yang belum optimal mendapat uluran tangan dari pemerintah, khususnya bagi daerah-daerah pedesaan dan pelosok yang memiliki akses yang jauh ke pusat kota serta fasilitas infrastruktur yang belum terbangun dengan baik.

Maka dari itu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif dalam melakukan pembentukan Kabupaten Garut Selatan, yang secara teknis aturan pembentukan Daerah Otonomi Baru dimuat dalam PP No. 129 tahun 2000 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang merupakan turunan atau petunjuk teknis dari UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Yang kemudian diperbaharui kembali menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan turunan teknisnya adalah PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Adapun faktor yang harus terpenuhi dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru diantaranya: faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan dan keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali.

Namun pada tahun 2014 terjadi perubahan kembali dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang sampai saat ini belum disahkan petunjuk teknisnya dan masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP

tentang Desain Besar Penataan Daerah. Hal tersebut menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah khususnya DPRD Kabupaten Garut untuk mendorong kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar secepatnya melakukan pembahasan pengesahan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) serta pembahasan pencabutan moratorium yang menghambat pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan.

Dari hasil wawancara dengan Toni sebagai Kasubag Tata Pemerintahan Kabupaten Garut yang mengatakan bahwa dalam melakukan pembentukan Kabupaten Garut Selatan ditingkat paling kecil harus adanya keputusan bersama melalui musyawah desa (musdes), secara menyeluruh di desa-desa yang merupakan daerah persiapan pembentukan Kabupaten Garut Selatan, baru diajukan ke DPRD untuk selanjutnya mendapat persetujuan dari DPRD dan Bupati Kabupaten Garut.

Pada puncaknya di bulan Desember 2019, DPRD Kabupaten Garut telah melaksanakan rapat paripurna yang menghasilkan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD untuk menyetujui pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Adapun untuk persyaratan pembentukan sudah diserahkan ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hasil wawancara lainnya yakni dengan Enan, selaku wakil DPRD Kabupaten Garut yang mengatakan bahwa, DPRD sudah menyetujui untuk dilakukan pembentukan Kabupaten Garut Selatan melalui sidang paripurna. Adanya pembentukan Kabupaten Garut Selatan sebagai solusi atas kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka ketika nanti sudah dicabutnya kebijakan moratorium, pembentukan Kabupaten Garut Selatan sudah dipersiapkan, apalagi melihat antusias masyarakat yang besar dengan adanya pembentukan Kabupaten Garut Selatan, karena hal ini dapat membuka ruang pekerjaan yang membantu dalam menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Garut Selatan.

Wawancara lainnya dengan Bupati Garut, Rudi Gunawan mengatakan bahwa pemerintah daerah akan berupaya mempersiapkan pembentukan

Kabupaten Garut Selatan menjadi kabupaten baru, dengan menyediakan anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Garut yang dibantu oleh anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kajian kelayakan dan kapasitas daerah Garut Selatan untuk menjadi Otonomi Baru. Selain itu bersumber dari Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut tahun 2019 anggaran dari Pemerintah Kabupaten Garut sebagai Kabupaten Induk memberikan bantuan anggaran yang akan dipergunakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persiapan Kabupaten Garut Selatan paling kurang sebesar Rp. 15.000.000.000, (Lima Belas Miliar Rupiah) per tahun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian daerah persiapan. Hal tersebut dapat membantu dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan roda pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik (Herlintati et al., 2020).

Dalam pengelolaan anggaran yang baik akan berpengaruh baik pula pada output yang dihasilkan, mengingat anggaran merupakan hal penting dalam menyelenggarakan pemerintahan. Mengelola dan mendistribusikan anggaran dengan baik merupakan kewajiban pemerintah sebagai kinerja yang dilakukan yang semata-mata untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat (Miftah et al., 2019). Selain daripada itu, bersumber dari Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut tahun 2019 dalam mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan ialah dengan adanya rencana penyerahan aset yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Garut yang mencapai Rp. 867.936.851.044,56 (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Koma Lima Puluh Enam Rupiah), untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan bagi calon daerah persiapan Kabupaten Garut Selatan nantinya. Aset daerah ini merupakan salah satu faktor yang mendukung ketahanan daerah untuk menjalankan penyelenggaraan suatu lembaga pemerintah (Alexandri et al., 2017). Maka

dalam hal ini pembentukan Daerah Otonomi Baru masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah baik bantuan anggaran dari pemerintah induk bahkan dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desentralisasi yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia (Heldi & Zelika, 2020).

Adanya dukungan anggaran dan aset diatas merupakan keseriusan dari pemerintah Daerah Kabupaten Garut Sebagai daerah induk dalam mendukung pembentukan daerah Otonomi Baru Garut Selatan sebagai upaya untuk memaksimalkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Garut Selatan serta pemerataan pembangunan baik infrastruktur dan lainnya, agar memudahkan masyarakat setempat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Aktor-Aktor Politik Pembentukan Garut Selatan

Pembentukan Garut Selatan menjadi Daerah Otonomi Baru, tidak terlepas dari peranan aktor-aktor politik yang berada dibalik layar yang memiliki kepentingan untuk melakukan percepatan pembentukan Garut Selatan. Baik aktor Akademisi, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Masyarakat. Aktor ini memiliki kepentingan bersama untuk mendukung pembentukan Garut Selatan, yang sudah cukup lama diperjuangkan sejak tahun 2000-an.

Aktor-aktor politik ini melakukan jejaring dengan memerankan peranannya masing-masing sebagai upaya mempengaruhi kebijakan untuk mengesahkan Garut Selatan menjadi Kabupaten Baru di Jawa Barat. Aktor akademisi di Garut Selatan memiliki kepentingan untuk mengembangkan dunia pendidikan di Garut Selatan, baik pendidikan sekolah dasar bahkan perguruan tinggi, mengingat masih minimnya jumlah sekolah dan perguruan tinggi di Garut Selatan serta kualitas pendidikan dan dukungan infrastruktur di Garut Selatan, maka hal ini perlu dilakukan pembentukan Garut Selatan untuk lebih memfokuskan dalam memaksimalkan kualitas pendidikan. Adanya kepentingan ini, para akademisi di Garut Selatan melakukan langkah-

langkah kongkrit dengan membangun komunikasi dengan para akademisi lain dan pimpinan perguruan tinggi atau yayasan pendidikan di Garut Selatan untuk bersama-sama memperjuangkan pembentukan Garut Selatan, dengan melakukan analisis secara ilmiah berkaitan dengan potensi yang dimiliki Garut Selatan untuk dimekarkan.

Aktor Politik yang memiliki kepentingan lainnya adalah pemerintah daerah Kabupaten Garut dan DPRD Kabupaten Garut, dimana ketika Garut Selatan dimekarkan, maka akan ada banyak peluang jabatan-jabatan yang harus diisi, mengingat Garut Selatan memiliki luas wilayah setengahnya dari keseluruhan wilayah Kabupaten Garut dengan potensi alam yang sangat kaya, maka hal ini akan menjadi peluang besar untuk dikembangkan menjadi kabupaten baru, sehingga dapat menyediakan jabatan-jabatan baru di Garut Selatan.

Selain itu aktor politik yang memiliki kepentingan pembentukan Garut Selatan adalah Tokoh masyarakat yang tergabung dalam forum Presidium Masyarakat Garut Selatan, yang sangat bersemangat dan terus mendorong pembentukan Garut Selatan, dengan menggerakkan masyarakat Garut Selatan melakukan deklarasi mendukung untuk memisahkan diri dari Kabupaten Garut dengan membentuk Kabupaten Garut Selatan. Hal ini karena masyarakat Garut Selatan merasa tidak diperhatikan secara menyeluruh dalam aspek pelayanan dari pemerintah Kabupaten Garut, oleh sebab itu ketika dibentuknya Kabupaten Garut Selatan, maka pelayanan yang dilakukan akan lebih menyeluruh ke semua daerah, mengingat jarak daerah-daerah Garut Selatan ke pusat kota yang menempuh waktu sangat lama.

Keuntungan Pengusaha sebagai aktor politik juga memiliki tujuan yang sama mendukung disahkannya pembentukan Garut, dimana potensi sumber daya alam yang dimiliki Garut Selatan menjadi suatu aset besar ketika dikelola dengan baik dan menjadi magnet untuk menarik para investor dalam mengembangkan usaha di Garut Selatan. Dengan mengundang para investor masuk untuk menanamkan modal dalam mengembangkan usaha di Garut

Selatan, baik dari bidang perkebunan, perikanan dan kelautan serta pariwisata dapat meningkatkan perekonomian dan pemasukan pada daerah Garut Selatan.

SIMPULAN

Terdapatnya aktor-aktor yang berkolaborasi secara *Quadruple Helix* untuk mendukung Pembentukan Daerah Otonomi Baru Garut Selatan, diantaranya Akademisi yang secara kongkrit mendukung pembentukan Garut Selatan, dengan menghimpun dan mengakomodir para akademisi di Garut Selatan untuk bekerjasama mendukung pembentukan Garut Selatan dengan melakukan analisis kajian potensi yang dimiliki Garut Selatan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru. Tindakan kongkrit yang dilakukan Pengusaha untuk mendukung pembentukan Garut Selatan, yakni dengan bersinergi dengan pelaku usaha lain baik bidang pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata melakukan penguatan dan pengembangan komoditas unggulan Garut Selatan yang memiliki nilai dan daya tarik untuk mendatangkan investor dalam menanamkan modal di Garut Selatan. Tindakan kongkrit lainnya yang dilakukan yaitu oleh Tokoh Masyarakat dengan membentuk Forum Presidium Masyarakat Garut Selatan, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Garut Selatan, sebagai wadah untuk menghimpun semua aspirasi masyarakat Garut Selatan dalam mendukung pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Terakhir tindakan kongkrit yang dilakukan yakni oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Garut dan DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan menyetujui berkas pembentukan Kabupaten Garut Selatan dan memberikan dukungan anggaran untuk mendukung Pembentukan Garut Selatan.

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Pusat sebagai pemangku kebijakan tertinggi perlunya memasukkan pembahasan pembentukan Daerah Otonomi Baru sebagai agenda kebijakan yang diprioritaskan untuk membantu menjalankan kewenangan pusat dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. B., Pragiwani, M., & Laiela, D. (2017). Performance of Sharia Mutual Fund: The Analysis of Asset Allocation in Indonesia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8(3), 163–169. <https://doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n3p163>
- Asmaria, A., Dewi, L. K., & Akbar, M. F. (2020). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Gemma Tapis Berseri Di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. *Khazanah Sosial*, 2(1), 1–14.
- Athahirah, A. U., & Lambelanova, R. (2019). Kesiapan Pemekaran “Kabupaten Renah Indojati” Di Provinsi Sumatera Barat. *Sosiohumaniora*, 21,(1), 58–64. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.14363>
- Basyir, A. (2014). The Importance of Academic Script in the Statutes Formatting To Realize Aspirasional and Responsive. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 285–306.
- BPS. (2018). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut*.
- Djuwendah, E., Hapsari, H., Renaldy, E., & Saidah, Z. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Garut. *Sosiohumaniora*, 15(2), 211–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5744>
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92–99.
- Hakim, A. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM FEKON)*, 4,(1), 843–857.
- Harsasto, P. (2012). Desentralisasi dan Kerjasama Pemerintah-Swasta. *Forum*, 40(1), 1–6.
- Heldi, H., & Zelika, Y. Z. (2020). Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 48–60.
- Herlintati, H., Kusumastuti, H., & Akbar, M. F. (2020). Kemampuan Aparat Pemerintahan Kelurahan dalam Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan di Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 13–34.

- Karangtri, A. M. (2019, September). Masyarakat Garut Selatan Ingin Percepatan Pemekaran. *Kompas.Com*.
- Maman, Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2016). Agenda Setting Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. *Cosmogov (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 2,(1), 67–94.
- Miftah, A. Z., Sugandi, Y. S., & Sukarno, D. (2019). Importance Performance Analysis Kualitas Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 91–104.
- Mulyana, S., & Sutapa, S. (2014). Peningkatan kapabilitas inovasi, keunggulan bersaing dan kinerja melalui pendekatan quadruple helix: Studi pada industri kreatif sektor fashion. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 13(3), 304–321.
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81.
- Okparizan, O., Sumaryana, A., Muhafidin, D., & Sugandi, Y. S. (2019). Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Desa : Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 9. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.773>
- Rachaju, K. (2019). Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Membangun Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Pedesaan. *Sosiohumaniora*, 21,(1), 17–21. <https://doi.org/DOI:10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11974>
- Ramdhani, H. (2020). Peran Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon. *Jurnal MODERAT*, 6, 1–13.
- Ranga, M., & Etzkowitz, H. (2013). Triple Helix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge Society. *Industry and Higher Education*, 27(4), 237–262.
- Sadhana, K. (2011). *Realitas Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- Santika, R. H., Santosa, B., & Mahmudi, H. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah)*, 3,(1), 15–23. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.24905/jip.v3i1.868>
- Suherman, D. (2017). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati*

Garut Nomor 511.3/Kep. 528. Admrek/2015 terhadap Efektivitas Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Suherman, D. (2020a). Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 75–86.

Suherman, D. (2020b). Penyelenggaraan E-Government di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 101–111.

Sulaksono, H. (2018). Roadblock Implementasi Peran Quadruple Helix dalam Upaya Meningkatkan Kapabilitas Inovasi dan Keunggulan Bersaing. *STIE Mandala*, 366–381.

Suminar, J. R., Mariana, D., & Paskarina, C. (2007). Studi Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Garut Bagian Selatan. *Laporan Penelitian, Peneliti Muda UNPAD, Lembaga Penelitian UNPAD.*

Syarifudin, D., & Herlina, E. (2011). Analisis Kemandirian Kinerja Kewilayahan Garut Selatan Menjadi Wilayah Otonomi Baru (DOB) : Studi Pemekaran Daerah Garut Selatan di Kabupaten Garut. *Jurnal Pemasaran Dan Sumberdaya Manusia*, 13(2), 49–66.

Tilano, F., & Suwitri, S. (2019). *Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang.* 1–18.

Tryatmoko, M. W. (2016). Problematika Penggabungan Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*, 8(2), 1–12.

Wahyu, S., & Hana, L. (2017). The Quadruple Helix Model: Enhancing Innovative Performance Of Indonesian Creative Industry. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 6(11), 90–94.

Widaningsih, M. (2017). Roadmap Pengembangan Penanaman Modal Wilayah Garut Selatan Kabupaten Garut. *Majalah Ilmiah Bijak*, 14(02), 1–13.

Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas

Political Actor and Collaboration Quadruple Helix in the Formation of the New Autonomous Region of South Garut Regency

Hasse Jubba^{1*}, Muh Rafi², Zuly Qodir³

^{1,3}Politik Islam-Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta, 55183, Indonesia

² Magister Ilmu Pemerintahan - Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: hasse@umy.ac.id

Diterima: 6 Februari 2021; Direvisi: 26 Februari 2021; Disetujui: 1 Maret 2021

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana identitas Melayu Riau dikonstruksikan dalam upaya mewujudkan budaya melayu yang berintegritas. Melalui observasi dan studi kepustakaan serta studi dokumentasi ditemukan beberapa upaya yang mendukung keberlangsungan identitas Melayu di tengah berbagai tantangan saat ini. Analisis artikel ini disandarkan pada data yang diperoleh dari kebijakan mengenai upaya mempertahankan budaya Melayu. Demikian pula, dilakukan wawancara untuk mengetahui sikap masyarakat mengenai dinamika budaya Melayu saat ini. Selain itu, data juga diperoleh dari naskah Gurindam Dua Belas yang hingga saat ini masih diperpegangi oleh masyarakat Melayu. Artikel ini menegaskan bahwa tiga hal terkait dengan identitas Melayu Riau. Pertama, identitas Melayu dipertahankan melalui berbagai upaya, termasuk legitimasi kultural melalui kerjasama antara Lembaga Adat Melayu (LAM) dengan pemerintah daerah. Kedua, terdapat stigma terhadap identitas Melayu yang direspons dengan upaya membangkitkan kembali identitas secara utuh melalui berbagai simbol. Ketiga, identitas Melayu senantiasa diidentikkan dengan Islam sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ia tidak saja merupakan identitas kultural, tetapi juga agama. Ketiga hal tersebut, dalam perspektif teoretis dikenal dengan konstruksi identitas yang mencakup identitas legitimasi, resisten, dan proyek. Artikel ini merekomendasikan perlunya dilakukan berbagai kajian mengenai identitas lokal di Indonesia untuk dijadikan dasar pembangunan secara lebih luas sehingga tidak terjadi gesekan antara nilai-nilai lokal dengan semangat pembangunan yang lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai modernitas.

Kata Kunci: Politik identitas, konstruksi, budaya Melayu, modernisasi

ABSTRACT

This article aims to explain how the Riau Malay identity is constructed to establish an integrity Malay culture. Observation, literature study, and

documentary studies data showed several efforts to support the Malay culture's continuity among various challenges faced. This article emphasizes three things related to the Riau Malay identity. First, the Malay identity is maintained through various efforts, including cultural legitimacy through cooperation between LAM and local governments. Second, the stigma on Malay identity is responded to revive the Malay identity holistically through various symbols. Third, Malay identity is always identified with Islam to show that it is a cultural identity and a religious (Islam) identity. In a theoretical perspective, these three things are known as the construction of identity, which includes legitimacy, resistance, and project identities. This article recommends the need for various studies on Indonesia's local identities as a basis for the development of Indonesia in general. It is required to avoid conflict between local values and the spirit of development, which tends to adopt modernity values.

Keywords: Political identity, construction, Malay culture, modernism

PENDAHULUAN

Pemekaran daerah dapat dilihat sebagai salah satu bentuk politik identitas karena juga mengusung isu ketimpangan baik ekonomi, politik maupun sosial (Abdullah, 2017; Erman, 2018). Era Reformasi menjadi masa di mana penguatan identitas kedaerahan kembali menguat setelah terhegemoni di masa Orde Baru. Tekanan budaya dan politik oleh pemerintah Orde Baru telah menyebabkan melemahnya komunitas-komunitas khususnya Melayu. Situasi ini tercipta karena pemerintah Orde Baru melakukan homogenisasi budaya yang berkontribusi pada Jawanisasi, identitas melayu terkikis sampai reformasi datang (Alfarabi et al. 2019). Menguatnya identitas kedaerahan (lokal) pada prinsipnya membawa atmosfir baru pada perubahan-perubahan strategi sebuah identitas. Bahkan, identitas kesukuan misalnya, dijadikan alat politik dalam rangka menunjukkan eksistensi budaya pada satu sisi, dan menunjukkan perjuangan di sisi lain. Politik identitas pada dasarnya bukanlah hal baru karena memiliki akar kuat khususnya di Indonesia (Fautanu, et al, 2020).

Keberlangsungan budaya Melayu merupakan tantangan besar, karena meskipun masih kuat, posisinya saat ini kurang strategis dan pengaruhnya mulai menurun (Abdullah, 2017). Reformasi telah memungkinkan penduduk Riau Melayu untuk terus menunjukkan kehadiran mereka di daerah mereka sendiri (Alfarabi et al. 2019; Alfarabi, 2019; Alfarabi, Antar Venus, Nuryah Asri

Syafirah, 2019). Etnik Melayu sebagai sebuah komunitas, memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan format politik Melayu, bukanlah komunitas yang merupakan bagian dari sistem politik berbasis ideologi kerajaan yang cenderung otoriter (Jaya, 2019). Penolakan Presiden Soeharto terhadap hasil pemilihan Gubernur Riau tahun 1985 yang memenangkan seorang putra pribumi menjadi sebuah monumen yang selalu dikenang karena sikap otoriter Orde Baru yang telah menyangkal kehendak mayoritas rakyat Riau (Rozi, 2018). Malaysia dan Indonesia, saat ini terlihat kurang memahami latar belakang sejarah kedua negara. Sebagian besar tantangan sosial dan korporasi baru-baru ini lahir dari kebingungan budaya, sehingga kekhawatiran kecil pun akan menyebabkan kebakaran dan nyala api yang tidak cepat padam (Zed, 2015). Dalam arti modernitas, peradaban Melayu, yang telah menetapkan warisannya, akan menjadi lebih canggih dan pada saat yang sama dapat mendominasi peradaban besar dunia jika ia dapat mengubah sesuatu dari dominasi menjadi budaya hegemonik (Sanusi, 2017). Orang-orang Melayu ingin warisan mereka dilindungi oleh kebijakan pemerintah daerah dan tidak digunakan untuk politik praktis (Asrinaldi, 2018).

Kajian mengenai Melayu telah banyak dilakukan oleh para ahli dengan melihat dari berbagai aspeknya seperti aspek sejarah (Ahmad, 1979; Nordin, 2017; Putra, 2016) yang melihat bagaimana Melayu eksis dan menjadi embrio bangsa Indonesia. Kajian lain melihat Melayu dalam hubungannya dengan Islam (Abd Rani, 2005; Mashitah Sulaiman, 2013; Stapa & Shahrudin, Noranizah Yusuf, 2012; Tamuri & Jasmi, 2009; Zakaria, 2012). Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa Melayu adalah bagian penting dari Islam sehingga terjadi pengidentikan keduanya dan berlangsung sampai saat ini. Kajian lain mengenai Melayu melihat dari sisi diaspora (Abdullah & Abdul Fattah, 2013; Samin, 2015; Sanusi, 2017). Kajian-kajian ini menempatkan Melayu tidak saja sebagai etnis yang menjadi cikal-bakal bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai budaya yang banyak memiliki hubungan dengan berbagai wilayah khususnya di Asia Tenggara. Hanya saja, kajian-kajian tersebut belum melihat bagaimana

budaya Melayu dikonstruksikan sebagai sebuah identitas yang menghadapi ancaman di era modern ini. Kajian ini dititik-beratkan pada upaya apa yang dapat dilakukan dalam mewujudkan budaya Melayu yang berintegritas di tengah berbagai pengaruh luar yang sangat masif saat ini.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana budaya Melayu dikonstruksikan termasuk bagaimana dipertahankan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan. *Pertama*, bagaimana identitas Melayu dilegitimasi sebagai sebuah budaya yang eksis dengan sejumlah tantangannya. *Kedua*, bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh internal Melayu dalam rangka menghadapi ancaman-ancaman saat ini. *Ketiga*, upaya seperti apa yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi identitas/budaya Melayu di era modern ini. Artikel ini disandarkan pada asumsi bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan identitas Melayu baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, identitas Melayu dipertahankan melalui upaya pemerintah daerah bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu (LAM). Secara kultural, pembangunan situs Melayu dengan simbol-simbolnya menjadi cara yang dilakukan sejauh ini. Pemeliharaan ujaran bijak Melayu melalui penyampaian bait-bait seperti dalam Gurindam Duabelas merupakan media yang mampu membangkitkan kembali memori masyarakat Melayu mengenai identitasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian etnografi yang bersifat deskriptif-eksploratif. Peneliti berangkat dari upaya untuk mendeskripsikan sekaligus mengeksplorasi gagasan tentang politik identitas Melayu Riau yang selama ini mengalami degradasi. Data yang dijadikan landasan analisis diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumen dan studi literatur. Observasi dilakukan terhadap simbol-simbol budaya Melayu Riau yang hingga saat ini masih dapat ditemukan. Simbol-simbol kultural Melayu dapat dilihat pada bangunan seperti rumah tempat tinggal, perkantoran, bahkan rumah ibadah. Wawancara

yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan kondisi yang dialami budaya Melayu secara umum saat ini. Informan dipilih berdasarkan kedalaman pengetahuan mengenai budaya Melayu sehingga memberikan informasi yang dapat dijadikan landasan analisis.

Studi dokumen difokuskan pada dokumen-dokumen budaya Melayu berupa foto, gambar, dan peta yang selama ini masih banyak disimpan oleh para penggiat budaya. Dokumen lain yang dikaji adalah Gurindam Dua Belas, karya Raja Ali Haji yang digolongkan ke dalam puisi lama Melayu yang berisi tunjuk ajar dan pesan moral untuk membentuk budi pekerti manusia menjadi insan yang beragama, yang berisi tentang petuah-petuah kehidupan yang hingga kini masih diwariskan kepada generasi muda dengan segala kendalanya. Dari berbagai dokumen yang diperoleh, ditemukan bahwa identitas Melayu pada dasarnya tidak mengalami perubahan secara format atau bentuk, tetapi mengalami pergeseran pada aspek pemaknaan yang sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan budaya itu sendiri. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para ahli sebelumnya, baik yang berbentuk publikasi buku maupun artikel jurnal. Data yang diperoleh dari ketiga sumber ini terlebih dahulu dikelompokkan untuk memudahkan kecocokan data. Pada tahap berikutnya, penulis memberikan konteks atau penafsiran terhadap data yang ada dan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Politik Identitas

Politik identitas adalah sebuah gaya politik yang berusaha melawan marginalisasi kelompok dengan menganut sebuah rasa identitas bersama yang positif dan asertif (Heywood, 2014). Politik identitas juga terkait dengan cara untuk memberikan garis yang tegas dalam menentukan siapa saja yang termasuk anggota kelompok dan siapa saja yang bukan bagian dari kelompoknya (Morowitz dalam Prayetno (2016). Mengingat garis-garis

demarkasi tersebut tidak dapat diubah, maka status keanggotaan tampak bersifat permanen. Menjadikan identitas etnis sebagai komoditas politik merupakan langkah mempengaruhi pihak lain agar dapat memenuhi keinginannya. Politik identitas menekankan pada adanya upaya untuk menjadikan perbedaan sebagai label diri atau kelompok, termasuk pada etnis di Indonesia. Upaya ini penting dilakukan dalam rangka mencari jalan mempertahankan identitas dan keberlangsungan kelompok. Terkait dengan ini, persoalan penggunaan identitas untuk kepentingan lain bukanlah hal baru. Sebab, identitas merupakan sumber makna yang utama sehingga apa yang dilakukan seseorang berlandaskan pada apa yang diyakini (Hemay & Munandar, 2015; Salim, 2015).

Politik identitas, yang sering kali hadir pada bagian dari sejarah Indonesia kontemporer, harus diperlakukan dan dipertahankan dengan hati-hati oleh logika kontekstual yang ditafsirkan secara akurat dan cerdas (Habibi, 2017). Sentimen kesukuan hanya dapat memiliki efek positif bila dihadapkan dengan citra figur, yang berarti bahwa seseorang akan mendukung seorang kandidat, apapun sukunya. Ini dapat pula dikatakan bahwa kontribusi masing-masing faktor dapat bersifat negatif atau positif (Hemay & Munandar, 2015). Munculnya pengaruh etnis sebagai kekuatan politik perlahan-lahan mengubah kontrol negara dan kelas birokrat yang berkuasa (Salim, 2015). *Selembayung*, sebagai karakteristik identitas Melayu, sebenarnya bergerak lebih bebas di antara kelompok penggunanya sehingga keseragaman dan pengucilan tidak berhasil (Salam, 2017). Munculnya politik identitas digunakan untuk mengubah struktur sosial, politik dan ekonomi yang tidak mendukung kehidupan kelompok etnis Melayu (Venus, Syafirah, & Salam, 2019).

Proses tradisi intelektual Islam Melayu tidak dapat dipisahkan dari proses transmisi dan penyebaran ajaran dan gagasan Islam (Reid, 2001), yang selalu melibatkan semacam "jaringan intelektual" antara para ulama dan para intelektual secara keseluruhan (Ris'an Rusli, 2018). Sejauh menyangkut aspek politik, masalah regionalisme atau pendapat utama dalam kehidupan

masyarakat sangat jelas menciptakan struktur untuk operasionalisasi politik identitas dan dapat dilihat dalam banyak kondisi yang muncul dalam budaya meskipun dibuktikan oleh adanya benturan-benturan (Ulum, Jannah, & Arifullah, 2017). Dalam konteks ini, identitas dipolitisasi oleh interpretasi ekstrim dan membutuhkan dukungan dari orang-orang yang merasakan sama, baik dalam gender, kebangsaan, kepercayaan atau komponen lainnya (A. Abdullah, 2017; Syu'ib, 2017).

Studi ini menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Manuel Castells dalam melihat sebuah fenomena seperti halnya identitas Melayu Riau. Menurut Castells dalam Salim (2015), terdapat tiga proses pembentukan dalam membangun sebuah identitas. *Pertama*, identitas legitimasi (*legitimizing identity*) adalah citra lembaga yang mengatur masyarakat yang merasionalisasi dan mempertahankan hegemoni atas aktor sosial, seperti lembaga negara yang berupaya meningkatkan identitas nasional anggota masyarakat. Bahkan, organisasi telah memperoleh kredibilitas untuk melakukannya. *Kedua*, identitas resisten (*resistance identity*), yakni sebuah siklus pembentukan identitas oleh anggota sosial yang berada di bawah tekanan karena dominasi dan persepsi negatif oleh pihak lain untuk membentuk oposisi dan penciptaan identitas yang berbeda dari mereka yang memerintah, dengan pandangan terhadap keberadaan suatu komunitas. *Ketiga*, identitas proyek (*project identity*) merupakan sebuah identitas dimana anggota budaya membentuk identitas baru yang dapat menentukan posisi barunya tersebut dalam masyarakat dan mengubah struktur masyarakat secara keseluruhan. Ketiga proses tersebut merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh kelompok dalam rangka mempertahankan diri khususnya identitas yang mengalami ancaman.

Melayu sebagai Identitas Bersama

Studi-studi terdahulu memberikan kerangka awal bahwa budaya Melayu sangat penting bagi masyarakat Riau. Identitas kultural seperti halnya Melayu pernah mengalami kondisi terpuruk ketika rezim otoriter berkuasa.

Ekspresi kultural masyarakat hampir seragam, mengikuti keinginan penguasa kala itu. Simbol-simbol kultural seperti ornamen pakaian, rumah adat, bahasa dan identitas lainnya mengalami peminggiran. Di era Reformasi, identitas Melayu Riau kembali menguat dengan segala prosesnya. Penciptaan identitas juga mencerminkan nilai-nilai yang dicari oleh budaya Melayu (Alfarabi, Antar Venus, Nuryah Asri Syafirah, 2019). Salah satu daerah yang secara terbuka berupaya membangkitkan identitasnya adalah Melayu Riau. Provinsi Riau merupakan wilayah yang berkarakter Melayu kuat dan masih memiliki ikatan yang kuat dengan Melayu di tempat-tempat lain seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan, pemerintah daerah Riau menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara melalui visinya pada tahun 2020 (Affandi, 2018; Syu'ib, 2017). Hingga saat ini, pemerintah provinsi Riau berupaya untuk mempertahankan dan menumbuh-kembangkan budaya Melayu sebagai identitas bersama masyarakat Riau di tengah keberadaan etnis lain seperti yang tergambar pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Etnis Yang Ada di Provinsi Riau

No	Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu	2.103.659	37,74%
2	Jawa	1.431.598	25,05%
3	Minang	672.621	11,26%
4	Batak	400.837	7,31%
5	Banjar	191.787	3,78%
6	Bugis	139.26	2,27%
7	Sunda	103.012	1,6%
8	Tionghoa	188.897	3,72%
	Jumlah	5.726.241	100%

Sumber: Dokumentasi LAM Riau 2019.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki berbagai macam etnis suku, namun masih didominasi oleh Melayu. Komposisi etnis yang pada prinsipnya didominasi oleh “pendatang” menjadi salah satu ancaman identitas Melayu. Hal ini diakui oleh salah seorang akademisi di Pekanbaru Riau, DM (32). Ia mengungkapkan adanya ancaman terhadap budaya Melayu secara umum.

“iya karena keberadaan masyarakat suku asli Melayu sudah sangat terpinggirkan, karena banyaknya pendatang dari daerah-daerah yang juga membawa adat dan kebiasaan dari daerah mereka, bahkan untuk kota Pekanbaru sendiri bahasa sehari-hari adalah

bahasa Minang atau mayoritas berbahasa Minang” (Wawancara, Oktober 2020).

Hal yang sama diungkapkan oleh EZ (33), bahwa:

“Identitas Melayu menghadapi ancaman kepunahan pada era globalisasi ini, dikarenakan banyaknya pengaruh dari dunia luar, sebagai contoh baju yang dikenakan anak muda saat ini jauh dari identitas budaya Melayu itu sendiri” (Wawancara, Oktober 2020).

Pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kesadaran sekaligus kekhawatiran atas keberadaan eksistensi identitas Melayu. Mereka bahkan melihat keberadaan etnis pendatang menjadi salah satu potensi ancaman karena membawa identitas lokalnya ke Riau. Pertemuan beberapa budaya melahirkan budaya baru yang pada prinsipnya mengurangi “kadar” identitas budaya asal.

Pada era Reformasi, elit politik pemerintah provinsi Riau mulai mencoba untuk memperkuat dan menunjukkan identitas mereka yang sebenarnya, dan berbagai wacana dibentuk melalui kebijakan dan disebarluaskan untuk menggambarkan identitas Melayu di Riau (Alfarabi, Antar Venus, Nuryah Asri Syafirah, 2019). LAM didedikasikan untuk melindungi dan memelihara warisan simbol Melayu dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi Visi Misi Riau 2020. Jenis kerjasama lembaga ini dengan Pemerintah dapat dilihat dalam konservasi budaya daerah seperti yang termaktub pada Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 tahun 2012 dalam Bab IX Pasal 11, LAM Riau yang pada intinya berperan dalam hal (1) inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya serta aset kekayaan, (2) inventarisasi artefak berupa peninggalan bersejarah, dan (3) menyusun rencana kegiatan menyangkut pengelolaan dan pengembangan adat/tradisi Melayu. Kolaborasi antara LAM Riau dan pemerintah daerah merupakan suatu identitas legitimasi yang terlihat dalam proses pembuatan kebijakan, selain itu, LAM Riau telah memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan, dalam penyusunan Peraturan Daerah, LAM Riau telah terlibat dalam proses pembuatan peraturan daerah, khususnya peraturan daerah mengenai warisan atau praktik-praktik masyarakat melayu Riau (Syu'ib,

2017).

Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan budaya Melayu sebagai identitas bersama (kolektif) masyarakat Riau, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan No. 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau di mana pada bab V Pasal 6 menyebutkan tentang tujuan LAM Riau. Lembaga adat ini bertujuan untuk (1) menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu, (2) melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat, dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau, dan (3) mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kerjasama dalam memperkuat budaya Melayu yang tidak saja terbatas pada kebudayaan yang bersifat *soft*, tetapi juga yang bersifat *hard*.

Sebagai implemementasi dari peraturan daerah tersebut, berbagai diskusi dilakukan untuk menemukan titik temu tentang bagaimana mengangkat identitas Melayu agar tidak hanya dikenal sebagai identitas, tetapi juga dikenal sebagai bagian dari budaya bangsa yang memiliki kontribusi besar terhadap berdirinya bangsa Indonesia. Salah satu kegiatan yang terlaksana atas kerjasama LAM dengan pemerintah daerah adalah pekan adat Melayu yang dilakukan rutin setiap tahun. Pada kegiatan ini, berbagai perhelatan kesenian dilakukan untuk menunjukkan kepada publik mengenai keberadaan Melayu di zaman dahulu yang memiliki sejumlah media hiburan. Dalam pekan adat Melayu juga disajikan kembali makanan-makanan khas yang selama ini sudah mulai hilang dalam masyarakat. Salah seorang warga Riau, MG (43) mengakui adanya ancaman terhadap identitas Melayu, termasuk potensi kepunahan. Ia juga sangat mengapresiasi adanya kegiatan kebudayaan seperti pekan adat di Riau. Ia mengatakan:

“Pekan adat sangat penting untuk generasi saat ini. Kami saat ini sulit menemukan ciri khas Melayu. Yang kami peroleh adalah

cerita-cerita tanpa dapat ditemukan bentuknya. Pekan adat memberikan pengetahuan kepada generasi muda mengenai budayanya sehingga mereka nanti bisa melestarikannya” (Wawancara, September 2020).

Pengakuan yang sama juga diperoleh dari MJ (52), seorang akademisi yang telah lama meninggalkan tanah Melayu, namun masih sering kembali ke daerah asalnya. Ia mengungkapkan:

“Ketika saya masih kecil, banyak sekali kegiatan budaya yang dilaksanakan khususnya ketika menjelang peringatan 17 Agustus. Setiap kampung ada kegiatan budaya yang isinya tentang tarian, cerita dan olahraga. Saat ini sulit menemukannya sehingga budaya atau identitas Melayu bisa hilang di masa yang akan datang. Bagi saya, identitas Melayu tidak bisa bertahan begitu saja, harus ada upaya bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga budaya Melayu secara bersama-sama” (Wawancara, September 2021).

Mengenai ancaman identitas Melayu, TH (35) mengakui adanya potensi atau gangguan terhadap keberadaan budaya Melayu. Ia mengatakan:

“Identitas Melayu mengalami degradasi karena tergerus arus global dan masuknya identitas-identitas lain dalam wilayah orang Melayu. Identitas Melayu belum mengarah kekepunahan, tetapi gerusan arus global tadi berdampak pada menipisnya pemahaman orang Riau terhadap identitas Melayu. Ketidaksungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu sebagai salah satu faktor yang menyebabkan penipisan identitas ini, tradisi-tradisi melayu hanya ditampilkan dalam seremoni-seremoni pemerintah tetapi tidak mengakar dalam kehidupan orang Riau. Perda muatan lokal nyatanya belum mampu menjawab penipisan identitas orang Melayu itu” (Wawancara, Desember 2020).

Pernyataan informan tersebut pada dasarnya menyadari adanya perubahan atau pergeseran kebudayaan di internal masyarakat Melayu saat ini. Pengaruh zaman sangat tampak mempengaruhi keberadaan budaya Melayu khususnya identitasnya, baik yang berupa makanan, pakaian, bangunan, dan bahkan adat-istiadat. Pernyataan tersebut juga menunjukkan adanya kekhawatiran atas ancaman terhadap kepunahan budaya Melayu di masa yang akan datang. Mereka juga sadar bahwa identitas Melayu bukanlah sesuatu yang bisa menjaga dirinya sendiri sehingga perlu melibatkan semua

pihak. Adapun Gambar 1 di atas memberikan penjelasan atas adanya upaya bersama dalam menjaga eksistensi identitas Melayu. Kegiatan-kegiatan seperti pekan adat merupakan cara yang dapat mendukung keberlangsungan identitas Melayu dan semakin dikenal oleh masyarakat Melayu serta masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya memperkenalkan identitas Melayu tidak saja dalam bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan adat, tetapi juga perlu didukung oleh adanya komitmen menjadikan identitas Melayu sebagai identitas yang dapat diterima secara luas. Pada konteks ini, identitas Melayu memperoleh legitimasi tidak saja dari masyarakat penganutnya, tetapi juga publik sehingga memperoleh ruang untuk dipertahankan secara bersama-sama.

Identitas sebagai Media Perlawanan

Seperti yang telah disinggung di awal, terdapat stigma mengenai masyarakat Melayu di masa lalu yang dianggap sebagai “pemalas”. Anggapan tersebut direspons oleh masyarakat Riau dengan upaya-upaya positif. Tiap-tiap etnik tentu saja ingin menampilkan citra positif yang bahkan lebih baik daripada etnis lain. Kelompok etnis dengan identitas negatif mencoba yang terbaik untuk menghapus stereotip negatif sehingga citra etnis dapat ditingkatkan. Situasi yang sama dilakukan oleh Orang Melayu Riau pasca Reformasi yang berusaha keras mengubah pandangan negatif kepada etniknya. Salah satunya dengan meluruskan stigma yang melekat dalam karakter Orang Melayu Riau. Wacana ini dilakukan karena di masa lalu terdapat pandangan negatif yang dialamatkan pada masyarakat Melayu yaitu ‘Melayu itu pemalas dan bukan orang yang pekerja keras’. Stigma Melayu sebagai “pemalas” dan “bodoh” (Hanafiah dan Yaacob, 2020; Arifin, 2012) misalnya, menjadi kondisi dimana identitas digunakan untuk menghakimi kelompok sosial tertentu. Hal ini kemudian menimbulkan pandangan yang negatif terhadap identitas Melayu. Paradigma “melayunisasi” merupakan salah satu upaya untuk mengubah citra ini dengan melakukan internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat Melayu. Konsep melayunisasi

ditampilkan pada *selembayung* di gedung pemerintah daerah dan lembaga adat yang ada di Riau (Venus et al., 2019).

Stigma di atas memberikan ruang atas terjadinya ketegangan antar etnis sehingga membutuhkan upaya klarifikasi secara bijak. Masyarakat Melayu menyikapi hal tersebut bukan dengan berbagai ungkapan/bahasa. Masyarakat Melayu memang dikenal dengan kepiawaian menyusun bait ungkapan yang memiliki makna yang dalam. Pesan-pesan yang tersimpan di balik setiap bait mencerminkan ketatnya pesan moral (agama) yang disampaikan dengan harapan terwujud kehidupan yang lebih baik berlandaskan nilai-nilai moral. Bahasa Melayu dapat dipahami dalam tiga sudut pandang, yaitu filosofis, praktis, dan politis. *Pertama*, secara filosofis, penggunaan bahasa Melayu (termasuk dialeknya) memiliki kandungan makna tersendiri. Identitas kemelayuan di Riau dapat dilihat, salah satunya, dari sudut pandang ini. Secara filosofis, Bahasa Melayu merupakan akibat dari keinginan dan pilihan orang Melayu atas Islam sebagai pilihan keyakinannya. Keduanya pun tidak bisa dipisahkan karena telah terinternalisasi dalam kehidupan dan praktik keseharian mereka. Dalam sejarahnya, kehadiran Islam berdampak pada seluruh budaya bangsa Melayu, termasuk penggunaan bahasa. Petuah-petuah atau ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam Dua Belas misalnya, memuat ujaran bagi masyarakat mengenai apa yang seharusnya dilakukan khususnya dalam bersikap dan bertingkah-laku sesuai dengan adat Melayu dan hal tersebut sangat islami. Dalam Gurindam Dua Belas yang memuat dua belas pasal misalnya ditemukan petuah atau ujaran luhur ini.

*Jika hendak mengenal orang yang berbangsa
Lihat kepada budi dan bahasa
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia
sangat memeliharakan yang tidak sia-sia
Jika hendak mengenal orang mulia
Lihatlah kepada kelakuan dia
Jika hendak mengenal orang yang berilmu
Bertanya dan belajar tidaklah jemu
Jika hendak mengenal orang yang berakal*

*Di dalam dunia mengambil bekal
Jika hendak mengenal orang yang baik perangai
Lihatlah pada ketika bercampur dengan orang ramai*

Bait Gurindam di atas, memberikan ajaran tentang seorang dalam bersikap dan bertingkah laku sebagai adat istiadat Budaya Melayu. Ajaran tersebut adalah dalam berbangsa atau bersuku atau berkelompok atau berorganisasi seseorang harus memiliki budi dan bahasa yang baik. Budi dan bahasa yang baik sudah dicontohkan dalam agama dan adat istiadat. Apalagi adat istiadat Budaya Melayu, nilai adat istiadat diambil dari nilai-nilai agama (Zainuri, 2017). Secara filosofis, dalam Bahasa Melayu termaktub nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti mulia yang dapat dirasakan dari kelembutan dialek bahasanya.

Kedua, tentang bahasa Melayu dilihat dari praktis atau penggunaan kata. Bahasa mana pun sarat dengan makna dan simbol. Demikian pula dengan Bahasa Melayu, penuh dengan simbol-simbol. Pada frasa-frasa dalam Bahasa Melayu sering tidak bersifat direktif atas apa yang dikatakan, tetapi merujuk pada perumpamaan-perumpamaan sehingga membutuhkan kepekaan yang tinggi bagi pengguna dan pendengarnya. Simbolisme di Melayu terkait dengan disposisi yang tenang dan keragaman perasaan dalam budaya Melayu, yang mencegah konflik. Pada banyak frasa, sangat jelas bagaimana Bahasa ini menjunjung tinggi perasaan seseorang (lawan bicara). Pada salah satu bait Gurindam Dua Belas sebagaimana yang kutip oleh Tenas Effendy (2013) tentang anjuran untuk bekerja dalam amanah disebutkan:

*Apabila bekerja memegang amanah,
Orang percaya menjauhkan fitnah
Apabila bekerja tiada lalai
Hasilnya tidak akan terbangkalai*

Bait di atas menegaskan bahwa amanah merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah pekerjaan. Bahkan, sangat ditekankan bagi siapa saja untuk bekerja dalam bingkai kejujuran yang tinggi. Sebab, jika kejujuran tidak ditegakkan maka pekerjaannya pun tidak bermakna (bermanfaat). Di sini dapat dilihat bahwa nilai Islam dan tradisi (Bahasa) Melayu sangat erat

kaitannya. Keduanya sangat menekankan pada arti penting dari sebuah kejujuran yang menjadi pilar keberhasilan.

Ketiga, memahami bahasa Melayu sebagai bahasa politik. Sekali lagi, sebuah bahasa tidak saja berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menjalin pembicaraan dengan orang lain. Akan tetapi, bahasa juga memiliki fungsi label atau penanda bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Bahasa Melayu Riau sebagai akar bahasa nusantara sangat politis. Sebab, bahasa ini selalu dijadikan acuan. Fakta bahwa Bahasa Melayu adalah asal-muasal Bahasa Indonesia tidak bisa terbantahkan (Sukesti, 2015; Wuriyanto, 2015). Dalam praktiknya, Bahasa Melayu Riau terbagi menjadi dua dialek. Bahasa Melayu Riau dengan akhiran “e” dan bahasa dengan akhiran “o”. Dialek Bahasa Melayu sangat banyak, ada yang mengatakan 87 dialek yang tersebar di pulau Sumatera dan beberapa daerah lain. Setiap dialek dipraktikkan oleh kelompok masyarakat sendiri yang juga mengusung misi tertentu yang tidak hanya terbatas pada media komunikasi, tetapi juga untuk menunjukkan identitas diri dan daerah masing-masing.

Strategi Mempertahankan Identitas Melayu

Ancaman atas keterpinggiran bahkan kepunahan budaya Melayu direspons oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dengan melakukan berbagai adaptasi, baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, Lembaga Adat Melayu (LAM) melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi Riau untuk menggalakkan budaya dan menggunakan identitas Melayu secara masif. Salah satu hasil dari kerjasama ini adalah penggunaan simbol Melayu dalam berbagai bangunan pemerintah dan kembali mengadopsi bentuk bangunan Melayu di zaman dahulu (Gambar 2). Meskipun bangunan saat ini lebih modern, namun tetap mengambil semangat bangunan Melayu kuno seperti yang tercermin pada atap perkantoran dan bangunan fasilitas umum lainnya. Simbolisasi identitas Melayu ditonjolkan dalam beragam bentuk selain bangunan, seperti pada pakaian resmi ketika menjamu tamu, dan sebagainya.

Masyarakat Melayu didominasi oleh Muslim. Bahkan, Melayu diidentikkan dengan Islam, dan demikian pula sebaliknya. Baik Islam maupun Melayu memiliki irisan yang tidak bisa dipilah dan dipisahkan. Hal ini dapat dilihat pada praktik-praktik sosial masyarakat Muslim yang sangat kental dengan budaya Melayu. Demikian pula sebaliknya, budaya masyarakat Melayu memiliki hubungan kuat dengan Islam, pengidentikan bukanlah hal baru. Di berbagai tempat juga dapat ditemukan demikian. Di tanah Bugis misalnya, klaim bahwa Bugis adalah Islam dan sebaliknya sangat kental bahkan hingga saat ini (Jubba et al, 2018; Jubba et al, 2019). Secara kebetulan, antara masyarakat Melayu Riau dan Bugis memiliki hubungan kultural yang kuat. Bahkan, sangat mudah menemukan keturunan Bugis di wilayah Riau hingga sekarang. Pengidentikan sebuah kelompok masyarakat atas agama tertentu juga terjadi misalnya pada masyarakat Dayak di Kalimantan. Dayak adalah Kristen, dan Kristen adalah Dayak. Jika seseorang berpindah agama misalnya, maka ia pun terkeluarkan secara kultural dari masyarakatnya. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa hubungan antara agama dengan budaya sulit dipisahkan.

Beberapa riset telah menyinggung bahwa hubungan Islam dengan Melayu sangat kuat dan sulit dipisahkan. Saat ini, dalam praktik sosial masyarakat Riau selalu dikembalikan acuannya pada Islam. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengidentikan tadi. Islam adalah ukuran nilai bagi sikap masyarakat Melayu. Terdapat perasaan yang membanggakan bagi masyarakat Melayu dengan identitas keislamannya. Kualitas Islam dalam aspek Melayu ditunjukkan oleh contoh seseorang yang keluar dari Islam, maka secara otomatis dianggap keluar dari Melayu itu sendiri. Hal yang sama juga berlaku ketika seseorang yang mengaku Islam sehingga secara umum masyarakat akan mengatakan orang tersebut telah menjadi Melayu.

Politik uniformitas di era Orde Baru sangat efektif menekan berbagai identitas lokal yang beragam. Selain Bahasa, pakaian juga menjadi perhatian rezim kala itu. Semua harus seragam, demikian prinsip sederhananya yang

dianut kala itu. Dampaknya adalah kebudayaan-kebudayaan lokal tergerus dan larut mengikuti budaya uniformitas tadi. Bahkan, ketika itu dominasi kultur di Indonesia sangat jawaisme. Pembangunan pun berpusat di Jawa sehingga daerah-daerah lain “terlupakan”. Pasca keruntuhan Orde Baru, terjadi gelombang baru yang mengusung kesamaan hak kultur anak bangsa. Berbagai identitas daerah muncul ke permukaan dan berusaha tampil dengan kekhasannya masing-masing. Penguatan identitas kedaerahan semakin mendapat ruang seiring dengan kebijakan desentralisasi. Kekuasaan tidak lagi tersentral di pusat, tetapi telah disebar ke daerah-daerah dengan Batasan-batasan tertentu. Di kalangan masyarakat Melayu, berbahasa Melayu merupakan sebuah kebanggaan dan sebagai bentuk upaya mengembalikan “marwah” budaya yang selama ini tenggelam. Melalui Bahasa Melayu pula, identitas kemelayuan seseorang dapat terlihat.



Gambar 1. Ajakan Pelestarian Bahasa Melayu

Sumber: Riautelevisi.com (2019).

Pada Gambar 1, terlihat jelas adanya keinginan semua pihak untuk kembali mengangkat Bahasa Melayu ke pentas yang lebih luas. Bahkan, bahasa Melayu, yang tidak lain adalah cikal-bakal bahasa Indonesia, selalu didengungkan. Selain bahasa, pemerintah daerah juga menggalakkan penggunaan busana Melayu pada hari-hari tertentu, misalnya pada Hari Ulang Tahun (HUT) daerah di mana seluruh pegawai diwajibkan mengenakan pakaian Melayu. Bagi kaum laki-laki memakai pakaian yang dikenal dengan *Baju Kurung Cekak Musang* sedangkan kaum wanita mengenakan pakaian

yang dikenal dengan *Baju Kurung Teluk Belanga*. Pakaian tersebut sangat khas dengan budaya Melayu dan dianggap sangat islami karena menutup aurat secara keseluruhan.

Secara kelembagaan, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam pelestarian identitas Melayu. Salah satu upaya adalah melakukan pekan adat dalam rangka menghidupkan kembali budaya Melayu yang mulai mengalami pergeseran.



Gambar 2. Bentuk Kegiatan Kerjasama Memperkuat Kebudayaan Melayu
Sumber: datariau.com (2019)

Pada Gambar 2, tampak kegiatan yang dilakukan selain memperingati hari jadi Lembaga Adat Riau (LAM) juga dirangkaikan dengan Pekan Adat dan Budaya Melayu. Hal ini dimaksudkan tidak saja menyelenggarakan kegiatan secara rutin, tetapi juga berupaya menghidupkan kembali semangat kemelayuan yang dihadapkan pada sejumlah tantangan saat ini, khususnya menyangkut keberlangsungan identitas Melayu di masa yang akan datang. Keberpihakan pemerintah daerah diperlukan untuk memberikan jaminan atas keterjagaan identitas Melayu. TH (35) mengungkapkan:

“Upaya penguatan identitas Melayu dapat dilakukan dengan peneguhan keberpihakan pemerintah dalam menyusun kebijakan tentang identitas Melayu dalam Perda muatan lokal, membangun monumen Melayu dan mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam aktifitas masyarakat” (Wawancara, Desember 2020).

Keberpihakan mengenai pelestarian budaya Melayu juga sebaiknya didukung oleh praktik dalam kehidupan keseharian. EZ (33) mengungkapkan

bahwa kebijakan pemerintah daerah juga diikuti oleh penggunaan identitas Melayu dalam berbagai level, termasuk kaum muda pada berbagai kegiatan. Ia menyebutkan:

“Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar identitas Melayu tidak punah adalah mengenalkan adat dan budaya Melayu kepada masyarakat terutama kaum muda mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi melalui mata pelajaran ataupun mata kuliah. Kemudian mewajibkan untuk setiap kegiatan baik resmi ataupun tidak resmi menggunakan adat Melayu. Membentuk organisasi Melayu untuk kaum muda dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan seputar adat dan kebiasaan Melayu” (Wawancara, Oktober 2020).

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian terhadap perkembangan kebudayaan daerah, termasuk memberikan ruang yang lebih luas untuk diaktualisasikan melalui seperangkat kebijakan di satu sisi. Pada sisi lain, kebijakan pemerintah daerah diikuti oleh komitmen bersama masyarakat untuk melestarikan identitas Melayu secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Upaya mempertahankan identitas Melayu tidak saja dilakukan oleh pelaku budaya (masyarakat), tetapi juga stakeholder lain dalam hal ini pemerintah daerah. Keberadaan Lembaga Adat Melayu menjadi pertanda kehadiran budaya Melayu dalam berbagai momen. Apa yang dilakukan oleh lembaga adat, yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah menjadi titik terang atas masa depan kebudayaan Melayu secara luas. Lembaga Adat Melayu selain didedikasikan untuk melindungi dan memelihara tradisi Melayu, juga menjadi media yang menyambungkan budaya dengan negara. Adanya persepsi negatif mengenai budaya Melayu secara tidak langsung akan berhadapan dengan lembaga adat dan pemerintah daerah. Pada konteks inilah optimisme atas masa depan kebudayaan semakin terang. Berbagai upaya dilakukan hingga saat ini untuk mengubah persepsi tersebut melalui internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat Melayu Riau yang dilakukan melalui proyek ‘Melayunisasi’.

Konstruksi identitas Melayu Riau yang sangat kental dengan nilai-nilai

Islam menjadi titik kompromi. Baik Melayu maupun Islam memiliki domain masing-masing yang pada akhirnya dapat dipertemukan dalam berbagai arena dan kondisi seperti yang dapat ditemukan pada desain bangunan di tanah Melayu. Apa yang terjadi selama ini, khususnya menyangkut bagaimana identitas Melayu Riau ditempatkan pada posisi yang berintegritas merupakan langkah yang strategis untuk mengangkat kearifan lokal agar semakin mengemuka. Studi ini, selain memperlihatkan adanya upaya dan komitmen kuat dari semua kalangan dalam mengkonstruksi identitas budaya bangsa yang mulai pudar, juga menjadi indikator kuat atas adanya semangat nasionalisme yang tidak pernah padam di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya dilakukan terobosan-terobosan baru yang lebih progresif untuk mempertahankan nilai-nilai lokal yang sejauh ini mengalami ancaman kepunahan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan budaya daerah yang telah terbukti menjadi salah satu pilar penting terwujudnya tatanan kehidupan sosial yang semakin terbuka dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rani, M. (2005). Antara Islam dan Hinduisme di Alam Melayu: Beberapa catatan pengkaji Barat. *SARI: Jurnal Alam dan Tamadun Melayu*, 23, 67-82.
- Abdullah, A. (2017). Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif. *Jurnal An-Nida': Pemikiran Islam*, 41(2), 202-212.
- Abdullah, I. (2017). Glokalisasi Identitas Melayu: Potensi dan Tantangan Budaya dalam Reproduksi Kemelayuan. *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 6 (2), 1-7.
- Abdullah, M. A., & Abdul Fattah, R. A. (2013). "Diaspora Rumpun Melayu di Muar, Johor, Malaysia", *Seminar Diaspora dan Deklarasi Daerah Kembar Siak dengan Dungun*, Terengganu, Siak, 15-17 November 2013.
- Affandi, S. A. (2018). "Kapabilitas Lembaga Adat Melayu Riau dalam Mewujudkan Visi Misi Riau 2020". *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY.

- Ahmad, A. S. (1979). *Sulalatus Salatin Sejarah Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Alfarabi, Antar Venus, N. A. S. & N. E. S. (2019). Elite Lokal dan Upaya Pembentukan Wajah Baru Identitas Melayu di Indonesia Pascareformasi. *Akademika: Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities*, 89 (3), 143–154.
- Alfarabi, Antar Venus, Nuryah Asri Syafirah, N. E. S. (2019). Media Identitas Melayu Pascareformasi di Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6 (1), 21–31.
- Alfarabi. (2019). Simbol Eksistensi Identitas Etnik Melayu Riau di Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 67–77.
- Arifin, Azmi. (2012). Syed Hussein Alatas: Pemikiran Kolonial dan Gagasan 'Feudalisme Melayu'. *Jurnal Akademika*, 82 (1), 21-30.
- Asrinaldi, A. (2018). Dimensi Kekuasaan Penghulu Adat Melayu Riau dalam Pelaksanaan Demokrasi Lokal. *Jantro: Jurnal Antropologi Isu-isu Sosial Budaya*, 20(1), 57–69.
- Effendy, T. (2013). *Tunjuk Ajar Melayu dalam Pantun, Gurindam, Seloka, Syair, dan Ungkapan*. Pekanbaru: Tenas Effendy Foundation.
- Erman, M. A. (2018). Politik Identitas dan Negara Bangsa di Riau. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17 (1), 1–13.
- Habibi, M. (2017). Analisis Politik Identitas di Indonesia. (March), 1–22. <https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.16590.66887>.
- Hanafiah, Muhammad Nur Al-Hakim Mohamad dan Mohd Firdaus Che Yaacob. (2020). " Nilai-nilai Islam dan Pembentukan Akhlak dalam Cerita Rakyat Melayu", *International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL)*, 10 (2), 48 – 56.
- Hemay, I., & Munandar, A. (2015). Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. *Politik: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(1), 1737–1748.
- Heywood, A. (2014). *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jaya, A. C. (2019). Konsep Nation-State Dalam Pemikiran Ideologi Politik Melayu Islam Pada Abad Ke-19 M (Studi Pemikiran Abdullah Bin Abdul Kadir Munsyi (1787-1854)). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15 (1), 1-25.

- Jubba, H., Pabbajah, M., Prasodjo, Z. H., & Qodir, Z. (2019). The future relations between the majority and minority religious groups, viewed from Indonesian contemporary perspective: A case study of the coexistence of Muslims and the Towani Tolotang in Amparita, South Sulawesi. *International Journal of Islamic Thought*, 16(2), 13-23. <https://doi.org/10.24035/ijit.16.2019.002>
- Jubba, H., Rustan, A. S., & Juhansar, J. (2018). Kompromi Islam dan Adat pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis di Sulawesi Selatan. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, 2 (2), 137-148. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2865>
- M. Zainuddin. (2018). Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Melestarikan Wisata Budaya Di Provinsi Riau. *Jurnal Agregasi*, 6(1), 91-107.
- Mashitah, Sulaiman. (2013). Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Melayu Malaysia: Suatu Kajian Eksploratori. *Proceeding of the International Conference on Social Science Research*.
- Nordin, M. (2017). *Kesultanan Melayu Melaka*. Kuala Lumpur: University Malaya.
- Prayetno. (2016). Menguji Hak Politik dalam Kontestasi Politik; Analisis terhadap Politik Identitas Etnis di Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. 7 (2), 39-54.
- Putra, B. A. (2016). Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. *Humanika*, 1 (1), 1-12.
- Reid, Anthony. (2001). Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities. *Journal of Southeast Asian Studies*, 32 (4), 295-313.
- Ris'an Rusli, Y. (2018). Relevansi Dan Kontinuitas Pemikiran Islam Klasik dalam Intelektualisme Islam Melayu Nusantara. 2 (November), 187-197. <https://Doi.Org/10.15575/Jw.V3i2.3582>
- Rozi, S. (2018). Nasionalisme Demokratisasi dan Sentimen Primordialisme Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 6(1), 75-84.
- Salam, N. E. (2017). Penetapan Simbol Arsitektur Perumahan Masyarakat Riau (Selembayung) Sebagai Strategi dalam Melestarikan Budaya. Prosiding 2th Celscitech-UMRI, 2, 29-37.
- Salim, K. (2015). Politik Identitas di Maluku Utara. *Politik: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 11(2), 1667-1678.

- Samin, S. M. (2015). Kerajaan dan Kesultanan Dunia Melayu: kasus Sumatra dan Semenanjung Malaysia. *Crikestra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4 (1), 62-83.
- Sanusi, I. (2017). Globalisasi Melayu: Peluang dan Tantangan Membangun Identitas Melayu dalam Konteks Modernitas. *Khazanah*, 1(1), 39-57.
- Sanusi, I. (2017). Globalisasi Melayu: Peluang dan Tantangan Membangun Identitas Melayu dalam Konteks Modernitas. *Tarbawiyah, Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 01(1), 39-57.
- Stapa, Z., & Shahrudin, Noranizah Yusuf, A. F. (2012). Islam Asas Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu-Muslim. *Hadhari: An International Journal*, Special Edition, 129-141.
- Syu'ib. (2017). Lembaga Adat Melayu Riau Periode 2012-2017 dalam Menegakkan Identitas Kolektif Masyarakat Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fisipol Universitas Riau*, 4 (2), 1-16.
- Tamuri, Ab. Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2009) *Nilai, amalan, dan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Islam selepas penjajahan Barat hingga kini*. Peradaban Arab-Islam dan Masyarakat Melayu. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 35-57.
- Ulum, B., Jannah, S. R., & Arifullah, M. (2017). Hegemoni Sosial dan Politik Identitas Putra Daerah Jambi, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7 (1), 225-249.
- Venus, A., Syafirah, N. A., & Salam, N. E. (2019). Stereotip, Melayu, Etnik, Reformasi, Pendatang. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 3(2), 131-141.
- Zainuri, M. (2017). *Budaya Melayu Berintegritas*. D. S. Suparman (Ed.), *Modul Diseminasi Gugus Depan Integritas*, 1-17. Kota Pekanbaru Provinsi Riau: Pemerintah Provinsi Riau.
- Zakaria, I. (2012). Islam dan Falsafahnya dalam Kebudayaan. *Journal Hadhari*, Special Edition, 91-108.
- Zed, M. (2015). Hubungan Indonesia-Malaysia: Perspektif Budaya dan Keserumpunan Melayu Nusantara. *Tingkap: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Budaya dan Ekonomi*, 11 (2), 140-159.

Persaingan dan Pengaruh Strategis Rusia-NATO di Eropa Timur dalam Keamanan dan Ekonomi

Russia-NATO Strategic Rivalry and Influence Struggle In Eastern Europe In Security and Economy

Syaiful Rohman^{1*}, Marthen Napang², Siti Nurhasanah³

¹National Resilience Studies, School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia

²Faculty of Law, Hasanuddin University, Makasar Indonesia

³American Studies, School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia

*corresponding author E-mail: syaifulrohman71@gmail.com

Diterima: 25 September 2020; Direvisi: 7 Februari 2021; Disetujui: 7 Maret 2021

ABSTRAK

Kekuatan global yang semakin berkembang seperti NATO, Uni Eropa, China dan Rusia memiliki karakteristik dan kepentingan berbeda dalam politik dunia. Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet cenderung berada dalam posisi yang relatif lemah secara pengaruh, keamanan dan ekonomi. Sekarang ini hubungan Rusia dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat telah membaik setelah Perang Dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan NATO tidak hanya memperkuat ekonomi dan keamanan yang terkait dengan militer, tetapi telah melangkah lebih jauh untuk memperkuat pengaruh utamanya di Eropa Timur. Studi ini akan mengkaji kebijakan politik Rusia terhadap NATO dan Eropa Timur dari perspektif keamanan dan kepentingan ekonomi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan studi mendalam terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia dan NATO terlibat persaingan dalam memperebutkan Pengaruh Strategis di Eropa Timur khususnya Ukraina dan bekas Uni Soviet. Rusia dan NATO yang disponsori Amerika Serikat, berusaha untuk mencapai kepentingannya masing-masing dengan melakukan upaya peningkatan kekuatan yang meliputi kekuatan politik, keamanan dan ekonomi.

Kata Kunci: Rusia vs NATO, persaingan strategis, kepentingan ekonomi dan keamanan

ABSTRACT

Global powers such as NATO, European Union, China and Russia have different characteristics and interests in world politics. Russia after Soviet Union tends to be in a relatively weak position in terms of influence, security and economy. Today Russia's relations with the European Union and the United States have improved after the Cold War. In recent years, Russia and NATO have not only

strengthened the economy and security related to the military, but have gone so far as to strengthen the influence of its main State in Eastern Europe. This study will analyze Russia's political policies towards NATO and Eastern Europe from the perspective of security and economic interests. The method used is qualitative by conducting an in-depth study of the data obtained from the results of previous research. The results of this study indicate that Russia and NATO are involved in competing for strategic influence in Eastern Europe, especially Ukraine and the former Soviet Union. Russia and NATO, which is sponsored by the United States, are trying to achieve their respective interests by making efforts to increase strength which includes political, security and economic.

Keywords: *Russia vs NATO, strategic rivalry, security and economic interests*

INTRODUCTION

Russia and NATO's rivalry for influence in Eastern Europe began since the end of the cold war. Russia, which wants to regain hegemony in the Eastern European region, is constrained by the intervention of the NATO (North Atlantic Treaty Organization) which is dominated by the United States, in influencing countries in Eastern Europe (Wolff, 2015). The formation of NATO as a defense agency for European countries cannot be separated from the history of the cold war, when the world was divided into two main poles, namely the United States and the Soviet Union which were the Super Powers at that time (Richterova, 2014). The ideological war which became one of the main forms of war made Europe geographically divided into two camps at that time, namely Western Europe with NATO and Eastern Europe with the Warsaw Pact. When the cold war ended, NATO did not immediately end its existence, but until now NATO continues to exist and expand its membership to the territory of the former Soviet Union satellite countries in Eastern Europe, which of course will be perceived as a potential threat to Russian sovereignty (Kropatcheva, 2012). NATO's expansion in recent years has drawn closer to Russian borders and poses an "external threat" to Russian security.

Security is the most critical aspect in a country's sovereignty so that the state must keep its security from any threat and any country (Yakovlev, 2016). The state has to be able to show its strength and power if the country wants to become a superpower or a resilient nation that leads the world power. In line

with opinions (Sulastri, 2013) that territorial ownership is an essential aspect that must be owned by the state to increase power. Besides, an increase in term of the military as a strong defence and security for the country is needed to show its power to other countries (Nuttalla, Samaras, & Bazilian, 2019). A country can ally with another country when it feels threatened through cooperation with major countries or world security organizations (Kouldunova, 2016), even forming their defences with economic and military power they have.

The superpower occupies a strong position that can influence agreements and enter the national interests of the country. Each country is trying to achieve their respective interests by making efforts to increase national power. National power includes various elements, one of which is military power. The popular perception of Russia as a "centre of gravity" is not only the extent of the territory and the size of Russia's natural resources. Russian characters also make ethnographic entities unique to the concepts of ideology, politics, history and culture (Dragneva, Rilka, & Wolczuk, 2013). The concept of the character referred to the end of the 15th century and the beginning of the 16th century when the Russians began to identify themselves as defenders of Orthodoxy and heirs of Byzantine Culture which later developed into philosophical and historical thinking which contributed to the formation of Eurasianist geopolitical views (Dimitri, 1999).

Russia's perception of Eurasian integration is apparent when Ukraine participates in the formation of the Common Economic Space (CES) with Russia, Belarus and Kazakhstan, when the Eurasian Economic Community (EurAsEC) has also been operating (Kazantsev, 2015). Meanwhile, Ukraine, Moldova, and Armenia prefer to be observer status in the Eurasian Economic Community. However, the drive for integration in the early 2000s was set back by the ultra-liberal influence in the Russian government, which held that post-Soviet forms of integration were economically inefficient (Kouldunova, (2016). The idea of reuniting the CES economy as a common market and

integration initiatives of President Vladimir Putin did not get support in Russia. At the same time, it is not possible to simultaneously form Customs Union and Common Economic Space when seeking membership of the World Trade Organization (WTO) which is considered a priority in that period (Hutabarat, 2017). At least it caused the integration process to stall for several years.

Post-Soviet Russia is indeed in a relatively weak position in economic terms (Kanet, 2010). Although Russia's relations with the European Union and the United States had improved after the Cold War, it did not have a significant impact on Russia's economic growth (Dragneva, Rilka, & Wolczuk, 2013). In recent years Russia and other major powers have not only strengthened the economy and security related to the military. However, they have gone far beyond that to strengthen the country's influence (Kanet, 2010). It is what makes the superpower countries compete in making policies that ultimately affect the world political and economic situation.

Research by Leonard F. Hutabarat (2017) reveals that Russia, when viewed from its historical background, cultural traditions and geopolitical interests, still places Russia as a "natural center" of the integration process of the Eurasian Economic Union in developing security and economy. In terms of security and economy, Elena Kropatcheva (2012) revealed that Russia's foreign policy is often seen as contradicting the West, this is indicated by the expansion of NATO which is considered a risk to Russia's security. Meanwhile, according to Alexander Lukin and Vladimir Yakunin (2018), Russia views Eastern Europe as one of the supports for economic strength and a link between Russia and Western Europe.

This paper will look at how the relationship between Russia and countries in the Eastern European region, the relationship formed between the two parties is caused by the international system. Western powers, the United States and the European Union, have been the triggering factors for Russian activity in the region. After the Soviet Union, it was as if Western countries cut

ties with post-Soviet countries. Therefore, Russia is marginalized by the presence of NATO and the European Union which are trying to expand their influence to the former Soviet Union, which became a Russian tribe.

RESEARCH METHOD

The author uses a qualitative approach in this research with data from reliable sources, including international and national journals, proceedings, and information from websites. Qualitative research methods that emphasize understanding of problems in state life based on realistic, complex, and holistic realities or natural settings. Descriptive-analytical type with a qualitative approach is expected to be able to provide descriptive notes from previous research and other data sources observed by researchers to be able to describe and explain comprehensively the interests of Russia in Eastern Europe .

In short, Russian foreign policy in Eastern European regions such as Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova and Ukraine is based on the interest to maintain the dominance of Russian influence. With the provision of arms assistance and economic improvement, coupled with the dependence of countries on Russian natural gas for its energy needs, Russia is trying to maintain the existence of its power in the region. This paper will explain the extent to which Russia's policy towards Eastern Europe maintains its influence, especially in the security and economic.

RESULT AND DISCUSSION

Russia And Nato Rivalry

Since the beginning of the process of expanding NATO into Eastern Europe after the Cold War, the main concern of NATO, led by the United States, has been how to reconcile this process with Russian interests. Therefore, NATO strives from the very beginning to create a cooperative environment conducive to member expansion, at the same time establishing a special relationship with Russia. When the debate about NATO expansion started in earnest around 1993, due to increasing pressure from countries in Central and Eastern Europe, it happened with considerable controversy. Some academic

observers are particularly opposed to admitting new members into NATO, as this would inevitably become hostile to Russia and risk undermining any positive achievements since the end of the Cold War.

NATO (North Atlantic Treaty Organization) is a regional security organization for countries in the northern Atlantic Ocean region formed on April 4, 1949. NATO is an intra-governmental organization, where allied countries agreed to create a joint defence and security body during the Cold War (Rahyuni, 2012). NATO members include the United States, Britain, France, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Canada, Italy, Portugal, Iceland, Denmark and Norway. They first signed the agreement and became the first member of the NATO security organization (Richterova, 2014). Based on the official website of NATO, it states that NATO membership increased to the present number of 30 member countries located in the European and North American regions.

This defence organization aims to maintain security in Western Europe; it is also to maintain the freedom and security of its members, maintain security stability in the Euro-Atlantic area to prevent international crises (Rahyuni, 2012). To uphold the values of the United Nations (UN) and promote democracy, human rights and international law in 1955, to balance NATO's power a Defense Pact was formed by the Soviet Union and Eastern European countries, the Warsaw Pact which established on May 14, 1955 (Clarasanti, 2019). During the Cold War, the two Defense Blocks continued to try to gain support from other countries and increase their military power (Richterova, 2014).

The competition between two military pacts ended at the end of the Cold War. It marked by the collapse of the Soviet Union on December 26, 1991 (Khanna, 2016). After that, the dissolution of the Warsaw Pact signed the collapse of the superpower state. As a result, NATO became the only Military Pact in Europe and the North Atlantic (Wolff, 2015). This defence organization then gradually began to expand its membership and wanted to achieve its

interests, namely to stem the spread of Soviet communism in the European region. To achieve this goal, NATO then expanded its membership to the Eastern European region, which was once an area of influence and power of the Soviet Union (Hatzivassiliou, 2012).

The participation of former Soviet Union countries such as Poland and the Czech Republic to NATO shows as a form of betrayal in Russia's view. It will pose a threat to security stability in the Eastern European Region. This NATO expansion received a negative response and sharp criticism from Russia (Wolff, 2015). Russia considers that this expansion is one of the threats and efforts of NATO to narrow Russian hegemony, especially in the Eastern European Region. Therefore, Russia feels this is a threat to its existence and seeks to issue policies and strong statements on NATO's expansion and policies, which considered to be able to disrupt Russia's security stability.

As early as 1996, the Allies declared that in their current circumstances they "have no intention, no plans, and no reason to deploy nuclear weapons on new recruits' territory in Eastern Europe." These statements were incorporated into the NATO-Russia Establishment Act 1997, along with similar references to combat forces and substantial infrastructure. This "soft" military approach to the enlargement process should signal to Russia that the goal of NATO expansion is not Russia's military "encirclement", but the integration of Central and Eastern Europe into the Atlantic security space.

However, in the Kosovo crisis, for example, NATO military intervention was interpreted by Russia as a geopolitical coup by the West which tended to marginalize Russia's status as a permanent member of the UN Security Council. Even though NATO's missile defense approach is directed at a third country, Russia considers it an attempt to undermine Russia's second nuclear strike capability. To make matters worse, the "Orange Revolution" in Ukraine and the "Rose Revolution" in Georgia brought elites imagining the future of their respective countries in the European Union and NATO. This is what is considered to endanger Russian security.

The Influence Russia In Eastern Europe

The emergence of NATO in Eastern Europe made Russia feel that it had other competitors in spreading its influence and that meant the increasingly limited space for Russia in the Eastern European region, especially in the Soviet Union (Richterova, 2014). In 1999, the Czech Republic and Poland officially entered NATO. As is known, the Czech Republic and Poland are former member states of the Warsaw Pact. NATO's expansion of the countries of the former Warsaw Pact left Russia seriously threatened to lose the full influence of its power (Rahyuni, 2012). The expansion of NATO members moving towards Eastern Europe is quite threatening for Russia because Eastern Europe is Russia's lane with Western countries. If NATO continues to expand its power, that means it will make Russia more isolated from the outside world. Because, if NATO holds full geopolitical power in Eastern Europe, Russia will be even weaker. It is a strategy of the West (especially the United States) to stem Russian rule. By using NATO's name and appeal, the United States is trying to stem Russian power entirely so that no second, third and so-called superpower will be like the Soviet Union (Wolff, 2015).

The United States expressed the desire to relocate several military bases from Western Europe to several Eastern European countries, such as Bulgaria, Romania and Poland (Rahyuni, 2012). In addition to expanding its territory, NATO has even built military bases in Western and Eastern Europe, such as Bulgaria, Romania and Poland. Relocating the base means moving the front lines of the NATO defence system to near Russian territory (Richterova, 2014). When viewed in terms of historical and cultural, it seems clear that relations between Russia and the Soviet Union were very close, so that Russia wants to maintain security and influence of its power over the region around Russia.

The expansion that happened has changed NATO's boundaries so that its territory is getting bigger. The existence of military bases shows the continuity to expand into Eastern Europe and Central Europe. The security of

NATO member states guaranteed by the military base (Pringgondani, 2016). Because, the principle of this defence pact is if there is a threat to one member, then it is a threat to all other members as well. Tensions between Russia and NATO resurfaced when the issue of nuclear weapons reappeared, making the relations between the two tense again. The tension was triggered by the development of the missile defence system, or NATO missile defence system spearheaded by the United States as the NATO leader in several countries in Eastern Europe, which was once an area of Russian influence and interests.

Russia views this as a threat to its territory (Sidiki, 2016). However, the United States continues to plan, even has negotiated and reached agreements with several Eastern European countries, to build a missile defence system, including with Poland and the Czech Republic. Responding to NATO's policy, Russia then enacted a policy by strengthening military security at each of its country's borders and carrying out various counter actions including directing its missiles to Ukraine which is a NATO ally (Clarasanti, 2019). Russia did it because of a sense of concern for Ukraine that was allegedly threatening Russian security.

Russian Interests In Eastern Europe In Terms Of Security

For Russia, Eastern Europe is undoubtedly a significant and strategic region in the history of the Russian nation (Clarasanti, 2019). There are at least two significant events in European history that emphasize the importance of the Eastern European region for this white bear country. First, France in the Napoleon Bonaparte era had tried to attack Moscow in 1812. Secondly, Germany in the era of Adolf Hitler had also tried to attack Russia in World War II in 1941, even though Russia repelled the German army (Hatzivassiliou, 2012). These two significant events show that, in terms of geopolitics and security, Russia is indeed vulnerable and has been the target of attacks from aggressive neighboring countries located in the West (Karsten, 2008). That is the historical and geopolitical reason for Russia of the need for the sphere of influence and buffer-zone in Eastern Europe to withstand the possibility of

various attacks from the western region.

During the Cold War, Russia in the Soviet Union era managed to get an adequate buffer-zone for the strategic interests of the countries that joined the Soviet Union (Ukraine, Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova). These countries are part of the Soviet Union located in Eastern Europe (Dragneva, Rilka, & Wolczuk , 2013). Buffer-zone for Russia also from satellite communist countries in Eastern Europe (Poland, Bulgaria, Romania, Czechoslovakia, and East Germany). To compensate for the military power of the West, the Warsaw Pact military alliance was established and based in the city of a satellite country in Eastern Europe, namely Warsaw, Poland. However, the geopolitical and geostrategic map has entirely changed since the Cold War ended (Karpova, Karpov, & Kruchkov, 2015).

Towards the end of the cold war, the communist countries in Eastern Europe fell one after another and turned towards democracy. Likewise, because economic bankruptcy and the failure of political institutions was inevitable, the Soviet Union finally dissolved (Hudson, 2014). As the sole "heir" state of the Soviet Union, Russia seeks to retain its remaining influence in the countries of the former Soviet Republic by forming a Commonwealth of Independent States (CIS). However, Russia is slowly but surely increasingly abandoned by the countries of its former allies.

Russia's Interest in the Ukraine Conflict

The new round of outbreaks of tension between the West and Russia occurred when Russia surprised the annexation of Ukrainian territory, that is, the Crimean Peninsula (Sidiki, 2016). The incident occurred after the outbreak of the political crisis in Ukraine after President Viktor Yanukovich refuses to sign a trade agreement with the European Union. The policy sparked the anger of the pro-Western Ukrainian people so that they held large-scale popular demonstrations in the city of Kyiv (Hanifah, 2017). The peak of tension occurred when a bloody incident broke out in Kyiv which killed approximately 67 demonstrators; President Viktor Yanukovich finally stepped down in

February 2014, who then fled and requested protection to Russia (BBC, 2014).

Russia certainly has an interest in strictly following the development of the political crisis in Ukraine. For Russia, the tragic fall of President Yanukovich, who is pro against Russia, will undoubtedly cause Russia to lose soon another close friend, Ukraine (Svarin, 2016). Indeed, Ukraine, led by a new president who tends the West, will soon follow in the footsteps of other former communist countries that reoriented their foreign policy to the West and left Russia (Karsten, 2008). As popular domino theory during the Cold War, the theory also applies when one Russian ally fell into Western hands. The other Russian ally followed the measures and fell into the West align or the European Union (Kropatcheva, 2012). Russia lost in gaining influence and economically harmed. Several factors have become Russia's critical strategic toward Ukraine.

First, it is a factor in Russia's strategic importance. Russia has long had a naval military base in Sevastopol in Crimea. The strategic naval base was leased by Russia from Ukraine and extended until 2042 (Orttung & Overland, 2011). The extension of the naval base lease contract with Kyiv could occur only because of a quite tough diplomacy. This base is very strategic for Russia because it is at this Black Sea base that Russian warships remain free to operate in winter. After all, the sea is not frozen (Richterova, 2014). The Russian base lease contract in Ukraine might not be a problem as long as the government in Kyiv is on Moscow's side. However, with the fall of pro-Moscow President Yanukovich, the future of Russia's strategic naval base could become uncertain (Svarin, 2016). As a strategic point of military power in the Black Sea, Russia certainly will not give up the possibility of closing this naval base in the future. For Russia, annexation is a rational choice of action.

Second, psychological factors. After the Cold War broke out, Russia under Boris Yeltsin re-orientated its foreign policy slowly to approach the West (Andrei, 2010). However, Moscow was disappointed that the West still had a distrust of Russia. For years Russia tried but failed to achieve what it

wanted most: regular membership to the West and economic prosperity (Friedman, 2012). Russia has indeed become an exclusive member of the G8 group. However, Russia has never enjoyed the same status as the other seven member states, Russia still considered as "the other." Economically, the shock therapy proposed by the West and implemented sincerely by Boris Yeltsin did not bring the expected economic progress (Karsten, 2008). However, Russia's economy deteriorated, causing the average life of Russian society to decline from before. By carrying out the annexation of Crimea, Russia wants to prove to the West that Russia is a big country that does not receive underestimation and mock.

Third, President Vladimir Putin has ambitions to reawaken the glory of Soviet Russia (Dimitri, 1999). When the Russian economy is getting better, the West faces various problems. In 2008 the economic crisis shook the American economy and then followed the debt crisis in several EU member states. Oppositely, Russia began to rise as an economic force that could support the recovery of the crisis in the European Union (Mau, 2016). At this time, Britain, France, or even Germany are busy asking Russian oil entrepreneurs to buy and make more investments (Myers, 2015). President Putin, and his desire to restore the imperial domination of the Soviet Union's fraction states under the name New Russia, will pose geopolitical challenges. Not only for neighboring Russia but the US over Europe.

Russia's Economic Interests In Eastern Europe

Russia's relations with post-Soviet countries have changed since the collapse of the Soviet Union, forming the Commonwealth of Independent States (CIS). CIS was formed in December 1991 with membership from Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan (cis.minsk.by, 2021). The membership of these countries in the CIS results in the country cooperating on issues as diverse as economy, defense and foreign policy. This then becomes the basis

for the approval of member countries to cooperate in various fields of internal and external policies in security and economic (Putri, 2017).

The global economic and financial crisis has affected Russia's geopolitical views in post-Soviet integration. The process of globalization and global competition does not allow any country, including Russia, to act alone, it forces to seek allies in the new multi-polar world (Kanet, 2010). At least, Russia is trying to realize the potential of the Customs Union and Common Economic Space of Russia, Kazakhstan and Belarus, with the hope that Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Ukraine and several other countries will join later (Federation, 2010). In this stage, the main focus is the maximization of free movement of goods, services, capital and labor. President Vladimir Putin stated that regional integration around the world follows this path of the most effective efforts to maximize domestic growth resources and strengthen competitiveness in global markets (Myers, 2015). Shared strengths will be more reliable and more comfortable to face global challenges together.

Based on the considerations above, the Eurasian Economic Union was a "community of equal partners". Eurasia is not synonymous with Russia, despite Russia's dominant role as the owner of the largest economy in the region, the Eurasian project, at least from a political point of view, cannot develop surrounding Russia itself (Dragneva, Rilka, & Wolczuk , 2013). However, the political aspects of Eurasian integration did not reduce its economic interests. Russia, with its economic strength, must offer incentives for cooperative projects in this "multi-polar club" (Aunders, 2008). It means that Russia has the basis of making administrative and ideological leadership claims in building this Eurasian Economic Union.

The development of Russia's position in cooperation in the East Asian region still has many serious challenges. Russia's domestic factors will be crucial in the efforts to improve Russia's economic relations to the east (Karsten, 2008). At least the focus of economic integration in the Siberian region and other Russian regions in the direction called "Far East" Russia still

needs to be developed to have the same level as other East Asian countries, especially China, Japan, South Korea (Malle, 2017). Russia must also solve other crucial problems to overcome the perception that Russia is geographically part of East Asia. However, economically and politically, it is still seen as an "external player" in the region (Nurhasanah, Napang, Rohman, 2020). For Russia, Eastern Europe is a critical region in the country's politics, economy and military. For example, Ukraine, which, to this day, is a connecting bridge that supplies gas from Russia to Europe (Kouldunova, 2016). Besides, the state of the Ukrainian economy that is dependent on exports of steel, coal, fuel and petroleum, chemicals and grains to Russia has its advantages for Russia.

In addition, Russia maximizes the CIS member countries that will buy natural gas and oil from Russia to meet their energy needs. This cooperation in the energy sector was manifested at the meeting of The CIS Council of Heads of State in Yalta, Crimea on 25 May 2007 to discuss energy issues where Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan signed an agreement to form a common energy market that has the intensity of expanding. Trading in electricity and increasing access to energy resources in CIS member countries. Meetings are held periodically by the CIS member countries at different places but in the capitals of the CIS member countries. The activities carried out by the CIS are actually based on a charter that upholds equality of sovereignty by member countries where the independence of member countries is highly respected. In this CIS, there is no supranational force or power over the country leading the highest position. There have been developments in the membership of the CIS countries, such as in November 2009 where the three main members of the CIS namely Russia, Kazakhstan and Belarus agreed to form a custom union which opened the door to a single economy.

Based on the writings of James T. Quinnlivan and Olga Olikier (2011), Russian foreign policy is actually rooted in the national goal of protecting the

life and dignity of Russian society and protecting the interests of its business community so that Russia will respond to all aggressive actions shown to its country. From this sentence, it can be seen that Russia will not remain silent in responding to threats posed by Western countries such as the European Union and the United States, especially those that have the potential to reduce Russia's influence in the Eastern European region in terms of security or economic.

Economic Sanctions on Russia

Russia's actions to annex Crimea and its intervention in Eastern Ukraine violated the norms of international law and international order (Sulastri, 2013). However, the problem is once again not a legal problem but a political and national security issue of Russia. Russia is a high power or even still a military superpower in the sense that its military capabilities are still among the strongest in the world (Kanet, 2010). Aside from Russia being the most significant nuclear nation, Russia is not an arbitrary country because its political position is powerful because it is a permanent member of the United Nations Security Council (UN) (Aunders, 2008). For the United States and the European Union, it is precisely this kind of response that is fitting to punish Russia.

Efforts that have been made by the West are to carry out diplomatic isolation and economic sanctions against Russia, although both are not without problems (Hanifah, 2017). From the beginning, the United States and the European Union carried out an intensive diplomacy drive and agreed to condemn Russia for its actions. The West warns Russia that the West is ready to increase tougher economic sanctions if President Vladimir Putin intervenes more broadly in the territory of Eastern Ukraine (Keliat, 2006). In its implementation, the leaders of the Advanced Country Group (G8) agreed to dismiss Russia as a member until President Putin wanted to change his attitude. The G7 then holds a summer meeting in Brussels, symbolically meeting at the Headquarters of the European Union and NATO, two

organizations that are strengthening relations with Ukraine (Richterova, 2014).

On the other hand, Russia then supported the holding of a referendum in Crimea. It acknowledged that the referendum was legitimate in declaring Crimea an independent state incorporated in the Russian Federation (Andrei, 2010). It considered the annexation of territory and was illegal by the EU and Ukraine. On this basis, the EU provides sanctions against Russia in the form of economic sanctions namely the freezing of assets of several Russian companies and individuals and a ban on entry to the EU against high-ranking Russian officials (Fadli Adzani, 2015). The sanctions came into force on March 17, 2014 (Hanifah, 2017).

The policy of Russian President Vladimir Putin continues to come under pressure from Western economic sanctions (Karpova, Karpov, & Kruchkov, 2015). A series of sanctions imposed by the EU and the US, the first step of the US has announced the prohibition of visas and blocking of assets to Russian officials who are in the US and take precautions if there are US citizens who want to do business with Russians and Ukrainians (Wolff, 2015). The US will also prepare a legal basis to impose further sanctions on individuals.

This strong response from the US is not much different from the EU response. The EU Council said that they condemned all forms of violence that had befallen Ukraine (Pujayanti, 2014). Therefore, based on Decree 2014/119 / CFSP, the EU Council decided to freeze funds and assets of 18 people who have misused Ukraine's state funds and for violence and human rights violations that occurred during demonstrations against the government.

Despite the economic difficulties in Europe, the EU continued to move to put pressure on Russian natural gas imports in Europe began to be fruitful (Hanifah, 2017). Russia, which is a major supplier of European natural gas needs, with around 80 per cent of it channelled through the instability of Russian gas exports to Europe so that the Russian economy disrupted. On the other hand, Russia's efforts to find a new route in channelling its natural gas

through Bulgaria have stalled. Under EU pressure, Bulgaria terminated project agreement with Russia in the southern route natural gas, by suspending the 'South Stream' pipeline project on its territory (Myers, 2015). The termination of this project, when its exports in Ukraine had not yet recovered, it significantly disrupted the Russian economy that was on the verge of recession. In short, economic sanctions and EU political pressure have damaged the Russian economy that is on the verge of recession.

The EU then extended sanctions given to Russia because it never stopped interfering in Eastern Ukraine, namely the EU banned all member states from importing weapons from Russia (Wolff, 2015). The access of Russian government banks to capital also restricted. Large Russian oil and gas companies will no longer get credit from the EU. The gas companies that received sanctions were Gazprom, Rosneft and Transneft. Whereas in military cooperation, the EU broke the cooperative relationship with the airline United Airport Corporation, as well as the arms company Kalashnikov (BBC, 2014). With these sanctions, Russia threatens back EU. Russia bans all flights from Europe to Russia. Russia also cut gas flows to Poland and Austria. Russia implemented a policy of cutting gas flow to Poland by 50%. Whereas in Austria a reduction of 15% of the amount that should be received (DWNNews, 2014)

Facing political and economic pressure on his country, Russian President Vladimir Putin began to be pragmatic by calling for improved relations between Russia and the US (Conley, Mina, & Nguyen, 2016). After that, President Putin puts Russia as an equal partner who must work together to take responsibility for maintaining global security (Sidiki, 2016). By these facts that the EU economic embargo against Russia is a strategy of EU in confronting with Russia. It shows that EU capabilities are higher from Russia. The proof is the EU cooperation with NATO in terms of the military to rival Russia and the EU cooperation with Turkmenistan and other oil-producing Central Asian countries to overcome its energy dependence on Russia (Federation, 2010). Besides, the enlargement of EU was a form of recognition

power of the EU over European areas. The participation of European countries to the EU has proved that.

CONCLUSION

The expansion of NATO's territory and influence into Eastern Europe has led to tensions between NATO and Russia. This tension occurred because several post-Soviet countries joined NATO, this was marked by the existence of military bases that continued to expand into Eastern Europe and Central Europe. This military base was created to maintain the security of members within NATO, but Russia feels the military base is an attempt to weaken Russia's influence in Eastern Europe. In addition, even though NATO's defense approach is directed at third countries, Moscow considers it a security threat to Russia. The tension was also exacerbated by the conflict that occurred in Ukraine, the domestic conflict in Ukraine which caused the European Union, NATO and Russia to become involved in this conflict, this is the fact that the conflict in Ukraine is a conflict between the European Union, NATO and Russia.

Apart from the perspective of influence and security, Russia also has an economic interest in eastern Europe. Russia, which received economic sanctions from the United Nation due to conflict intervention in Ukraine, caused Russia to maximize its Eastern European countries for economic sustainability. The energy trade between Russia and countries in Eastern Europe encourages the formation of cooperative relations in the economic sector due to the export and import trade. The cooperative relationship in the economic sector between Russia and countries in the Eastern European region has made them important trading partners to ensure the sustainability of the country's economy. Therefore, Russia and several post-Soviet Eastern European countries formed the Commonwealth of Independent States (CIS) as a forum for post-Soviet state cooperation. The membership of countries in the CIS causes the state to cooperate on issues as diverse as economy, defense and foreign policy. This is very beneficial for Russia both in terms of influence and economy.

REFERENCES

- Andrei, P. T. (2010). *Russia's Foreign Policy Change and Continuity in National Identity*. . . Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, inc.
- BBC. (2014). <http://wwwnews.live.bbc.co.uk/news/world-europe-25182823>. Accessed, Saturday 12 September 2020.
- Clarasanti, C. (2019). *Strategi Militer Rusia Terhadap Peningkatan Presensi Militer Nato Di Eropa Timur, 2014-2017*. Bandar Lampung : Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung .
- Conley, H. A., Mina, J., & Nguyen, P. (2016). *A Rebalanced Transatlantic Policy toward the Asia-Pacific Region*. Washington, D.C: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- CIS. (2021). <https://cis.minsk.by/site/about-cis>. Accessed, Saturday 12 September 2020.
- Dragneva, Rilka , & Wolczuk , K. (2013). *Eurasian Economic Integration : Law, Policy and Politics*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- DW.(2021) <https://www.dw.com/id/sanksi-baru-terhadap-rusia-mulai-diterapkan/a-17917673>. Accessed, Saturday 12 September 2020.
- Federation, M. o. (2010). *Energy Strategy of Russia For the Period Up to 2030*. Moscow: Moscow: Institute of Energy Strategy.
- Friedman, G. (2012). *The Next Decade : Empire and Republic in A Changing World*. New York: Anchor Books.
- Hanifah, U. R. (2017). Embargo Ekonomi sebagai Strategi Konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015. *Jurnal Sospol, Vol 3 No 2 Juli-Desember*, 169-195.

- Hatzivassiliou, E. (2012). Revisiting NATO's Stabilizing role in South Eastern Europe: The Cold War Experience and the Longue Durée. *Southeast European and Black Sea Studies Vol. 12, No. 4.*
- Hudson, V. (2014). Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. *Plymouth: Rowman & Littlefield.* , Pp. 1-73.
- Hutabarat, L. F. (2017). Eurasianisme dan Kebijakan Luar Negeri Rusia. *in Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.*
- Kanet, R. E. (2010). Russian Foreign Policy in the 21st Century. *New York City: Palgrave Macmillan*, Pp. 246-266.
- Karpova, A., Karpov, D., & Kruchkov, Y. (2015). Russia's new engineering policy in global politics. *Procedia - Social and Behavioral Sciences 166*, 530 – 535.
- Kazantsev, A. A. (2015). *Eurasian Perspectives on Regionalism : Central Asia and Beyond*”, dalam Piotr Dutkiewicz and Richard Sakwa (Eds), *Eurasian Integration – The View from Within*. UK: Oxford : Routledge.
- Khanna, P. (2016). *Connectography : Mapping the Global Network Revolution*. London : Weidenfeld & Nicolson.
- Kouldunova, E. (2016). Russia’s Involvement in Regional Cooperation in East Asia : Opportunities and Limitations of Constructive Engagement. *Asian Survey. Vol. 56. Number 3*, pp. 532-554.
- Kropatcheva, E. (2012). Russian foreign policy in the realm of European security through the lens of neoclassical realism. *Journal of Eurasian Studies 3 (2012)* , 30-40.
- Lukin, Alexander & Yakunin, Vladimir (2018). Eurasian integration and the development of Asiatic Russia, *Journal of Eurasian Studies 9 (2018)*

100–113

- Malle, S. (2017). Russia and China in the 21st century. Moving towards cooperative behaviour. *Journal of Eurasian Studies* 8, 136–150.
- Mau, V. (2016). Anti-crisis measures or structural reforms: Russian economic policy in 2015. *Russian Journal of Economics* 2 , 1–22.
- Myers, S. L. (2015). *The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin*. Toronto: Penguin Random House.
- Nuttalla, W. J., Samaras, C., & Bazilian, M. (2019). Energy and the military: Convergence of security, economic, and environmental decision-making. *Energy Strategy Reviews* 26 (2019) 100409.
- Nurhasanah, Siti., Napang, Marthen., Rohman, Syaiful (2020). Analyzing American Values in Belt and Road Initiative (BRI). *International E-Journal of Advances in Social Sciences* 5 (15), 1439-1447
- Nato (2021). https://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm. Accessed, Saturday 12 September 2020.
- Orttung, R. W., & Overland, I. (2011). A limited toolbox: Explaining the constraints on Russia's foreign energy policy. *Journal of Eurasian Studies* 2, 74–85.
- Pringgondani, S. (2016). *Kebijakan Pertahanan Rusia dan Dampaknya Terhadap NATO*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Putri, Alhayyu Shafira Wahyu (2017). *Kepentingan Nasional Rusia Dalam Upaya Pemaksimalan Kekuasaan di Kawasan Eropa Timur*, Universitas Gadjah Mada.
- Pujayanti, A. (2014). *Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Ukraina*. *Info Singkat hubungan internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data*

dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI www.dpr.go.id ISSN 2088-2351 - Vol. VI, No. 13/I/P3DI/Juli/2014.

Quinlivan, James T., and Olga Oliker. (2011). *Nuclear Deterrence In Europe: Russian Approaches To A New Environment And Implications For The United States*. Santa Monica: RAND Corporation.

Rahyuni, S. (2012). *Kebijakan Pertahanan Rusia Dan Dampaknya Terhadap Nato*. Makassar: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin .

Richterova, J. (2014). *NATO-Russia Relations. Background Report, Prazsky Studentsky Summit*.

Sidiki, R. R. (2016). *Pengaruh Perluasan NATO ke Eropa Timur Terhadap Konflik Ukraina*. Bandung: Universitas Pasundan.

Sulastri, A. (2013). *Politik Energi Rusia dan Dampaknya terhadap Eropa terkait Sengketa Gas Rusia-Ukraina 2006-2009 . Jurnal analisis hubungan internasional Vol. 2 - No. 3 / 2013-09 TOC : 3, 33 - 57.*

Svarin, D. (2016). *The construction of 'geopolitical spaces' in Russian foreign policy discourse before and after the Ukraine crisis. Journal of Eurasian Studies 7, 129–140.*

Wolff, A. (2015). *The Future of NATO Enlargement After the Ukraine Crisis. International Affairs, 91(5).*

Yakovlev, A. (2016). *What is Russia trying to defend? Russian Journal of Economics 2, 146–161.*

Hukum dan Politik: Studi Ambang Batas Presiden dalam Pemilu 2019

Law and Politics: Study of the Presidential Threshold in the 2019 General Election of Indonesia

JM Muslimin¹, Ahmad Fadoliy², Wildan Munawar³

¹Islamic State University Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan,
Banten 15419

² Islamic State University Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan,
Banten 15419

³Djuanda University Bogor, Jalan Tol Ciawi No 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16730
*corresponding author E-mail: wildan.munawar@unida.ac.id

Diterima: 25 September 2020; Direvisi: 7 Februari 2021; Disetujui: 7 Maret 2021

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia selalu mengalami dinamika yang pesat dalam pengembangan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dikombinasikan dengan empiris. Penelitian normatif terfokus pada aturan dan acuan positif normatif. Sementara empiris, lebih fokus pada data lapangan yang diambilkan dari dinamika ide dan gagasan di lapangan. Pendekatan historis kemudian dikombinasikan untuk menajamkan analisa dan pembacaan masalah secara lebih kritis dan evaluatif. Khususnya di dalam perdebatan di Panitia Khusus untuk persiapan regulasi tentang Presidential Threshold. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan ambang batas presiden 20% dalam penyelenggaraan Pilpres 2019 mengandung substansi hukum ortodoks. Hal ini karena secara politik hukum pembentukannya (UU No. 7 Tahun 2017) sarat dengan kepentingan politik praktis partai yang berkuasa. Partai yang terdiri dari 6 fraksi memberikan opini dominan yang condong ke ambang batas 25%-30% yang disarankan pemerintah, sedangkan 4 fraksi lainnya tidak setuju dengan ambang batas pencalonan yang tinggi, karena konsep pemilu harus memberikan ruang bebas bagi masing-masing partai untuk mencalonkan calon presidennya. Pemerintah memiliki agenda sendiri untuk melanjutkan dan memperpanjang presiden yang ada saat ini dan mencegah kemungkinan untuk orang lain. Oleh karena itu, untuk melindungi agenda, diusulkan ambang nominasi yang tinggi. Melalui analisis isi regulasi tersebut dapat dikatakan bahwa ambang batas yang tinggi memiliki konsekuensi logis dalam penyelenggaraan pemilu yang menciptakan lingkungan pemilu yang tidak substansial dan membuat iklim politik di Indonesia tidak seimbang.

Kata kunci: Hukum otoriter, hukum dan politik, substansi ortodoks, presidential threshold

ABSTRACT

This study is intended to indicate that Indonesia's electoral system always experiences rapid dynamics in policy development. This study uses empirical normative legal research or a legal research method that uses a set of regulation relating to general elections and the rules of making positive law as reference of norms. Empirical research is also used to observe the results of human behavior in the form of physical archives. The methods are combined with the historical approach: an approach that is carried out by analyzing the debate arguments that occurred in the special committee meeting (Panitia Khusus) of the Election Draft Bill. The result of this research is the decision of the presidential threshold of 20% in the holding of presidential elections of 2019 contains the orthodox legal substance. This is because politically the law of its formation (Law No. 7 of 2017) is full of practical political interests of the ruling parties. Parties consisting of 6 factions gave a dominant opinion which leaned towards the 25% -30% threshold suggested by the government, while the other 4 factions do not agree with the high nomination threshold, because the concept of election must provide free space for each party to nominate their respective presidential candidates. The government had its own agenda to continue and extend the existing incumbent president and prevent the possibility for others. Therefore, in order to protect the agenda, high nomination threshold was proposed. Through content analyses of the regulation it can be stated that the high threshold has logical consequences for holding elections which create an insubstantial election environment and make the political climate in Indonesia unbalanced.

Keywords: Authoritarian law, law and politics, orthodox substance, presidential threshold

INTRODUCTION

General elections must be held periodically, this is due to several reasons, namely, *first*, people's opinions on election policies always change according to the demands of the time. This is because socio-cultural developments always demand changes in the latest circumstances. *Second*, some aspects affect internally and externally. Externally this is influenced by changes in the international world and internally is changed in political will and conditions within the country itself. *Third*, it is influenced by demographic factors or the increasing number of adult residents who already have constitutional political rights (Asshiddiqie, 2008).

The implementation of the general election was originally intended to elect legislative members namely (DPR, DPD, and DPRD). After the 4th

amendment of the 1945 Constitution, there was a change to the institutional system that was originally the president appointed by the MPR to be a direct election system by the people. This direct democracy is called by Abraham Lincoln as "government of the people, by the people, and for the people" (Bastian, Luckham, & Goetz, 2003). It is the amendment that describes partially about democracy as well as a logical consequence of the democratic state itself (Oetama, 2001).

The practice of holding presidential and vice-presidential elections which began in 2004 until 2014 is conducted periodically or in the time after the legislative elections. There may be a grace period created to make the results of legislative elections (parliamentary threshold) become a reference/ticket to nominate a presidential candidate with a predetermined threshold.

Normatively, this can be seen in the provisions of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning election which states that a candidate pair is proposed by a political party or a combination of political parties participating in the General Election that meets the requirement of obtaining seats in the DPR at least 20% or obtaining a valid national vote as much as 25% in legislative elections. With this periodic mechanism, it can guarantee a balanced supporting axis between incumbent and opposition, so that when the government runs, it will not be one of the more dominant institutions and negate the system of checks and balances (Wisnewski, 2014).

In addition to the periodic elections to stabilize stable political conditions, a threshold mechanism for presidential nominations or presidential thresholds that has been used in the 2014 elections has also been created. However, it becomes a problem if the periodic elections become simultaneous and use high thresholds in presidential nominations. This will have an impact on the political intensity and the tug of war in the election will occur, even it will have an impact on the decline in the quality of democracy in the election. This provision can be seen in the decision of the Constitutional

Court Number 14 / PUU-XI / 2013, which decadently requires the legislative elections to be held simultaneously in conjunction with the presidential election.

Hence, some problems come: *first*, the simultaneous holding of elections using the concept of the high presidential threshold will cause uncertainty. That is from which percentage of presidential threshold to nominate presidential candidates will be taken. If the determination of the nomination threshold is based on the previous year's legislative elections it will credit the possibility of new parties or parties that were not previously included to be able to enter parliament.

Second, the problem that will arise if a high threshold is applied by simultaneous elections is the possibility of a dominant coalition against parties whose presidential candidates win the presidential election. In the sense of the loss of opposition as a counterweight to the power, because if the elections are simultaneous, parties will automatically vote in coalition with the winning party. *Third*, this concept will have the effect of dividing the supporters who are divided into only two camps. This is because with the high threshold *mutatis mutandis* will create only 2 presidential candidates in the election contestation (Budiardjo, 2003). Furthermore, the intensity or pressure on supporting fanaticism is not broken down and is focused on just two presidential candidates. Thus, in turn, it will decrease; the important role of law as a tool to translate the political situation and interests into good ideas for democratic development.

There were several studies related to this research. Lytha Dayanara (2017) wrote The Relevance of the System in the Simultaneous Election Implementation Model. The content of this thesis is merely to discuss the relevance of the system in Indonesia to hold simultaneous elections. While in this article, the writers discuss the politics of law or the interests that cause the emergence of rules regarding the presidential threshold in the holding of simultaneous elections. Mirza Nasution (2015) wrote Political Law in the

Indonesian Constitutional System. The writing discusses the political state of law, the legal system and the politics of legislation in Indonesia. While this article focuses more on the politics of law that arises in making rules related to the presidential threshold. In the journal written by Ayon Diniyanto (2018) under the title of Measuring the Impact of Implementing the Presidential Threshold in the 2019 Simultaneous Elections, can be found the discussion on the impact of implementing the presidential threshold which is held in simultaneous elections. It is explained that Indonesia is holding simultaneous elections for the first time. Hence the journal emphasizes the negative things that will occur if elections are held simultaneously. The difference is that the researchers in this article responds more to the impact caused by the abuse of legal politics in making rules related to the presidential threshold.

RESEARCH METHOD

Content analysis of legal drafts in the series of deliberations in the People Representative Assembly (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) will be done. This discussion is the main reference in deciding legal products that may have certain characteristics. Conceptually the process of debating a draft will determine characteristics of legal products. For this reason, the discussion will focus and conclude the underlying legal politics of the presidential threshold.

The using of Political Interests Theory is inevitable in this research. Political interests are interests created by humans in regulating relationships between one another (Budiardjo, 2007). In the interaction between one another, political interests are contained in a political system. Interest in any system can be described as input and output. The input itself represents the demands and aspirations of the community as well as support from the community, these inputs are then processed into policies and regulations.

Gabriel A. Almond emphasized that political interests have a strong relationship with the political process which begins with the inclusion of demands that are articulated and aggregated by political parties, so that these special interests become a more general policy proposal, and are subsequently

incorporated into the policy-making process that is carried out by the legislative and executive bodies (Yana, 2016). Thus, political interests are closely related to political infrastructure activities such as pressure groups and political parties as well as the political superstructure such as the executive and legislative branches. According to Abercrombie, Hill, and Turner, the study of the political process focuses on the activities of parties and interest groups, internal organizations, the nature of political decision-making, and the roles and backgrounds of politicians (Oman, 2016). The Interest groups are represented by the political parties which involve in the debate of the Bill.

RESULT AND DISCUSSION

Legal Politics in Forming Legal Products

Political law is the process of policy formation that occurs within a state institution authorized to form policies and regulations, to achieve the expected and desired goals of the state. The formation process will later produces a product of policies and regulations aimed at public interest (Soedarto 1983). Sunaryati Hartono holds a view regarding legal politics and is outlined in her book entitled Political Law Towards a National Legal System. In the book, legal politics is seen as a tool or a way to realize the ideals of the nation which are conveyed and outlined in the formation of national law through the government (Hartono, 1991). Abdul Hakim G Nusantara focuses legal politics into national legal politics. According to him, national legal politics is the effort of the government of a country that wants to implement nationally a legal policy (Thohari and Syaukani, 2006).

National legal politics has several characteristics including consistency in the implementation of existing law, revitalization of laws that aim to replace laws that are considered obsolete with laws that adjust the times, reinforce the function of legal institutions as well as coaching members, and emphasize the views of policymakers into legal awareness in society (Thohari and Syaukani 2006).

Essentially, several important points or points form the basis of the

implementation of national legal political development. *First*, the foundation which is based on the norms of national and state life as well as the law with the spirit of Pancasila (ideal foundation). Second is the operational foundation, this foundation has several characteristics, i.e (Rahardjo, 2006):

1. A law that provides justice and prosperity, meaning that the law must be used as a tool or a means of renewal for the benefit of the people's welfare. Therefore, the formation of law must be harmonious and adapt to the concept of the welfare state, because the law is for humans.
2. The creation of a strong democracy because of the law is formed here to strengthen democracy and must be based on a concept that emphasizes the sustainability of democracy and has the mindset of grounding democratic idealism in political life, therefore a legal foundation is needed that holds fast to democratic goals with the support of strong moral content.
3. Laws that guarantee the basic rights of citizens. The point is that the law created must prioritize human rights.
4. The law aims to guide the Unitary Republic of Indonesia. In the formation of law, the creation of an increasingly strong NKRI is the basic foundation that must be present in the drafting of legislation.
5. Single diverse law; in the formation of law, one must pay attention to various kinds of differences, such as socio-cultural diversity and the many groups that exist, by sticking to the basis of the state and the priority of national unity.
6. Laws were created to protect the nation and spill the blood of Indonesia.

These foundations become the main axis in forming a legal product. The formation of legal products cannot be separated from nuances that are full of interests. In another view, the formation of law that has the interests of lawmakers can be dissected through political configurations. In *Raison D'atre*, the political configuration can be interpreted as the political will that exists and influences decisions on regulation-making. The formation of this regulation is in the realm of legislative institutions whose existence is

inseparable from various political wills. The concept of lawmaking is procedurally formed based on the political interests of various factions in the People Representative Institution (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) that affect the characteristics of legal products. (Marpaung, 2012). Factually, each legal norm is a transformation of a particular political configuration, so that its characteristics will affect the quality of a legal product (MD, 1993). For this reason, the making of regulations must be aimed at the ideal law and by the mandate of the constitution.

The political configuration exists as a representative of a structure, political views and political system whose existence is evidence that the country adheres to a political-democratic or authoritarian system (MD, 2006). A country that adheres to a democratic political system can be seen from the application of the rule of law, freedom of opinion, and people's participation. This will have logical consequences that the law will be responsive (Mayo, 1960). Whereas a state that has an authoritarian political system will have an impact on political structures that are fascist-conservative, meaning that political attitudes that are always taken are top to down so that it will limit people's freedom of opinion or in the sense of a political structure built to be conservative and orthodox (Dahrendorf, 1986). Both schemes are not absolute because democratic political systems can produce orthodox legal character both formally and materially (Anggoro, 2019).

To achieve the true essence of the law and achieve the welfare of the people, the formulation of rules through legislation systems is mandatory (Courtney and Smith 2010). For this reason, the practice of governing the government must create the quality of national law in achieving legal objectives, namely certainty, justice, and expediency. These goals are the responsibility of members of the DPR, DPD, DPRD, and the Government.

Issues of Election and the Determination of Presidential Threshold

The debate is the first round of a political process that revolves on every crucial issue, in which decisions on these crucial issues become an important

element for the continuation of political parties in the next election. The tug of war on several crucial issues that will receive special attention is evidence that the strong competition for power between factions since the beginning of the discussion at the special committee level. Initially, in the 4th Special Committee Meeting on February 13, 2017, the crucial issue was based on the Inventory List compiled by the Parliament as well as from the government which was agreed in 16 points. Then, this crucial issue increased to 18 crucial issues when the Special Committee member of the *Golkar* faction expressed their views on the urgency of the gender issue in this discussion. The addition of this crucial issue occurred at the 4th Working Meeting on February 13, 2017. Finally, after lobbying between factions, it was agreed to classify important issues at the 5th working meeting, on February 16, 2017, from 18 important issues to 5 issues to facilitate discussion and sharpen the comments.

Related to 5 crucial issues (Kami 2017) *The first* is a discussion of the legislative election system. in this case, the government takes a stand by proposing a limited open proportional system through Article 138 paragraphs 2 and 3 of the Election Bill. An open proportional representation system is a consideration to encourage candidates to compete in mobilizing mass support for their victory (Halim 2015). This can be categorized as a breakthrough, in which this system has never been practiced during the General Elections in Indonesia. *Second*, related to parliamentary threshold. According to the government in the Special Committee meeting, one of the objectives of the application of this rule is to create a simple multiparty system. The debate that arises related to the logic of government is not the number of political parties participating in the General Election which must be limited but rather the ideal number of political party forces, which needs to be empowered and streamlined in the DPR.

Third, presidential threshold, this issue is about the threshold for political parties that want to carry a presidential candidate. *Fourth*, regarding the electoral districts (electoral districts). Related to the discussion of this

issue, there is one important point that arises, namely regarding the structuring of electoral districts that occur in the 2019. Election is the magnitude of electoral district or district magnitude (Zuhri 2018).

Fifth the conversion of votes into seats. The debate related to the conversion of votes includes two general system choices that apply in the world namely; (a). *hare quota*; the method of converting votes into chairs using the formula, the total number of valid votes divided by the number of seat allocations that must be filled. To convert votes into chairs through this method, some stages must be carried out. (b) *Saint laque*: it means that every political party participating in the election must meet the specified vote threshold, parties that do not meet the threshold will not be included in determining seats in the People Representative Assembly (*Dewan Perwakilan Rakyat/DPR*) (Zuhri, 2018). From these 5 points, it becomes a conclusion that the implementation of the General Election was carried out simultaneously.

These points become the main reasons for determining the final discussion of the Election Bill. The discussion took place at the Special Committee meeting of the Election Draft Bill with the agenda of deciding on the special committee recommendations that later the results of the decision would be brought to the plenary meeting for endorsement. However, the DPR Special Election Bill Committee had a meeting on Thursday night July 13, 2017. But again failed to decide on the 5 crucial issues.

After entering the final phase of the discussion on the Election Bill, crucial issues that became a long debate in the Special Committee meeting on the holding of the General Elections, in turn, were now able to map the political support of the factions in the DPR into five issue packages. The five crucial issues became the focus of the Election Bill because the discussion did not reach an agreement at the special committee level. The five crucial issues offered by the special committee in 5 packages that can be selected by political parties in the DPR include see table 1:

Table 1. Package of issues in plenary meeting

PACKAGE A		PACKAGE B		PACKAGE C		PACKAGE D		PACKAGE E	
<i>Presidential threshold:</i>	20-25 percent	<i>Presidential threshold:</i>	0 percent	<i>Presidential threshold:</i>	10-15 percent	<i>Presidential threshold:</i>	10-15 percent	<i>Presidential threshold:</i>	20-25 percent
<i>Parliamentary threshold:</i>	4 percent	<i>Parliamentary threshold:</i>	4 percent	<i>Parliamentary threshold:</i>	4 percent	<i>Parliamentary threshold:</i>	5 percent	<i>Parliamentary threshold:</i>	3.5 percent
Election open	System: open	Election open	System: open	Election open	System: open	Election open	System: open	Election open	System: open
DPR electoral district:	3-10	DPR electoral district:	3-10	DPR electoral district:	3-10	DPR electoral district:	3-8	DPR electoral district:	3-10
Voice Conversion: Pure Saint Lague	Conversion: quota hare	Voice conversion: quota hare	conversion: quota hare	Voice conversion: quota hare	conversion: quota hare	Voice Conversion: Pure Saint Lague	Conversion: quota hare	Voice conversion method: quota hare	conversion method: quota hare

Source: Minutes of Special Committee Meeting on Election Implementation Bill (data after processing)

Reading from the Table 1 from the debates that took place at the Special Committee meeting, 5 factions chose Package A, namely the PDIP faction, the Golkar faction, the PPP faction, the Nasdem party faction, and the Hanura party faction. While the other 5 factions, namely the Gerindra party, the Demokrat party, the PAN faction, the PKB faction, and the PKS faction, have not yet decided on one of the 5 packages offered by the Election Bill Special Committee. Finally, the Special Committee agreed on the decision on the 5 packages of issues of the Election system to be brought to the DPR's plenary session. By looking at the political map of the votes of these factions, the winner will likely be Package A, with the following counts table 2:

Table 2. Map of Political Support Plenary Meeting of Election Draft (Before Lobbying)

NO	SUPPORT PACKAGE A	SEAT	REFUSE PACKAGE A	SEAT
1	PDI Perjuangan	109	Gerindra Party	73
2	Golkar Party	91	Demokrat party	61
3	PPP	39	PAN	48
4	Nasdem Party	36	PKB	47
5	Hanura Party	16	PKS	40
	TOTAL	291	TOTAL	269

Source: Minutes of Special Committee Meeting on Election Implementation Bill (data after processing)

From the data that has been presented in the Table 2, with the acquisition of 291 votes in the voter group A package supporters of the

presidential threshold option 20% of the number of seats in the DPR or 25% of the acquisition of valid votes have won the battle and have concluded that package A is the choice that will be applied to concurrent elections. This indicates that the mechanism used in the simultaneous election is not much different from the mechanism applied in the implementation of the 2009 and 2014 elections.

The difference related to the determination mechanism is only in the parliamentary threshold which has a weighting of 3.5%, while the weight in package A has increased to 4%, and another difference that arises is the reuse of the pure *Sainte Lague* conversion method, it is the same as the mechanism used in The 2009 Election, while in the 2014 Election using the *quota hare* vote conversion method, the calculation method is using the formula V (vote / total valid votes) divided by S (seat/number of seat allocations), then the number of votes for a political party in an electoral area divided by the results of the calculation of the price of one seat, if there are still seats that have not been divided, another stage is carried out by distributing seats that have not been divided to parties that have the remaining majority of votes in sequence.

The option of determining the presidential threshold 20% of the number of seats in the DPR or 25% of the acquisition of valid votes is also offered in the Package E option, but in the package E option there is a difference that lies in the parliamentary threshold whose determination rises to 4% in Package A and remains 3.5% in Package E. The next difference is in the pure *saint lague* system in Package A while in package E that is used for voice conversion is the *quota hare* system. Previously the PDIP faction with the most votes in parliament preferred the adoption of the voice conversion method using the *quota hare* method and tended to choose Package E, but the strong choice of the Golkar faction on the pure *saint lague* voice conversion method, made the PDIP fraction through government mediation, softened to merge to choose Package A.

Package A, which was originally proclaimed and offered as an option by

the government, has a lot of support from factions in parliament almost certain to win. Although it has not yet become an official decision, the Minister of Home Affairs welcomed the increased support for package A which received new political support from the PPP faction and the Hanura party faction, where initially package A was only supported by the PDIP faction, the Golkar faction, and the Nasdem party faction. This concludes that among the 560 seats in the DPR, 291 seats or more than fifty percent outside the support of the government chose the mechanism to regulate Law No. 7 of 2017 concerning elections using package A.

At the same time, there were still factions that had not yet pursued a single political choice, namely the Democrat party faction which was still adamant with the rejection of the options contained in package A, while the Gerindra faction, PKB faction, PKS faction, and PAN faction were still divided between Package C choices and Package D. If all of these factions join in only one decision, the votes still cannot beat the votes obtained by supporters of package A. Especially if the PKB faction crosses over and participates in choosing Package A, which in the history of the PKB faction's habits has always been supporting the government in policymaking.

The long marathon process of political debate and communication has still not found common ground and has not provided clear results related to the use of mechanisms applied about Law No. 7 of 2017 on Elections. According to the mechanism in effect, the session was later suspended for lobbying. Political concessions made through the lobby remained unsuccessful so that after the plenary session reopened, decisions regarding package choices were not obtained. However, along with the lengthy pause of the meeting, it succeeded in changing the political map marked by the inclusion of PKB faction votes through intensive lobbying. They participated in choosing package A. The PKB faction joined the support of package A, then the calculation is as follow table 3:

Table 3. Map of Political Support in the Plenary Meeting

NO	SUPPORT PACKAGE A	SEAT	REFUSE PACKAGE A	SEAT
1	PDI Perjuangan	109	Gerindra Party	73
2	Golkar Party	91	Demokrat party	61
3	PPP	39	PAN	48
4	NASDEM	36	PKS	40
5	Hanura Party	16		
6	PKB	47		
	TOTAL	338	TOTAL	222

Source: Minutes of Special Committee Meeting on Election Implementation Bill (data after processing)

After a long process of voting finally, the victory was aimed at supporters of package A which was initially headed by the PDIP faction. Feeling to get political support from six factions in the DPR related to the number of factions that voted for package A, the PDIP faction suggested voting to be carried out because the meeting had taken a lot of time and had already made many decisions. This step of the PDIP faction can be said to be a form of political victory after successfully uniting the political support of the party supporting the government, while in discussions at the Special Committee level their political views often differ.

While the attitude of the PAN faction that supports package B can be said to be not directly proportional to the other government supporting factions. Political attitudes that are different from other governments are also often shown by the PAN faction in several previous cases. For example in the case of the rejection of the Regulation of mass organizations issued by the government, in which the PAN faction was the only faction of the government coalition that rejected the central government regulations of mass organizations issued by the government. Such conditions are indeed common in the existence of political support in a presidential system, because political support is not permanent, but rather the calculation of interests.

The discussion on the presidential threshold which was applied to the General Election was the discussion that drew the most attention of all factions in the DPR. Because until the deadline the DPR held a plenary session to agree on the Election Implementation Bill, discussions about the Presidential Threshold had failed several times to reach a decision.

The cause of the failure to reach the decision was the many tug-of-war interests, all factions still did not agree on the amount of the Presidential Threshold number that would later be used in the 2019 Presidential Election. If it is examined more fundamentally and deeper, the decision is not reached because each faction has different interests.

Tables 1, 2 and 3 from the facts and data presented by the researcher in those tables, it may be related to the theory of political interest as stated above: political interest is behind the legal policy (Shidarta, 2012). Because basically in the making and ratification of the Election Bill, there is political intrigue that prioritizes the interests of the party elite rather than the interests of the community, the data that has been presented prove that there is a policy behind the legal policy in the discussion of the Election Implementation Bill, especially in discussions related to percentages. presidential threshold of 20%. This happens considering how important it is to fight for seats at the executive level.

How important power is in the executive sphere in the implementation of the 2004 and 2009 Presidential Elections which were carried out after the Election for Members of Representative Institutions, according to the Constitutional Court it was found political facts that to get support for the election as President and the support of the DPR in the administration of government, if elected a Presidential candidate must have political negotiations and bargaining (bargaining) in advance with political parties which will greatly affect the running of the wheels of government in the future (Prasetyoningsih, 2014). In fact, these negotiations and bargains are tactical and momentary in nature rather than strategic and long-term, for example due to the long-term similarity of lines of struggle for political parties. Therefore, the President in fact becomes very dependent on political parties so that it can reduce the President's position in exercising government power according to the presidential government system. Thus the implementation of the Presidential Election must avoid the occurrence of political negotiations and

bargains that are tactical in nature for the sake of the moment, so as to create negotiations and strategic coalitions of political parties for the long term interests.

Before the Bill on Elections was finalized in a plenary session with all members of the DPR, the bill was discussed beforehand at a meeting attended by a special committee. In the Special Committee meeting related to the Election, Bill was attended by each representative from each faction. Each faction was represented by several faction members with varying amounts of each faction, in addition to being attended by representatives of each faction that had been designated as members of the Special Committee, this meeting was also attended by several representatives from the government, namely the Minister of Home Affairs (MENDAGRI) along with their ranks, the Minister of Law and Human Rights (MENKUMHAM) and their ranks, the Minister of Finance (MENKEU) and their ranks. Apart from being attended by representatives from the government, this meeting was also attended by members of the Regional Representative Council.

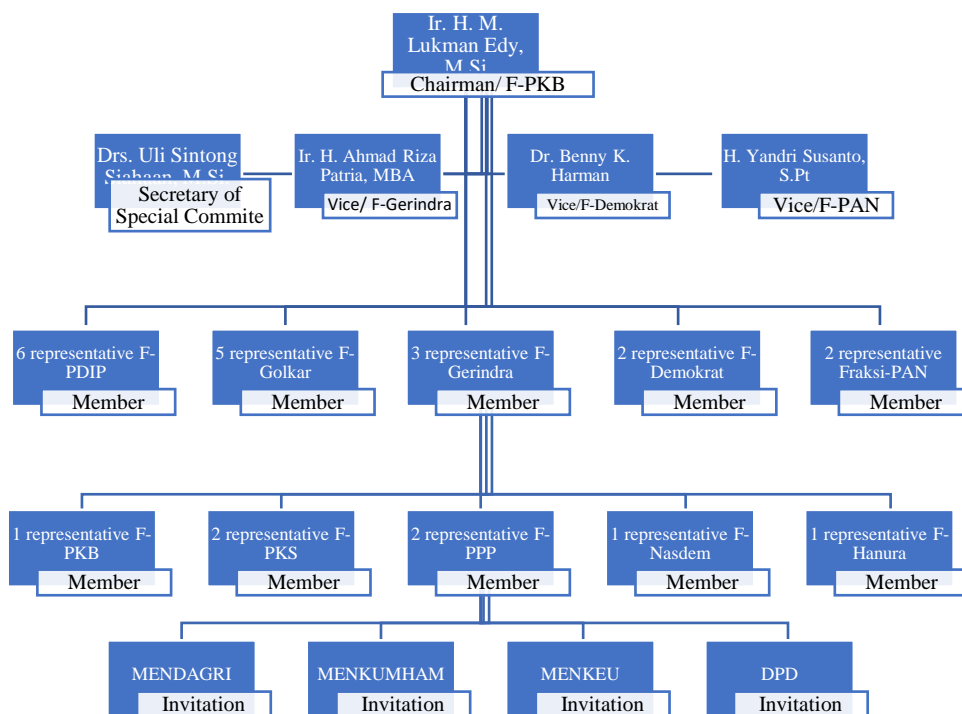


Figure 1. Special Committee on the discussion of the Election Draft Bill

In this figure 1, it is clear that the Special Committee on the discussion

of the Election Draft Bill contains 30 representatives from each party faction in the DPR. In the Special Committee, the discussion of this bill was chaired by representatives of the PKB faction accompanied by several representatives namely from the Gerindra faction, the Demokrat faction, and the PAN faction. In addition to the chairman and his representatives, the Special Committee also has members from the PDIP faction of 6 people namely; Arif Wibowo, HR Erwin Moeslimin Singajuru, SH, MH, Triemedy Panjaitan, SH, MH, Diah Pitaloka, S. Sos., Esti Wijayati, and Drs. Sirmadji, M.Pd., Golkar faction 5 people namely Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., MM, Agung Widyantoro, SH, M.Sc., Dr. Ir. Hetifah Sjaifudin, MPP, H. Ahmad Zacky Siradj, and Agun Gunanjar Sudarsa, M.Sc., 3-person Gerindra faction Ir. Endro Hermano, MBA, H. Moh Nizar Zahro, S.H., Supratman, S.H., M.H., 2-person Demokrat faction Didik Mukrianto, S.H., Ir. Fandi Utomo, 2-person PAN faction H. Totok Daryanto, S.E., Viva Yoga Mauladi, M.Si., 1-person PKB faction Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., 2-person PKS faction Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si., Sutriyono, S.Pd., M.Si., 2-person PPP faction Dr. H. Mz. Amirul Tamim, M.Si., Ahmad Baidhowi, 1-person Nasdem faction Johnny G. Plate, S.E, 1-person Hanura faction Rufinus Hotmaulana Hutahuruk.

With the many representatives of members from various factions in the Election Bill meeting, the determination related to the presidential threshold became a discussion that was colored by a lot of debate, it arose because of differences in interests of each faction. The interests of each faction in determining the presidential threshold can be classified into 3 groups, namely the threshold percentage of 20-30 percent, 0% or no threshold and the group taking the middle path is 10-15 percent.

The first classification that requires a high threshold with a range of 20-30 percent was conveyed by the Golkar party faction. In this case, the Golkar party faction wanted a presidential threshold percentage of 20-25 percent, this was also the same as the request of the PDI-P party faction who wanted the percentage reached 20-25 percent and the percentage was followed by several

factions such as the Hanura faction and the Nasdem party faction. Instead of following the four parties with a scale by the request from the government which is 20-25 percent, the PPP party faction wants a presidential threshold percentage with a higher amount of 30%,

Furthermore, the second classification does not want a threshold or 0% presidential threshold. The faction that took a stand in this classification first was the Gerindra party faction. In this case, the Gerindra party faction established itself that if elections were held simultaneously then the threshold for presidential nomination or the presidential threshold would be irrelevant. In addition to the Gerindra party faction, the faction that does not want a threshold in the holding of simultaneous elections is the PKS faction. It is also guaranteed by representatives from the Democrat faction, these three factions are equally disapproving of a presidential threshold or 0% threshold if the election is held simultaneously.

The third classification is the classification of faction groups that choose the magnitude of the presidential threshold is in the middle between the first classification with the second one. The factions in this group do not want a threshold amount that reaches 20-30 percent, because according to him the threshold is too large. This group does not want also if the Presidential Election does not use a threshold amount, because it is feared the quality of the President obtained is inadequate. In this classification, there are 2 factions, namely the PAN fraction and the PKB faction. Both parties want a threshold amount in the Presidential Election in the range of 10-15 percent. For more details, the last position of each faction is listed in the following Figure 2:

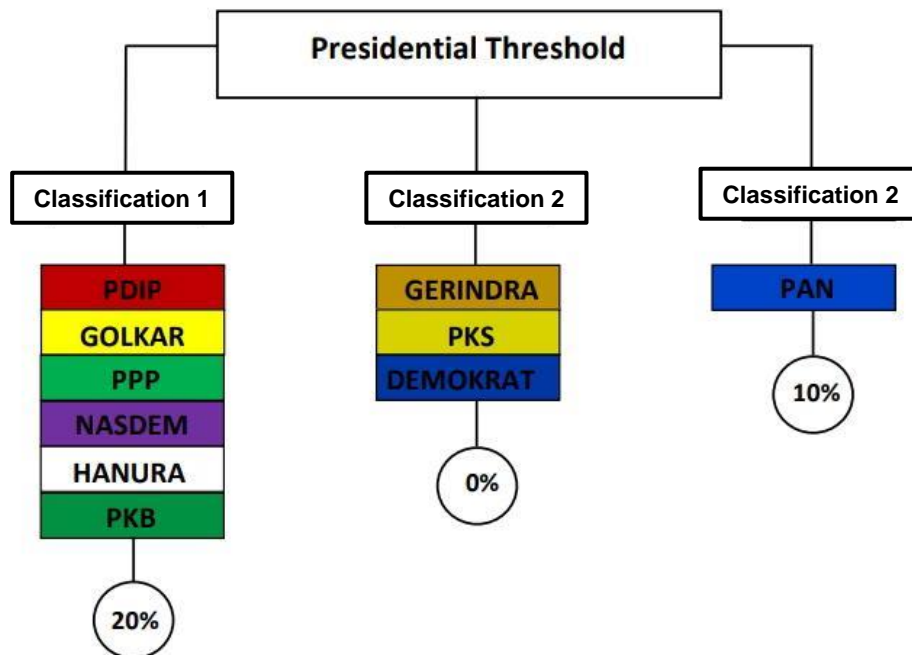


Figure 2. Presidential Election

Source: Minutes of Special Committee Meeting on Election Implementation Bill (data after processing)

Law and Authoritarianism in the Presidential Threshold Regulation

The discussion on the presidential threshold in a special committee meeting on the Election Implementation Bill has an element of interest from each faction. The determination of the presidential threshold is dominated by factions who want a high percentage of nomination limits. It was proven in the minutes of the meeting that 6 factions agreed with the government's proposal of 25% and some even reached the 30% limit. The remaining 3 factions want no limit in presidential nominations or 0% and one faction wants a 10% threshold.

Contextually, the agreement can be seen in several debates that took place at the 6th Working Meeting on Friday, February 17, 2017. At the debate there was one important point that must be considered, from the representatives of the factions. The majority of the factions voiced the same votes related to the percentage of presidential threshold. The majority of the factions gave the same decision regarding this matter, namely approving

proposals from the government. Golkar Party faction led by H. Rambe Kamarul Zaman, M. Sc., MM. Golkar faction expressed its attitude to agree with the government with a presentation size of 20-25%. In his view, Golkar considers that simultaneous elections are a direct order from the constitution, so that the terms and standards must be determined by the legislature (open legal policy).

Furthermore, the PPP Faction (Dr. H. Mz. Amirul Tamim, M.Sc) in his political view provided two conceptually options, namely the presidential threshold with a percentage of 0% and 25-30%. This is because if you want each party to nominate their respective candidates, they must be based on normative provisions for each party entitled to nominate a presidential candidate. On one hand, if the presidential threshold percentage is set at 25-30%, the concept is normative that every party that has a seat in the DPR has the right to nominate a presidential candidate. This means that to use the presidential threshold, parties must meet the national primary threshold provisions.

The next view was conveyed by F-PKB (Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA) which was grammatically interpreted that the FKB faction considered that if the presidential threshold provisions were too high and had an impact on the inability of new parties to participate in the presidential election constellation, then it could not blame the verdict, Constitutional Court.

"If so, if it is possible to fight that this is not considered not to violate the results of the Constitutional Court's Decree, the PKB believes that agreeing with the government's proposal, at least the threshold follows the parliamentary threshold, then, yes ('Risalah Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017)."

For the attitude expressed by the Nasdem Party Faction (Drs. T. Taufiqulhadi, M.Sc.), giving an agreed view with the government, which is 25% without giving a logical argument or argument that can be justified. "If Nasdem agrees with the government, then we think that at least twenty percent of the total number of seats in the DPR or get twenty-five percent of the national legitimate votes. Like the government that is the attitude of Nasdem ('Risalah Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, 2017). The same attitude without

argumentation was also carried out by F-PDIP (Arif Wibowo) and F-Hanura (Rufinus Hotmaulana Hutahuruk) to directly agree with the provisions set by the government, which is 25%.

Based on the attitudes and arguments of the factions, the overall agreement was agreed upon by the government. Agreements by some of the actors forming these regulations conceptually can be categorized as political forming of regulations. Before there were written rules, there was a political intention to achieve a goal. More clearly about the agreement before the formation of rules can be seen in the opinion of Spencer A. Overton regarding political law, namely:

"Some problems involve the structure of institutions that regulate political activities such as allocating responsibility among federal, state, and local officials and between different branches and agencies within each level of government; varying standards (or a lack of standards) stemming from decentralization (for example, different localities resolving similar disputes or multiple federal agencies investigating the same set of allegations); delegating discretion to private actors such as political parties (for example, by allowing them to challenge voters at the polls); capture agency; and review of agency decisions. Other challenges stem from rulemaking and adjudication, such as the adequacy of notice and process, the clarity and administration of legal directives, and the balance between consistency and flexibility in decision making " (Overton, 2013).

In his view, Overton stated universally that there are factors that determine a legal policy. This factor can be seen from the cultural conditions of a region or the will of political parties that have their respective interests. These factors will form regulatory standards that vary according to the interests behind the formation of the policy (Overton, 2013).

Furthermore, according to Michael Bayles, political and legal relations can be simplified into 3 factors, (Bayles, 1982):

1. A legal order can be empirically dependent upon a political order, a view held by all people who believe effectiveness is a necessary condition for the existence of a legal system
2. A legal order can be normatively dependent upon a political order or a

political order that meets certain moral conditions such as consent or an internal morality.

3. Either an empirical or normative relationship can be the basis for an analytic relationship so that the concept of a legal system logically depends on an effective or moral political order.

The first factor empirically allows for the relationship between law and politics through political orders (political orders) (Bayles, 1982). These political orders are carried out by individuals or groups who assume that effectiveness is necessary for the existence of the legal system. The second factor assumes that legal orders are normatively dependent on political orders, meaning that formally the rules that are formed are following the morals desired by the political orders of legislators. The third factor, both the effectiveness and morale can be the basis for determining policy formation (Thompson, 2000).

In discussing the determination of the presidential threshold at the limited meeting in 2017, it is clear that the dominance of parties that want a percentage of 20% has a relation in terms of strengthening the position of one of the presidential candidates, both effectively and morally (Thompson, 2000). The agreement to determine the presidential threshold by the 6 factions is systematically the same goal, namely to create overpower candidates in the presidential election (Mainwaring et al., 1997). There is almost no substantial debate on the determination of the presidential threshold. This is because in general the dominant factions choosing a high percentage want to strengthen presidential system and a small political party cannot necessarily be able to carry a pair of presidential candidates. According to the factions that agreed 20%, the presidential threshold wanted high filtering (high standard) (Fogg, 2002) in elections, even though these standards have political interests for incumbent candidates.

This is in Bruce Cain's opinion "A narrow focus on election law prompts us to overlook non-selection governance issues, such as pay-to-play rules,

government transparency, lobbying regulation, and legislative ethics committees" (Cain, 2012). This means that in matters of election policy the riskiest thing to happen is the existence of supply and demand between the authorities and the stakeholders.

If we look at the objectives of election based on the process and its results, according to *Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi* (PERLUDEM), the objectives of the election are (i) making it easier for voters to vote, (ii) simplifying the implementation schedule, (iii) saving state funds, and (iv) balancing the burden of the organizer. Whereas in terms of results, the objectives of the election are (i) increasing voter participation and control of elected candidates, (ii) creating an effective presidential government system, (iii) simplifying the party system in the DPR and DPRD, and (iv) strengthening and democratizing political parties. These objectives must be written down in an explanation of the law, so that they are read as electoral designs that will facilitate the formulation of articles and paragraphs (Perludem, 2020).

While normatively, the objectives of the election regulation can be seen in article 4 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, namely:

The Election Arrangement aims to:

- a. strengthen the democratic state system;
- b. realize fair and integrity elections;
- c. ensure consistency in the regulation of the electoral system;
- d. provide legal certainty and prevent duplication in directing elections, and
- e. realize effective and efficient elections.

Based on the above points of objectives of the election, in determining the presidential threshold, it seems do not describe the essence of the objectives of the election regulations. This causes intrigue and problems in a structured and massive way: starting from the initial stage of the disproportionate candidacy, because the simultaneous election model that uses a split ticket cannot provide a leader candidate who should be able to appear more. In terms of effectiveness, it was not created because after the

election, the political situation was destructive and political monopoly became very high.

Furthermore, at the level of the presidential government system, what is desired is a balance between parliament and the executive. Whereas essentially a presidential system in Indonesia requires a balanced and controlled government (checks and balances) (Aritonang, 2010). Factually, the application of the presidential threshold creates an unbalance government because the executive position is more dominant in running the government. The condition in the parliament which should be the people's watch tool has become one direction with the president's policy and even seems not to look at the people as their constituents (Soetjipto, 2014). This is also caused by simultaneous elections which provide very short pauses to form coalitions in government. So that the parties will automatically join the bearer party that has a high parliamentary threshold and incumbent candidates who have above average electability.

Based on this answer a pattern of legal political relations that emerged in the formation of the presidential threshold percentage applied to the holding of simultaneous elections. The high percentage of presidential threshold becomes a benchmark that the rules have original intensities which are contrary to responsive legal rules, which is rooted in four basic steps such as ideological footing, normative footing, constitutional footing and moral footing (Tanya, 2011). Instead, it is more inclined to the political intrigue that prioritizes the interests of the government elite rather than the interests of society which should be the main value in the formation of responsive laws. Based on the perspective of legal politics, the non-fulfillment of the values contained in the formation of responsive law shows that the formation of the law is conservative or orthodox, it is related to other variables, namely the authoritarian political system.

CONCLUSION

The presidential threshold legal politics have the characteristics of

authoritarian law. This is because in the discussions at the Special Committee on the Election Implementation Draft Bill related to the formation of the presidential threshold tend to be led by the domination of incumbent government, instead of to strengthen democracy or strengthen the presidential system. In the discussion of the special committee meeting, there were also political interests of the authorities to maintain the power of the ruling party and incumbent government. The political politics of determining the presidential threshold also contradicts the principle of effective and proportional election objectives, because the presence of a presidential threshold with a high percentage of up to 20% creates a gap in political rights or democratic rights between parties with majority votes and minority parties.

The authoritarian legal characteristics of the presidential threshold discussion have hurt the electoral system and democracy in Indonesia. This can be described based on several things: *first*, the number of digits of presidential threshold which has been determined before the holding of the Special Committee on Election Implementation Bill on the presidential threshold. *Secondly*, the magnitude of the presidential threshold percentage up to 20% results in high political intensity. This arises as a result of the small number of candidates who can participate in the Presidential Election contestation. *Third*, there is an inconsistency of political willingness in the Special Committee on Election Implementation Bill related to the determination of the presidential percentage threshold.

BIBLIOGRAPHY

- Anggoro, Syahriza Alkohir. (2019). Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1): 77-86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.
- Aritonang, Dinoroy Marganda. (2010). Penerapan Sistem Presidensil Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22 (2), 391-407.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- Bastian, S., Luckham, R., & Goetz, A. M. (2003). *Can Democracy Be Designed?: The Politics of Institutional Choice in Conflict-Torn Societies*. Zed Books.
- Bayles, Michael D. (1982). Character, Purpose, and Criminal Responsibility. *Law and Philosophy* 1 (1), 5–20. <https://doi.org/10.1007/BF00143144>.
- Budiardjo, M. (2007). *Fundamentals of Political Science*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cain, Bruce E. (2012). 'Teaching Election Law to Political Scientists'. . . *Louis ULJ* 56: 725.
- Courtney, John and Smith, David. (2010). *The Oxford Handbook of Canadian Politics*. OUP USA.
- Dahrendorf, Ralf. (1986). *Konflik dan konflik dalam masyarakat industri: sebuah analisa-kritik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dayanara, L. (2017). *Relevansi Sistem Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*. Semarang: Fakultas Hukum UNNES Semarang.
- Diniyanto, A. (2018). *Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019*. Semarang: Jurnal UNNES.
- Fogg, Karen. (2002). *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. International Idea.
- Halim, Abd. (2015). The Impact of Proportional Open System to Political Behavior:Case Study the Community Sumenep Madura in An Election Legislative 2014. *Jurnal Humanity* 9(2). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2387>.
- Hartono, Sunaryati. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Kami, Indah Mutiara. (2017). 'Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial Di UU Pemilu - Penelusuran Google'. 2017. https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01469voIB4nU60fBwmwdL2Fa-fOaw%3A1598115574394&ei=9k5BX6XWF4HC3LUPu4iTmAo&q=Sudah+Disahkan%2C+Ini+5+Isu+Krusial+di+UU+Pemilu&oq=Sudah+Disahkan%2C+Ini+5+Isu+Krusial+di+UU+Pemilu&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAziICCEQFhAdEB46BAgjECdQxrIdWMayHWD5tB1oAHAAeACAAfoBiAGaBZIB

BTauMy4xmAE AoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwilqfy4pK_rAhUBIbcAHTvEBKMQ4dUDCAs&uact=5.

Mainwaring, Conley Professor of Political Science Scott, Scott Mainwaring, Matthew Soberg Shugart, and Peter Lange. (1997). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. USA: Cambridge University Press.

Marpaung, Lintje Anna. (2012). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum. *Pranata Hukum*, 7(1), 1-14.

Mayo, Henry Bertram. (1960). *An Introduction to Democratic Theory*. Oxford University Press.

MD, Mohammad Mahfud. (1993). *Perkembangan politik hukum: studi tentang pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia*. Disertasi. Universitas Gadjah Mada.

MD, Mohammad Mahfud. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

Nasution, M. (2015). *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Medan: Puspantara.

Oetama, J. (2001). *Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1999-2001*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Oman, S. (2016). *Concepts and Theory of Social Movements*. Malang: Intrans Publishing.

Overton, Spencer. (2013). Political Law. *George Washington Law Review* 81: 1783.

Perludem. (2020). 'Perludem Uji Materi Ketentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)'. Diakses dari <https://perludem.org/wp-content/plugins/downloadattachments/includes/download.php?id=794>.

Prasetyoningsih, Nanik. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum* 21(2), 248.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.

'Risalah Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2017)'. 2017.

Shidarta. (2012). *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*. Jakarta: HuMa dan Epistema Insititute.

- Soedarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Soetjipto, Ani Widayani. (2014). *Kerja untuk rakyat: buku panduan anggota legislatif*. Depok: Puskapol.
- Tanya, Bernard L. (2011). *Politik hukum: agenda kepentingan bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Thohari, A. Ahsin and Syauckani, Imam. (2006). *Dasar-dasar politik hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Thompson, Dennis Frank. (2000). *Etika politik pejabat negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wisnewski, J. Jeremy. (2014). Torture, Terrorism, and the Use of Violence. *Journal of Political Philosophy*, 6 (1),
- Yana, H. S. (2016). *Politics of Expansion in Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Zuhri, Sholehudin. (2018). PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PEMILU: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 3 (2), 94-107.

POLITICON

JURNAL ILMU POLITIK

ISSN : 2685-6670 (ONLINE) **VOLUME 3, No.1** **Maret 2021**



PENERBIT :
PRODI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN Sunan Gunung Djati Bandung